



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III

TAHUN 2025

*Balai Pelaksana Penyediaan dan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sulawesi III*



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga **Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025** ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama periode triwulan tersebut, sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas kinerja di masa mendatang.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, data, serta kontribusi dalam proses penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas terkait capaian kinerja, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi perbaikan yang diperlukan.

Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat sebagai dasar pengambilan keputusan, peningkatan kualitas pelayanan, dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan laporan di periode selanjutnya.

Akhir kata, semoga kerja sama, komitmen, dan semangat perbaikan terus menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas pada periode berikutnya.

Makassar, 2 Oktober 2025

Kepala Balai,

BAKHTIAR

NIP. 19711000 200212 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR GAMBAR	6
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1 LATAR BELAKANG	7
1.2 TUGAS DAN FUNGSI	9
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	12
1.3.1 Susunan Stuktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III	12
BAB II CAPAIAN KINERJA	18
2.1 Target Kinerja Triwulan III berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja. .	18
2.2 Capaian Kinerja Triwulan BP3KP Sulawesi III.	32
2.2.1 Capaian Target Triwulan III Program Dukungan Manajemen	33
2.3 Permasalahan/ Faktor Keberhasilan.....	63
2.3.1 Permasalahan pelaksanaan kegiatan BP3KP Sulawesi III.....	63
2.3.2 Permasalahan pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan	64
2.3.3 Permasalahan pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara	64
BAB III PENUTUP	66
3.1 Rencana Tindak Lanjut.....	66
3.1.1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III	66
3.1.2 Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan.....	67
3.1.3 Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara	68
3.2 Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya	70
LAMPIRAN	71



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Dipa Sekretariat Jenderal Tahun 2025.....	19
Tabel 2.2	Target Rencana Keuangan Dan Fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Dipa Sekretariat Jenderal Tahun 2025	20
Tabel 2.3	Target Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun 2025	21
Tabel 2.4	Target Rencana Keuangan Dan Fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun 2025.....	24
Tabel 2.5	Target Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025	24
Tabel 2.6	Target Rencana Keuangan Dan Fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025	27
Tabel 2.7	Target Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025.....	27
Tabel 2.8	Target Rencana Keuangan Dan Fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025.....	29
Tabel 2.9	Target Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Dipa Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025	29
Tabel 2.10	Target Rencana Keuangan Dan Fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Dipa Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025	30
Tabel 2.11	Capaian Target Kinerja Triwulan III BP3KP Sulawesi III Sekretariat Jenderal Kementerian PKP Tahun Anggaran 2025	34
Tabel 2.12	Progres Fisik dan Keuangan Triwulan III BP3KP Sulawesi III Sekretariat Jenderal Kementerian PKP Tahun Anggaran 2025	35
Tabel 2.13	Target Kinerja Triwulan III BP3KP Sulawesi III DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	39
Tabel 2.14	Progres Fisik dan Keuangan Triwulan III BP3KP Sulawesi III DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025	41
Tabel 2.15	Target Kinerja Triwulan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.....	46
Tabel 2.16	Progres Fisik dan Keuangan Triwulan III BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025.....	48



Tabel 2.17 Target Kinerja Triwulan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	53
Tabel 2.18 Progres Fisik dan Keuangan Triwulan III BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025.....	55
Tabel 2.19 Target Kinerja Triwulan DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	58
Tabel 2.20 Progres Fisik dan Keuangan Triwulan IV BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Wilayah Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III (Sumber: Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III)	9
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III	16
Gambar 1.3 Struktur Organisasi Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan	17
Gambar 1.4 Struktur Organisasi Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara	17
Gambar 2.1 Grafik Realisasi Keuangan BP3KP Sulawesi III Dipa Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	37
Gambar 2.2 Grafik Realisasi Fisik BP3KP Sulawesi III Dipa Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	38
Gambar 2.3 Grafik Realisasi Keuangan BP3KP Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	43
Gambar 2.4 Grafik Realisasi Fisik BP3KP Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	44
Gambar 2.5 Grafik Realisasi Keuangan BP3KP Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	50
Gambar 2.6 Grafik Realisasi Fisik BP3KP Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	51
Gambar 2.7 Grafik Realisasi Keuangan BP3KP Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	56
Gambar 2.8 Grafik Realisasi Fisik BP3KP Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	57
Gambar 2.9 Grafik Realisasi Keuangan BP3KP Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	61
Gambar 2.10 Grafik Realisasi Fisik BP3KP Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	62



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan dari sistem perencanaan, pemograman, penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah.

Dan sebagai wujud dari pelaksanaan akuntabilitas dan kinerja, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III (Balai P3P Sulawesi III) berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis. Pelaporan kinerja dimaksudkan mengkomunikasikan capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan untuk



mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya berdasarkan Rencana Strategis Balai P3P Sulawesi III Tahun 2025-2029. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 20 menyebutkan laporan kinerja dihasilkan dari suatu SAKIP yang diselenggarakan masing-masing identitas pelaporan/akuntansi. Sesuai

ketentuan tersebut penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki peran strategis karena dapat memberikan informasi antara lain:

1. Keberhasilan/kegagalan pencapaian output/outcome yang tercantum dalam perencanaan kinerja tahun 2025;
2. Hubungan kinerja dan hasil sumber daya; dan
3. Menjelaskan kinerja dan hasil-hasil yang dicapai.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme, Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional yang menguatkan integrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang juga berimplikasi pada implementasi SAKIP.

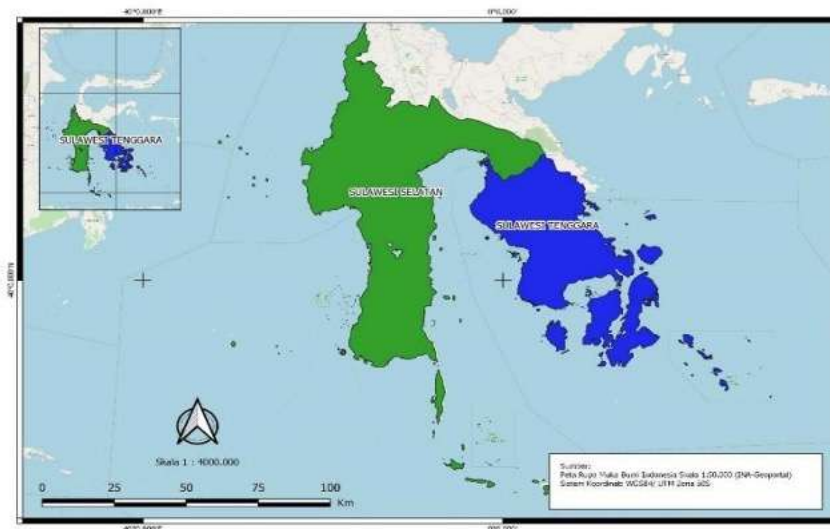
Penyelenggaraan SAKIP meliputi:

1. Rencana Strategis.
2. Perjanjian Kinerja.
3. Pengukuran Kinerja.
4. Pengelolaan Data Kinerja.
5. Pelaporan Kinerja.
6. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai P2P Sulawesi III Triwulan IV Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indicator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Balai P3KP Sulawesi III merupakan salah satu unit kerja yang menangani Pembangunan Perumahan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No 1 Tahun 2025 yang merupakan penggabungan dari Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara.



Gambar 1.1 Wilayah Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III (Sumber: Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III)



Berdasarkan Permen PKP Nomor 1 Tahun 2025 Tugas Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III adalah Melaksanakan Penyediaan Perumahan, Peningkatan Kualitas Perumahan, Pengembangan Kawasan Permukiman, penataan Kawasan Permukiman Pasca bencana dan kerusakan sosial, dan fasilitasi Serah Terima Aset.

Sebelum terbentuknya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III (BP3KP Sulawesi III) di kenal sebagai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III (BP2P Sulawesi III) dibawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada awalnya unit teknis penyediaan perumahan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki nomenklatur sebagai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi III yang tersebar di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara. balai ini dibentuk sebagai unit pelaksana teknis (UPT) yang fokus pada pembangunan perumahan dan prasarana perumahan di daerah masing-masing. Sebelum Tahun 2025 struktur organisasi, tugas, dan fungsi awal balai ini mengacu pada Peraturan Menteri PUPR tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT yang juga mengatur penugasan teknis di tingkat daerah.

Pada tahun 2025, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Peraturan ini mengubah nomenklatur dan struktur organisasi UPT, termasuk balai-balai yang sebelumnya disebut BP2P, menjadi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP). Tujuan perubahan ini adalah untuk menyelaraskan fungsi teknis pelaksanaan perumahan dengan fokus yang lebih luas, yaitu tidak hanya penyediaan rumah tetapi juga pengembangan kawasan permukiman serta koordinasi penyediaan lahan, PSU, dan rehabilitasi kawasan pasca bencana.



Sedangkan menurut fungsi Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
2. Penyusunan rencana teknis pengembangan Kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
3. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
4. pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan Kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
5. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
6. pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
7. pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial;
8. pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
9. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
10. pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
11. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
12. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
13. pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
14. pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta system pengendalian anti korupsi dan penyusunan; dan



15. pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Secara organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Sulawesi III membawahi 2 (dua) wilayah Satuan Kerja diantaranya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan dan Satuan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Tenggara. Adapun susunan Struktur Organisasi yaitu :

1.3.1 Susunan Stuktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III

1. Kepala Balai

Kepala Balai mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja. Kepala Balai juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan dengan bawahan dan memastikan pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Kasubag Umum dan Tata Usaha

Melakukan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber daya manusia, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pelaksanaan koordinasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, koordinasi administrasi pelaksanaan sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko, komunikasi publik serta layanan hukum balai.

3. Kepala Seksi Pelaksana Wilayah I

Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pembinaan



usaha dan perlindungan konsumen, serta koordinasi dan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial;

- Melakukan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data, pada wilayah pesisir sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan dan pesisir.

4. Kepala Seksi Pelaksana Wilayah II

Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data pada wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan dan pesisir.

5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas melaksanakan tugas dan wewenang terkait pengadaan barang dan jasa serta bertanggung jawab atas segala pengeluaran anggaran belanja.

6. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)

Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) mempunyai tugas menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen pembayaran. PPSPM juga bertanggung jawab atas keabsahan dokumen tersebut.

7. Bendahara

mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja.



Adapun Untuk 2 (Dua) Satuan Kerja yang membawahi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III, yaitu Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara.

1. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Selatan

a. Kepala Satuan Kerja mempunyai tugas menyusun DIPA, menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran/ keuangan, menetapkan rencana melaksanakan kegiatan dan rencana penarikan dana, mengawasi pemantauan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan perundang –undangan.

b. PPK Perencanaan/ Pengendalian

bertugas menyusun rencana dan analisa teknis, pengendalian pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, penanganan kawasan permukiman kumuh dan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Provinsi Sulawesi Selatan.

c. PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus

PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus mempunyai tugas melakukan Pelaksanaan kegiatan Rumah Susun dan Rumah Khusus deleniasi perumahan perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan.

d. PPK Rumah Swadaya, PSU, dan Kawasan Permukiman

PPK Rumah Swadaya, PSU dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan Rumah Swadaya, Pembangunan PSU di perumahan MBR, Penanganan kumuh pada kawasan permukiman Provinsi Sulawesi Selatan.



e. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPSM)

Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memputugas melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

f. Bendahara Pengeluaran

Pejabat perbendaharaan negara yang mempunyai tugas melakukan pembayaran atas uang yang ada dalam kewenangannya.

2. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tenggara

a. Kepala Satuan Kerja mempunyai tugas menyusun DIPA, menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran/ keuangan , menetapkan rencana melaksanakan kegiatan dan rencana penarikan dana , mengawasi pemantauan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan perundang –undangan.

b. PPK Perencanaan/ Pengendalian

bertugas menyusun rencana dan analisa teknis, pengendalian pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, penanganan kawasan permukiman kumuh dan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Provinsi Sulawesi Tenggara.

c. PPK Rumah Swadaya, PSU, dan Kawasan Permukiman

PPK Rumah Swadaya, PSU dan Kawaasn Permukiman mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan Rumah Swadaya, Pembangunan PSU di perumahan MBR, Penanganan kumuh pada kawasan permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara.

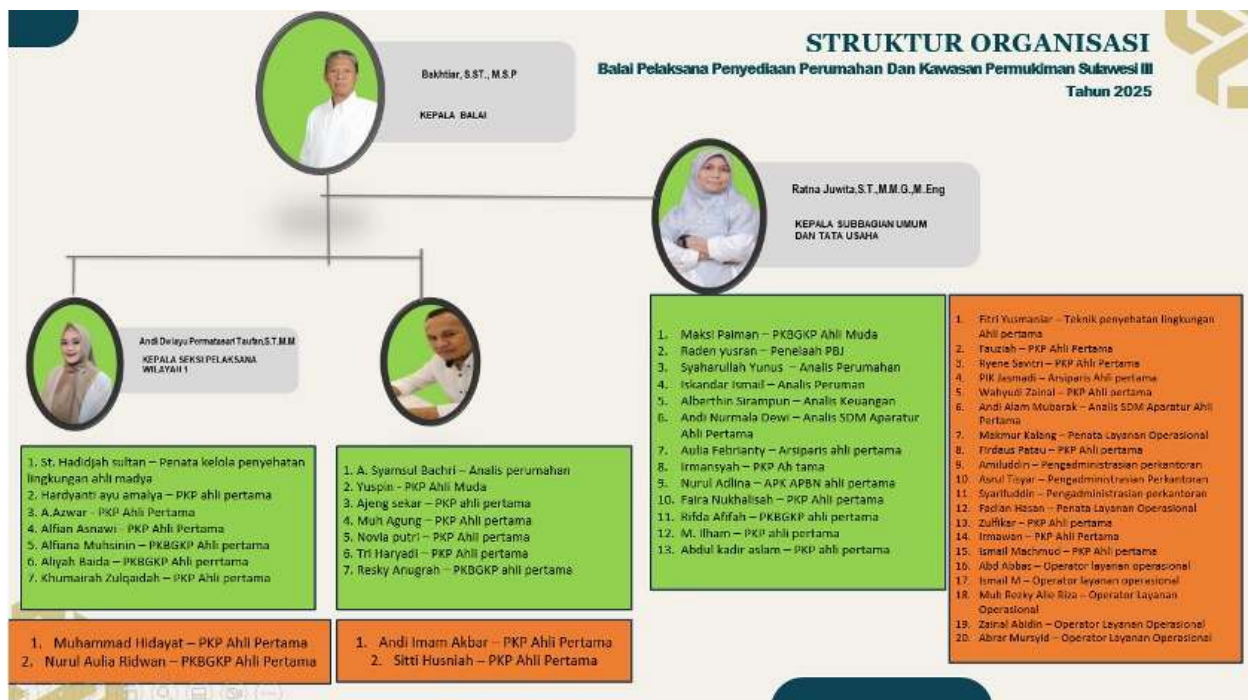
d. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPSM)

Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memputugas melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

e. Bendahara Pengeluaran

Pejabat perbendaharaan negara yang mempunyai tugas melakukan pembayaran atas uang yang ada dalam kewenangannya.

Untuk lebih melengkapi Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III dan 2 (Dua) Satuan Kerja yaitu Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara dapat di lihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI SELATAN



BAB II

CAPAIAN KINERJA

2.1 Target Kinerja Triwulan III berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja.

Target Kinerja Triwulan III berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja merupakan target kumulatif yang menjadi tolok ukur pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan akhir bulan September tahun berjalan. Pada periode ini, seluruh unit kerja diharapkan telah melaksanakan sebagian besar tahapan kegiatan sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan, sehingga capaian fisik dan keuangan dapat menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Pelaksanaan Triwulan III difokuskan pada percepatan penyelesaian kegiatan prioritas, peningkatan realisasi fisik dan penyerapan anggaran, serta penguatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program. Selain itu, dilakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan untuk memastikan kesesuaian antara target dan realisasi, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta menyusun langkah-langkah percepatan penyelesaian kegiatan yang masih belum mencapai target.

Capaian kinerja pada Triwulan III menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sebelum memasuki tahap penyelesaian pada Triwulan IV. Hasil evaluasi pada periode ini menjadi dasar dalam melakukan tindak lanjut, percepatan pelaksanaan kegiatan, optimalisasi penyerapan anggaran, serta penyempurnaan strategi pelaksanaan agar seluruh target kinerja dan indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dapat tercapai secara optimal pada akhir tahun anggaran. Dengan demikian, pelaksanaan Triwulan III tidak hanya berorientasi pada pencapaian target kuantitatif, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelaksanaan program, efektivitas penggunaan anggaran, dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Tabel 2.1 Target Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Dipa Sekretariat Jenderal Tahun 2025

Sasaran Strategis / Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Rencana Aksi	Target PK Revisi	Aktivitas	TW I	TW II	TW III	TW IV
Meningkatnya layanan dukungan manajemen								
Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	3 Layanan	3 Layanan	- Belanja Keperluan Perkantoran - Belanja Bahan - Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Belanja Jasa Pos dan Giro - Belanja Langganan Listrik - Belanja Langganan Telepon - Belanja Langganan Air - Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	33,97	100,00

				- Belanja Honor Operasional Satuan Kerja				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Tahun 2025.

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas Sasaran Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen diukur melalui indikator Jumlah Layanan Perkantoran dengan target 3 layanan sesuai Rencana Aksi dan PK Revisi. Hingga Triwulan III capaian sebesar 33,97%, sehingga pada Triwulan IV ditargetkan mencapai 100% secara kumulatif. Percepatan dilakukan melalui optimalisasi belanja operasional perkantoran, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta dukungan administrasi guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Tabel 2.2 Target Rencana Keuangan Dan Fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Dipa Sekretariat Jenderal Tahun 2025

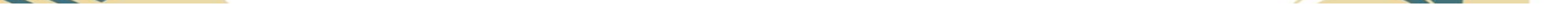
Rencana	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32	17,78	28,97	40,42	51,61	69,16	81,50	100,00
Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32	22,78	33,97	45,42	56,61	74,16	86,50	100,00

Sumber: Rencana Aksi BP3KP Sulawesi III Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas rencana pelaksanaan, progres keuangan mulai terealisasi pada bulan Mei sebesar 6,32% dan meningkat secara bertahap hingga mencapai 100,00% pada bulan Desember. Sejalan dengan itu, progres fisik juga mulai berjalan pada bulan Mei sebesar 11,32% dan terus meningkat secara konsisten setiap bulan hingga mencapai 100,00% pada akhir tahun. Pola ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berlangsung secara progresif sejak semester I dan mengalami percepatan pada Triwulan III dan IV guna memastikan seluruh target kinerja dapat tercapai sesuai rencana.

Tabel 2.3 Target Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun 2025

Sasaran Strategis / Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Rencana Aksi	Target PK Revisi	Aktivitas	TW I	TW II	TW III	TW IV
Terselenggaranya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Mendukung Penyediaan Rumah Layak Huni								
Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Terhadap kegiatan bantuan rumah swadaya, dan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	0,00	0,00	7,25	100
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekome dasi Kebijakan	1 Rekome ndasi / Laporan	1 Rekome dasi / Laporan	Melaksanakan Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	7,25	100
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman								
Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Terhadap kegiatan Pembangunan Rusun,	0,00	0,00	15,30	100



Jumlah unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	unit	0 unit	325 unit	Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum seperti jalan lingkungan, drainase, air minum, dan sanitasi guna mendukung terciptanya hunian yang layak, aman, dan nyaman serta meningkatkan kualitas lingkungan perumahan secara berkelanjutan.	0,00	0,00	7,25	100
--	------	--------	----------	--	------	------	------	-----

Sumber: Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Tahun 2025.

Berdasarkan Tabel 2.3 Berdasarkan Rencana Aksi dan PK Revisi, seluruh sasaran strategis ditargetkan mencapai 100% pada Triwulan IV. Pada sasaran keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, ditargetkan tersusunnya 1 laporan pemantauan dan evaluasi kegiatan tematik kawasan permukiman serta 1 rekomendasi kebijakan teknis Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan progres Triwulan III masing-masing 7,25%. Pada sasaran meningkatnya ketersediaan rumah layak huni, ditargetkan 3 laporan pemantauan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh (progres 15,30%), serta realisasi 3.541 unit Rumah Swadaya (progres 4,00%). Selanjutnya, penanganan permukiman kumuh seluas 44,94 Ha telah mencapai progres 4,00%, dan pembangunan 325 unit PSU

Perumahan dan Kawasan Permukiman mencapai progres 7,25% pada Triwulan III. Seluruh indikator dipercepat pada Triwulan IV guna memastikan capaian akhir tahun mencapai 100% sesuai target yang telah ditetapkan.

Tabel 2.4 Target Rencana Keuangan Dan Fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun 2025

Rencana	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	32,50	57,50	100,00
Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	37,50	62,50	100,00

Sumber: Rencana Aksi BP3KP Sulawesi III Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.4 diatas rencana pelaksanaan, realisasi keuangan dan fisik belum menunjukkan perkembangan hingga bulan Agustus. Progres mulai terlihat pada bulan September dengan capaian keuangan sebesar 2,25% dan fisik sebesar 7,25%. Selanjutnya pada Triwulan IV terjadi percepatan signifikan, dimana realisasi keuangan meningkat menjadi 32,50% pada Oktober, 57,50% pada November, dan mencapai 100,00% pada Desember. Progres fisik juga meningkat dari 37,50% pada Oktober menjadi 62,50% pada November, hingga mencapai 100,00% pada akhir tahun, sebagai bentuk penyelesaian seluruh target kegiatan sesuai rencana.

Tabel 2.5 Target Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025

Sasaran Strategis / Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Rencana Aksi	Target PK Revisi	Aktivitas	TW I	TW II	TW III	TW IV
Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan								
Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program	Rekomen dasi / Laporan	1 Rekome	1 Rekomen	Melaksanakan pelaporan kebijakan,	0,00	0,00	10,22	100



Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Rekomen dasi / Laporan	1 Rekome ndasi / Laporan	1 Rekomen dasi / Laporan	Melaksanakan pelaporan kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	0,00	0,00	13,55	100
Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan yang ditingkatkan kualitasnya	unit	498 unit	490 unit	Melaksanakan peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah melalui perbaikan atau peningkatan rumah tidak layak huni menjadi layak huni.	0,00	0,00	4,00	100

Sumber: Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Tahun 2025.

Berdasarkan Tabel 2.5 Berdasarkan Rencana Aksi dan PK Revisi, seluruh sasaran strategis pada penyelenggaraan perumahan perkotaan ditargetkan mencapai 100% pada Triwulan IV. Pada sasaran meningkatnya kinerja keterpaduan dan evaluasi, ditargetkan tersusunnya 1 rekomendasi kebijakan, strategi dan program prioritas (progres Triwulan III sebesar 10,22%) serta 3 laporan pemantauan dan evaluasi (progres 20,05%). Pada sasaran meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni, ditargetkan 1 rekomendasi kebijakan pembangunan perumahan perkotaan (progres 14,23%) serta pembangunan 44 unit rumah susun hunian ASN/TNI/POLRI (progres 4,00%). Selanjutnya, pada sasaran peningkatan kualitas pembangunan

perumahan perkotaan, ditargetkan 1 rekomendasi kebijakan (progres 13,55%) dan peningkatan kualitas 490 unit Rumah Swadaya Perkotaan (progres 4,00%). Seluruh indikator dipercepat pada Triwulan IV untuk memastikan capaian akhir tahun mencapai 100% sesuai target yang telah ditetapkan.

Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Laporan	- Laporan	3 Laporan	Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	0,00	0,00	10,00	100,00
Jumlah Unit Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	unit	186 unit	175 unit	Melaksanakan peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah melalui perbaikan atau peningkatan rumah tidak layak huni menjadi layak huni.	0,00	0,00	4,00	100

Sumber: Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Tahun 2025.

Berdasarkan table 2.7 diatas Pada Tahun Anggaran berjalan, sasaran peningkatan kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan dilaksanakan melalui 1 kegiatan koordinasi serta penyusunan 2 laporan pemantauan dan evaluasi yang terealisasi pada Triwulan III dan IV dengan capaian 100% pada akhir tahun. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan, dilaksanakan 3 laporan pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kualitas 175 unit rumah swadaya (revisi dari 186 unit), yang juga mencapai progres 100% pada akhir periode. Capaian tersebut

menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai target revisi Perjanjian Kinerja dan mendukung peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perdesaan.

Tabel 2.8 Target Rencana Keuangan Dan Fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025

Rencana	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	32,50	65,50	100,00
Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	37,50	70,50	100,00

Sumber: Rencana Aksi BP3KP Sulawesi III Tahun 2025

Berdasarkan table 2.8 diatas rencana penyerapan anggaran dan progres fisik, pelaksanaan kegiatan mulai menunjukkan realisasi pada Triwulan III, dengan capaian keuangan sebesar 5,00% dan fisik 10,00% pada bulan September. Progres meningkat signifikan pada Triwulan IV, dimana realisasi keuangan mencapai 32,50% pada Oktober, 65,50% pada November, dan 100,00% pada Desember, sedangkan capaian fisik mencapai 37,50% pada Oktober, 70,50% pada November, dan 100,00% pada Desember. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran dan seluruh target keuangan maupun fisik dapat diselesaikan secara optimal hingga mencapai 100% pada akhir periode.

Tabel 2.9 Target Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Dipa Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025

Sasaran Strategis / Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Rencana Aksi	Target PK Revisi	Aktivitas	TW I	TW II	TW III	TW IV
Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel								
Jumlah Kebijakan Keterbukaan Publik,	Rekomen dasi / Laporan	1 Rekome	1 Rekomen	Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas	0,00 %	0,00 %	00,00 %	100%

Transparansi, dan Akuntabilitas		ndasi / Laporan	dasi / Laporan					
Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman								
Jumlah Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	Rekomen dasi / Laporan	1 Rekome ndasi / Laporan	1 Rekomen dasi / Laporan	Melakukan Penyusunan dan Penerapan Manajemen Risiko	0,00 %	0,00 %	25,05 %	100%

Berdasarkan Tabel 2.9 diatas Pelaksanaan sasaran peningkatan dukungan kebijakan keterbukaan publik dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan Zona Integritas dengan target 1 rekomendasi/laporan yang direncanakan tercapai pada Triwulan IV dengan capaian 100%. Selain itu, dalam rangka meningkatkan dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi, dilakukan penyusunan dan penerapan manajemen risiko dengan target 1 rekomendasi/laporan, dimana progres mulai terlaksana pada Triwulan III sebesar 25,05% dan ditargetkan mencapai 100% pada Triwulan IV. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, serta mendukung pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Tabel 2.10 Target Rencana Keuangan Dan Fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Dipa Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025

Rencana	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,05	50,25	75,05	100,00
Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	37,50	70,50	100,00

Sumber: Rencana Aksi BP3KP Sulawesi III Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.10 rencana penyerapan anggaran dan capaian fisik kegiatan, realisasi pelaksanaan mulai terlihat pada Triwulan III dengan capaian keuangan sebesar 25,05% pada bulan September, sementara progres fisik masih belum menunjukkan realisasi pada periode tersebut. Memasuki Triwulan IV, pelaksanaan kegiatan mengalami peningkatan yang signifikan, dimana realisasi keuangan mencapai 50,25% pada Oktober, 75,05% pada November, dan 100,00% pada Desember. Sejalan dengan hal tersebut, progres fisik juga meningkat dengan capaian 37,50% pada Oktober, 70,50% pada November, dan mencapai 100,00% pada Desember, sehingga seluruh target kegiatan baik dari sisi keuangan maupun fisik dapat diselesaikan secara optimal pada akhir tahun anggaran.



2.2 Capaian Kinerja Triwulan BP3KP Sulawesi III.

Sub bab ini menyajikan gambaran mengenai Capaian Target Triwulan III sebagai hasil evaluasi atas target kinerja yang telah ditetapkan untuk periode Triwulan III. Analisis ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara telah mencapai target yang direncanakan dalam Rencana Aksi Triwulanan. Melalui perbandingan antara target dan realisasi, sub bab ini memberikan informasi mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan, faktor-faktor pendukung maupun penghambat yang muncul selama periode Triwulan III, serta menjadi dasar bagi penyempurnaan strategi dan tindak lanjut pada triwulan berikutnya.

Pada Triwulan III Tahun Anggaran berjalan, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman. Secara umum, capaian kinerja pada triwulan ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya, baik dari sisi realisasi fisik maupun realisasi keuangan, seiring dengan percepatan pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun anggaran.

Realisasi kegiatan pada Triwulan III difokuskan pada penyelesaian pekerjaan konstruksi, penyusunan laporan kegiatan, serta penyelesaian administrasi pelaksanaan program. Berbagai upaya percepatan dilakukan melalui peningkatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, optimalisasi pengawasan pelaksanaan pekerjaan, serta pemantauan secara berkala terhadap perkembangan kegiatan di lapangan. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh target output kegiatan dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan III telah berjalan dengan baik dan mampu mendukung pencapaian target kinerja Balai. Meskipun terdapat beberapa kendala



teknis di lapangan, seperti penyesuaian jadwal pekerjaan dan kondisi operasional tertentu, namun hal tersebut dapat diatasi melalui langkah koordinatif dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, capaian kinerja pada Triwulan III diharapkan dapat memberikan kontribusi optimal dalam mendukung peningkatan kualitas hunian layak serta pengembangan kawasan permukiman yang berkelanjutan.

2.2.1 Capaian Target Triwulan III Program Dukungan Manajemen

Capaian target Triwulan III BP3KP Sulawesi III pada Program Dukungan Manajemen adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.11 Capaian Target Kinerja Triwulan III BP3KP Sulawesi III Sekretariat Jenderal Kementerian
PKP Tahun Anggaran 2025**

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	TARGET PK AWAL	SATUAN	CAPAIAN TARGET TRIWULAN III		KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen					
Jumlah Laporan Layanan Perkantoran	3	Layanan	33,97	48,41	- Belanja Keperluan Perkantoran - Belanja Barang Operasional Lainnya - Belanja Bahan - Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Belanja Jasa Pos dan Giro - Belanja Langganan Listrik - Belanja Langganan Telpon - Belanja Langganan Air - Belanja Langganan Daya dan jasa lainnya - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

Berdasarkan Tabel 2.11 diatas Pada Triwulan III, Indikator Jumlah Laporan Layanan Perkantoran menunjukkan kinerja yang baik dengan realisasi sebesar 48,41%, melampaui target kumulatif Triwulan III sebesar 33,97%. Capaian tersebut didukung oleh terlaksananya berbagai kegiatan operasional perkantoran, antara lain pemenuhan belanja keperluan perkantoran, belanja barang operasional, pengadaan bahan dan

persediaan konsumsi, pembayaran jasa pos dan giro, langganan listrik, telepon, air, serta daya dan jasa lainnya, pemeliharaan gedung, peralatan dan mesin, serta pembayaran honor operasional satuan kerja sesuai kebutuhan. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian anggaran yang belum terserap karena beberapa kegiatan pemeliharaan dan pengadaan dilaksanakan secara bertahap sesuai jadwal kebutuhan operasional, terdapat pembayaran yang belum jatuh tempo, serta sebagian kontrak atau tagihan baru akan direalisasikan pada triwulan berikutnya. Secara keseluruhan, realisasi yang telah melampaui target menunjukkan bahwa layanan perkantoran telah berjalan secara efektif dan mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, sehingga target kinerja tahunan masih berada pada jalur yang optimal untuk dicapai.

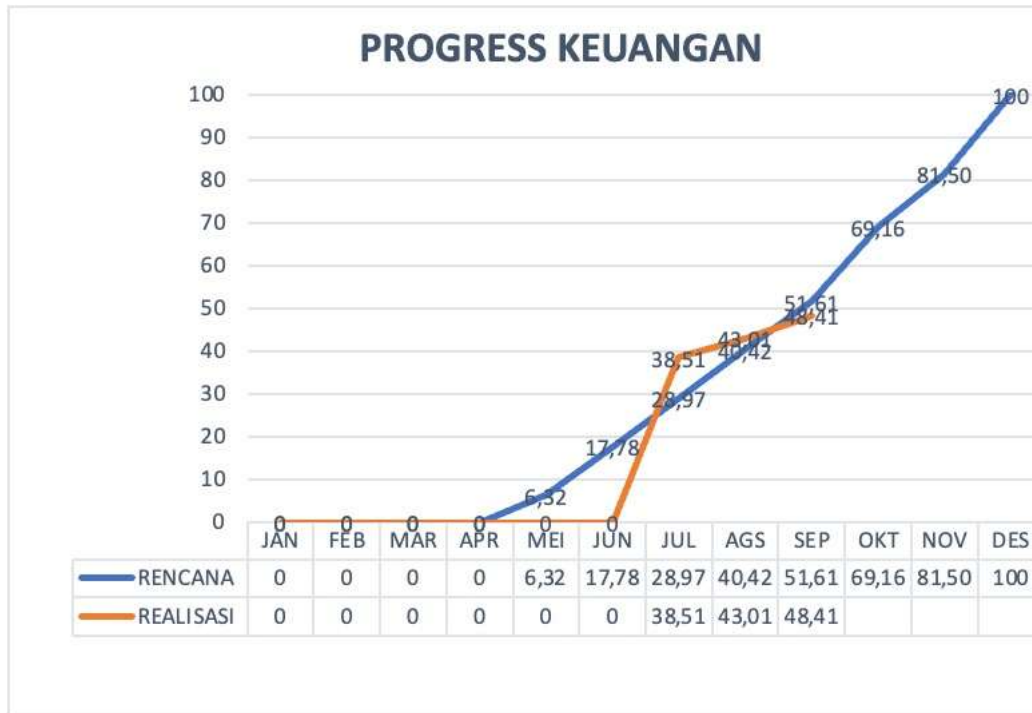
Tabel 2.12 Progres Fisik dan Keuangan Triwulan III BP3KP Sulawesi III Sekretariat Jenderal Kementerian PKP Tahun Anggaran 2025

No.	Nama Paket	Pagu RKAHL (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Progres Fisik Per Bulan											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Operasional Pemeliharaan Kantor	1.078.917.000	522.354.413	0	0	0	0	0	0	35,94	37,55	53,41			
2	Langganan Daya dan Jasa	82.895.000	33.405.001	0	0	0	0	0	0	24,09	34,84	45,30			
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	338.815.000	286.101.365	0	0	0	0	0	0	76,52	82,47	89,44			
4	Honor Operasional Satuan Kerja	33.460.000	17.760.000	0	0	0	0	0	0	0	25,56	58,08			
Total		1.078.917.000	522.354.413	0	0	0	0	0	0	43,87	48,15	59,86			

Berdasarkan tabel 2.12 diatas Pada Pada Triwulan III sampai dengan bulan September, pelaksanaan kegiatan Layanan Perkantoran menunjukkan progres fisik kumulatif sebesar 59,86% dengan realisasi keuangan sebesar Rp522.354.413. Capaian tersebut didukung oleh terlaksananya sebagian besar kegiatan operasional, terutama Pemeliharaan Sarana dan Prasarana yang telah mencapai progres fisik 89,44%, serta pelaksanaan Operasional Pemeliharaan Kantor, Langganan Daya dan Jasa, dan Honor Operasional Satuan Kerja yang berjalan sesuai jadwal. Meskipun demikian, penyerapan anggaran belum optimal karena beberapa kegiatan masih berada pada tahap pelaksanaan bertahap, pembayaran dilakukan setelah pekerjaan atau tagihan diterima dan diverifikasi, serta terdapat komponen belanja rutin yang baru akan terealisasi pada bulan-bulan berikutnya sesuai kebutuhan operasional dan jadwal kontrak. Keberhasilan capaian fisik hingga mencapai 59,86% menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tetap berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan, didukung oleh koordinasi yang baik antarunit, pengendalian pelaksanaan kegiatan secara berkala, serta tersedianya sarana pendukung sehingga target pelaksanaan pada Triwulan III dapat dicapai secara bertahap dan diharapkan seluruh target fisik maupun keuangan dapat terealisasi optimal hingga akhir tahun anggaran.



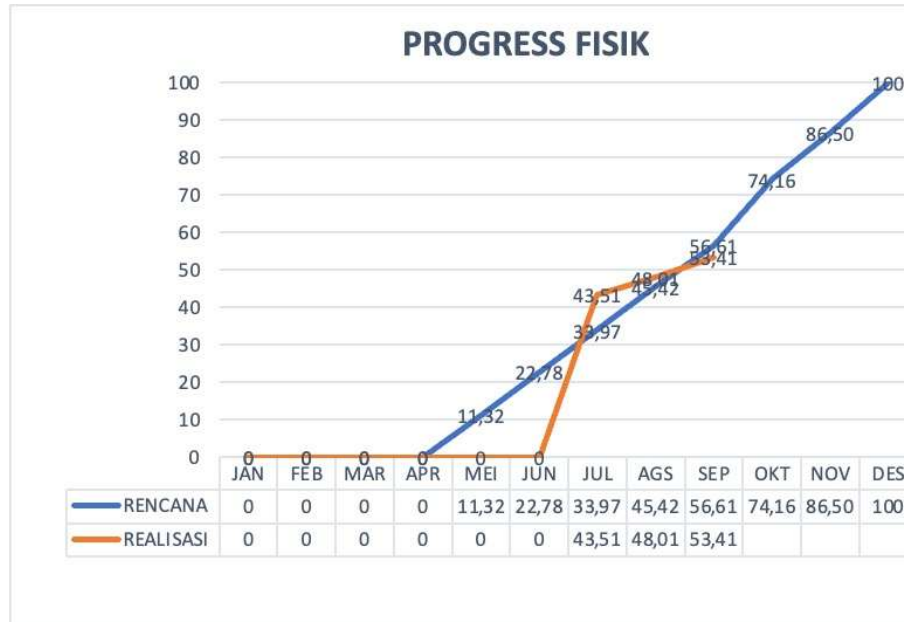
**Gambar 2.1 Grafik Realisasi Keuangan BP3KP Sulawesi III Dipa
Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman**



Berdasarkan gambar 2.1 Berdasarkan grafik Progress Keuangan, hingga Triwulan III (September) realisasi keuangan mencapai 48,41% dari target rencana sebesar 51,61%, sehingga terdapat deviasi sebesar 3,20%. Penyerapan anggaran yang belum mencapai target disebabkan oleh beberapa kegiatan yang masih berada pada tahap penyelesaian administrasi, pembayaran yang menyesuaikan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan tagihan, serta adanya kegiatan pengadaan dan pemeliharaan yang pelaksanaannya dijadwalkan pada triwulan berikutnya sehingga anggarannya belum dapat direalisasikan. Meskipun demikian, progres realisasi menunjukkan tren yang terus meningkat, dari 6,48% pada Juli, 29,45% pada Agustus, hingga 48,41% pada September, yang mencerminkan percepatan pelaksanaan kegiatan dan efektivitas pengendalian pelaksanaan anggaran. Dengan selisih terhadap target yang relatif kecil serta masih tersedianya waktu pada Triwulan IV, realisasi keuangan dinilai berada pada jalur yang baik untuk mencapai target akhir tahun melalui percepatan penyelesaian kegiatan, pembayaran kewajiban, dan optimalisasi pelaksanaan program sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.



Gambar 2.2 Grafik Realisasi Fisik BP3KP Sulawesi III Dipa Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman



Berdasarkan Gambar 2.2 Berdasarkan grafik progres fisik, hingga Triwulan III (September) realisasi fisik telah mencapai 53,41%, sedikit di bawah target rencana sebesar 56,61%, sehingga terdapat deviasi sekitar 3,20%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan telah terlaksana sesuai jadwal, khususnya pada kegiatan yang telah memasuki tahap pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan. Namun demikian, penyerapan anggaran belum optimal karena masih terdapat beberapa kegiatan yang proses pelaksanaannya berlangsung secara bertahap, pembayaran baru dapat dilakukan setelah pekerjaan selesai dan dokumen pertanggungjawaban dinyatakan lengkap, serta terdapat belanja rutin yang realisasinya mengikuti jadwal kebutuhan operasional hingga akhir tahun. Meskipun masih terdapat selisih antara target dan realisasi, capaian fisik yang telah mencapai lebih dari 50% mencerminkan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik melalui koordinasi yang efektif, pengendalian pelaksanaan secara berkala, dan percepatan penyelesaian pekerjaan, sehingga diharapkan sisa target fisik dan penyerapan anggaran dapat dicapai sesuai rencana pada triwulan berikutnya.

Tabel 2.13 Target Kinerja Triwulan III BP3KP Sulawesi III DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	TARGET PK AWAL	SATUAN	CAPAIAN TARGET TRIWULAN III		KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terselenggaranya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Mendukung Penyediaan Rumah Layak Huni					
Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1	Laporan	7,25	47,33	- Belanja Bahan - Belanja Sewa - Belanja Jasa Profesi - Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Rekomendasi/ Kebijakan	7,25	0	Belum ada realisasi keuangan
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman					
Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan	3	Laporan	15,30	27,52	- Belanja Perjalnan Dinas Biasa

Penanganan Kumuh					
Jumlah unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	3541	unit	4,00	0,36	- Target belum tercapai
Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh yang di Tangani secara terpadu					
Luas Penanganan Permukiman Kumuh	44,94	ha	4,00	0	- Target belum tercapai
Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman					
Jumlah unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	325	unit	4	0	- Target belum tercapai

Berdasarkan Table 2.13 Berdasarkan capaian kinerja Triwulan III, pelaksanaan sasaran kegiatan menunjukkan bahwa beberapa indikator telah mengalami kemajuan, terutama Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja yang mencapai realisasi 47,33% dari target triwulan sebesar 7,25%, didukung oleh realisasi belanja bahan, belanja sewa, belanja jasa profesi, dan belanja perjalanan dinas. Selain itu, indikator Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh juga telah mencapai realisasi 27,52% melalui pelaksanaan kegiatan pemantauan lapangan. Namun demikian, penyerapan anggaran secara keseluruhan belum optimal karena beberapa indikator, seperti Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman, Rumah Swadaya, Penanganan Permukiman Kumuh, dan Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman, masih berada pada tahap persiapan, verifikasi, koordinasi, atau menunggu penyelesaian proses administrasi dan pelaksanaan di daerah sehingga belum

[illegible]

klinik perumahan dan kawasan permukiman															
Total	538.388.000	134.404.140	0	0	0	0	0	0	0	5,22	14,34	29,50			

Berdasarkan tabel realisasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan III, total progres fisik telah mencapai 29,50% dengan realisasi keuangan sebesar Rp134.404.140 dari pagu anggaran Rp538.388.000. Capaian tersebut didukung oleh terlaksananya kegiatan Pemantauan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mencapai progres fisik 47,33% serta Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh yang mencapai 27,52% melalui pelaksanaan pemantauan lapangan, evaluasi, koordinasi, dan perjalanan dinas sesuai rencana kerja. Sementara itu, penyerapan anggaran belum optimal karena kegiatan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman masih berada pada tahap persiapan dan penjadwalan pelaksanaan sehingga belum terdapat realisasi keuangan. Selain itu, sebagian pembayaran kegiatan lainnya masih menunggu penyelesaian tahapan pekerjaan, kelengkapan administrasi, dan proses pertanggungjawaban sebelum dapat diajukan untuk pembayaran. Meskipun demikian, capaian fisik yang terus meningkat dari bulan Juli hingga September menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan, didukung oleh koordinasi yang baik antarunit kerja, pengendalian pelaksanaan secara berkala, serta komitmen untuk mempercepat penyelesaian seluruh kegiatan sehingga target fisik maupun penyerapan anggaran diharapkan dapat tercapai secara optimal pada akhir tahun anggaran.



Gambar 2.3 Grafik Realisasi Keuangan BP3KP Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

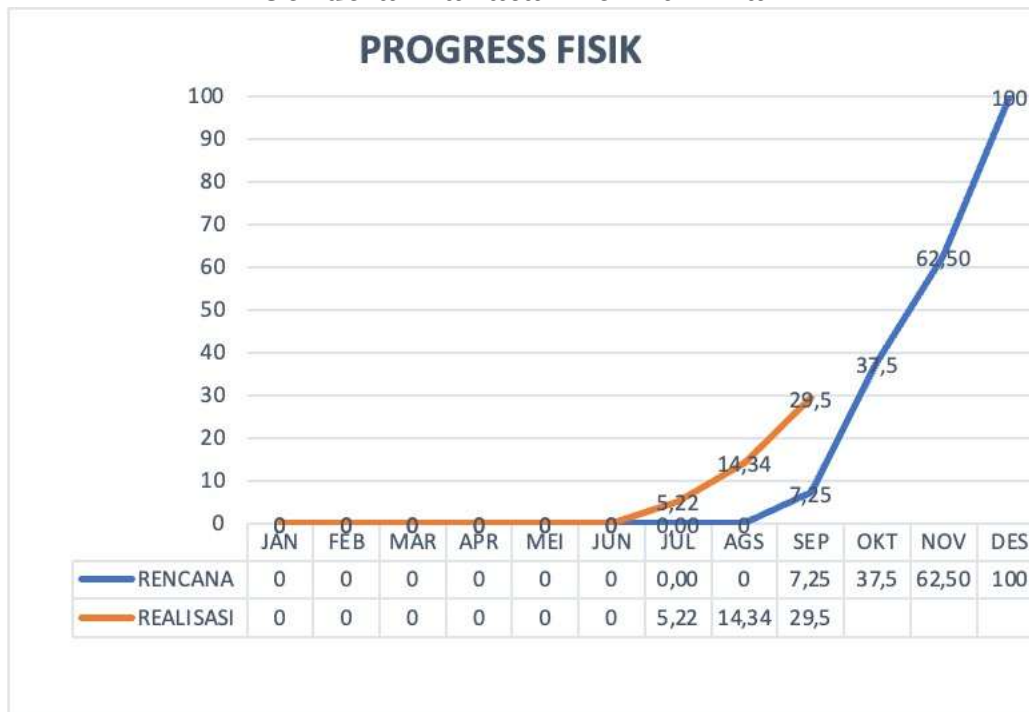


Berdasarkan grafik Progres Keuangan, hingga Triwulan III (September) realisasi keuangan telah mencapai 24,96%, sedikit melampaui target rencana sebesar 24,35%, sehingga terdapat deviasi positif sebesar 0,61%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran berjalan sesuai bahkan sedikit lebih cepat dari rencana, didukung oleh terealisasinya kegiatan pemantauan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas, dan penanganan kawasan kumuh. Meskipun demikian, penyerapan anggaran secara keseluruhan masih belum optimal karena terdapat beberapa kegiatan yang masih berada pada tahap persiapan pelaksanaan, proses pengadaan, koordinasi dengan pemerintah daerah, serta penyelesaian administrasi dan dokumen pertanggungjawaban yang menjadi syarat pencairan anggaran. Selain itu, kegiatan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman belum memasuki tahap pelaksanaan sehingga belum terdapat realisasi keuangan. Keberhasilan capaian hingga melampaui target rencana mencerminkan efektivitas pengendalian pelaksanaan



anggaran, koordinasi yang baik antarunit kerja, serta komitmen dalam mempercepat pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal, sehingga diharapkan realisasi fisik dan keuangan dapat terus meningkat dan mencapai target yang telah ditetapkan pada akhir tahun anggaran.

Gambar 2.4 Grafik Realisasi Fisik BP3KP Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman



Berdasarkan Gambar 2.4 Berdasarkan grafik Progres Fisik, hingga Triwulan III (September) realisasi fisik telah mencapai 29,50%, jauh melampaui target rencana sebesar 7,25%, sehingga terdapat deviasi positif sebesar 22,25%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berlangsung lebih cepat dari jadwal yang telah direncanakan, terutama pada kegiatan pemantauan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan rumah susun, peningkatan kualitas, dan penanganan kawasan kumuh yang telah berhasil dilaksanakan lebih awal. Meskipun demikian, penyerapan anggaran belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat beberapa komponen kegiatan yang berada pada tahap penyelesaian administrasi, verifikasi dokumen, dan proses pembayaran, serta terdapat kegiatan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan



kawasan permukiman yang belum memasuki tahap pelaksanaan sehingga belum menghasilkan realisasi keuangan. Keberhasilan capaian fisik yang melampaui target menunjukkan efektivitas perencanaan, koordinasi yang baik dengan para pemangku kepentingan, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan yang berjalan secara konsisten, sehingga memberikan keyakinan bahwa target fisik dan penyerapan anggaran hingga akhir tahun anggaran dapat dicapai sesuai rencana.

Tabel 2.15 Target Kinerja Triwulan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	TARGET PK AWAL	SATUAN	CAPAIAN TARGET TRIWULAN III		KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan					
Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	Rekomendasi Kebijakan	10,22	24,47	- Belanja Bahan - Belanja Sewa - Belanja Perjalanan Dinas
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	3	Laporan	20,55	11,62	- Belanja Perjalanan Dinas
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan					
Jumlah Rekomendasi Kebijakan penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1	Rekomendasi Kebijakan	14,22	17,54	- Belanja Perjalanan Dinas
Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	44	unit	17,75	16,86	Target belum tercapai

Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan					
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1	Rekomendasi Kebijakan	13,55	15,80	- Belanja perjalanan dinas biasa
Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan yang ditingkatkan kualitasnya	498	unit	8,80	4,00	- Target belum tercapai

Berdasarkan capaian kinerja Triwulan III, pelaksanaan sasaran kegiatan menunjukkan perkembangan yang cukup baik pada sebagian besar indikator. Indikator Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan berhasil mencapai realisasi 24,47% atau melampaui target triwulan sebesar 10,22%, sedangkan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan dan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan juga melampaui target masing-masing dengan realisasi 17,54% dan 15,80%. Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui belanja bahan, belanja sewa, serta belanja perjalanan dinas untuk koordinasi, pemantauan, dan penyusunan rekomendasi kebijakan. Namun demikian, penyerapan anggaran belum optimal karena beberapa indikator, seperti Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan, Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan, dan Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan yang Ditingkatkan Kualitasnya, masih belum mencapai target akibat pelaksanaan kegiatan yang berlangsung secara bertahap, proses verifikasi dan validasi data lapangan, koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, serta pembayaran yang baru dapat

dilakukan setelah tahapan pekerjaan dan dokumen pertanggungjawaban dinyatakan lengkap. Meskipun demikian, keberhasilan sebagian besar indikator kebijakan yang telah melampaui target menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai rencana, didukung oleh koordinasi yang baik, pengendalian pelaksanaan secara berkala, serta komitmen untuk mempercepat penyelesaian kegiatan sehingga target fisik dan penyerapan anggaran diharapkan dapat tercapai secara optimal pada akhir tahun anggaran.

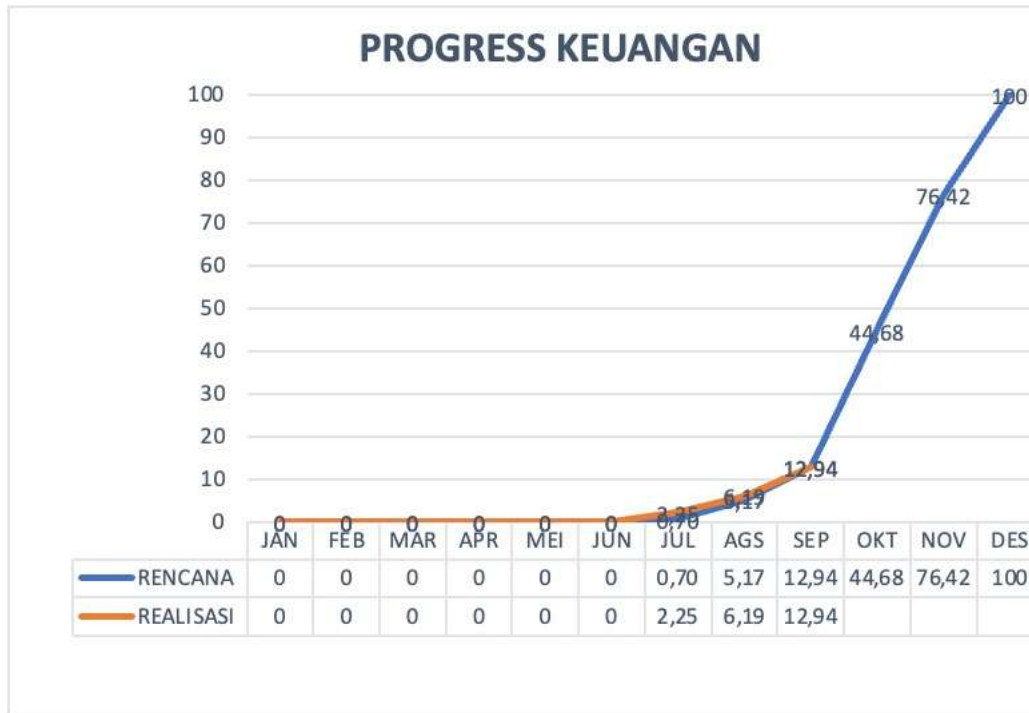
Tabel 2.16 Progres Fisik dan Keuangan Triwulan III BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025

No.	Nama Paket	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Progres Fisik Per Bulan											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Sinkronisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Pusat dan Daerah	380.618.000	74.114.914	0	0	0	0	0	0	6,41	15,69	24,47			
2	Verifikasi Bantuan Pembangunan Perumahan Perkotaan	171.235.000	21.468.020	0	0	0	0	0	0	12,23	14,66	17,54			
3	Verifikasi Bantuan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	312.470.000	33.754.860	0	0	0	0	0	0	0	6,75	15,8			
4	Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	276.900.000	18.327.060	0	0	0	0	0	0	7,87	7,87	11,62			
Total		1.141.223.000	147.664.854	0	0	0	0	0	0	5,88	11,19	17,94			

Berdasarkan tabel realisasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan III, total progres fisik telah mencapai 17,94% dengan realisasi keuangan sebesar Rp147.664.854 dari total pagu anggaran Rp1.141.223.000. Capaian tersebut didukung oleh terlaksananya kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Pusat dan Daerah yang mencapai progres fisik 24,47%, Verifikasi Bantuan Pembangunan Perumahan Perkotaan sebesar 17,54%, Verifikasi Bantuan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan sebesar 15,80%, serta Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan sebesar 11,62%. Realisasi tersebut didukung oleh pelaksanaan koordinasi, verifikasi lapangan, penyusunan rekomendasi kebijakan, serta perjalanan dinas sesuai jadwal kegiatan. Namun demikian, penyerapan anggaran masih belum optimal karena sebagian besar kegiatan masih dilaksanakan secara bertahap, proses verifikasi dan validasi data masih berlangsung, serta pembayaran baru dapat dilakukan setelah penyelesaian tahapan pekerjaan dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban. Keberhasilan capaian hingga Triwulan III menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tetap berjalan sesuai rencana dan mengalami peningkatan progres dari bulan ke bulan, didukung oleh koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, pengendalian pelaksanaan secara berkala, serta komitmen untuk mempercepat penyelesaian seluruh kegiatan sehingga target fisik maupun penyerapan anggaran dapat tercapai secara optimal pada akhir tahun anggaran.



Gambar 2.5 Grafik Realisasi Keuangan BP3KP Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan



Berdasarkan Gambar 2.5 diatas grafik Progres Keuangan, hingga Triwulan III (September) realisasi keuangan telah mencapai 12,94%, sesuai dengan target rencana sebesar 12,94%, sehingga pelaksanaan anggaran berada on track dengan rencana penarikan dana yang telah ditetapkan. Capaian ini didukung oleh terealisasinya kegiatan sinkronisasi dan koordinasi penyelenggaraan perumahan perkotaan, verifikasi bantuan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan, serta pelaksanaan pemantauan, pengendalian kebijakan, dan pelaporan yang dilaksanakan secara bertahap sesuai jadwal. Meskipun demikian, penyerapan anggaran secara keseluruhan masih belum optimal karena sebagian besar kegiatan masih berada pada tahap verifikasi lapangan, koordinasi dengan pemerintah daerah, penyusunan rekomendasi kebijakan, serta proses administrasi dan pertanggungjawaban yang harus diselesaikan sebelum pembayaran dapat dilakukan. Selain itu, terdapat beberapa komponen belanja yang dijadwalkan terealisasi pada triwulan berikutnya sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan. Keberhasilan capaian keuangan yang telah memenuhi target menunjukkan bahwa pengelolaan



anggaran berjalan secara efektif, didukung oleh perencanaan yang baik, pengendalian pelaksanaan secara berkala, serta koordinasi yang intensif dengan seluruh pihak terkait, sehingga memberikan keyakinan bahwa realisasi fisik maupun keuangan dapat terus ditingkatkan dan mencapai target pada akhir tahun anggaran.

Gambar 2.6 Grafik Realisasi Fisik BP3KP Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan



Berdasarkan Gambar 2.6 diatas Berdasarkan grafik Progres Fisik, hingga Triwulan III (September) realisasi fisik telah mencapai 17,94%, melampaui target rencana sebesar 7,25%, sehingga terdapat deviasi positif sebesar 10,69%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berlangsung lebih cepat dari jadwal yang telah direncanakan, terutama pada kegiatan sinkronisasi dan koordinasi penyelenggaraan perumahan perkotaan, verifikasi bantuan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan, serta kegiatan pemantauan, pengendalian kebijakan, dan pelaporan yang telah terlaksana sesuai tahapan. Meskipun demikian, penyerapan anggaran masih belum optimal karena sebagian kegiatan masih berada pada tahap lanjutan berupa verifikasi lapangan, penyelesaian administrasi, penyusunan laporan, dan proses



pertanggungjawaban keuangan yang menjadi dasar pencairan anggaran. Selain itu, beberapa komponen belanja dijadwalkan terealisasi pada triwulan berikutnya sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan. Keberhasilan capaian fisik yang melampaui target mencerminkan efektivitas perencanaan, koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, serta pengendalian pelaksanaan yang dilakukan secara berkala, sehingga pelaksanaan program tetap berjalan sesuai rencana dan diharapkan target fisik maupun penyerapan anggaran dapat tercapai secara optimal hingga akhir tahun anggaran.

Tabel 2.17 Target Kinerja Triwulan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	TARGET PK AWAL	SATUAN	CAPAIAN TARGET TRIWULAN III		KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan					
Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	Kegiatan	10,00	15,55	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	2	Laporan	10,00	0	Belum ada realisasi
Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni Melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perdesaan					
Jumlah Unit Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	186	unit	4,00	1,06	- Realisasi belum sesuai target - Provinsi Sulawesi Selatan: Jumlah Penerima Bantuan berdasarkan Surat Instruksi Verifikasi berkurang 6 unit menjadi 120 unit - Provinsi Sulawesi Tenggara: Jumlah Penerima Bantuan berdasarkan Surat Instruksi Verifikasi berkurang 5 unit menjadi 55 unit

					- Proses Penyusunan Proposal CPB
--	--	--	--	--	----------------------------------

Berdasarkan Tabel 2.17 diatas capaian kinerja Triwulan III, pelaksanaan sasaran kegiatan penyelenggaraan perumahan perdesaan menunjukkan hasil yang bervariasi. Indikator Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan berhasil melampaui target triwulan dengan realisasi 15,55% dari target 10,00%, yang didukung oleh pelaksanaan koordinasi dan perjalanan dinas dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program perumahan perdesaan. Namun demikian, indikator Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan belum menunjukkan realisasi karena kegiatan masih dalam tahap persiapan dan penjadwalan, sehingga belum terdapat realisasi keuangan. Sementara itu, indikator Jumlah Unit Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan baru mencapai 1,06% dari target 4,00% akibat adanya penyesuaian jumlah calon penerima bantuan berdasarkan Surat Instruksi Verifikasi, yaitu berkurangnya 6 unit di Provinsi Sulawesi Selatan dan 5 unit di Provinsi Sulawesi Tenggara, serta masih berlangsungnya proses penyusunan proposal Calon Penerima Bantuan (CPB). Kondisi tersebut menyebabkan penyerapan anggaran belum optimal karena sebagian besar kegiatan masih berada pada tahap verifikasi, validasi data, dan penyelesaian administrasi yang menjadi prasyarat pelaksanaan fisik dan pencairan anggaran. Meskipun demikian, keberhasilan pelaksanaan kegiatan koordinasi yang telah melampaui target menunjukkan bahwa proses perencanaan dan koordinasi lintas pemangku kepentingan berjalan dengan baik sebagai landasan percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya, sehingga target fisik dan penyerapan anggaran diharapkan dapat tercapai secara optimal hingga akhir tahun anggaran.

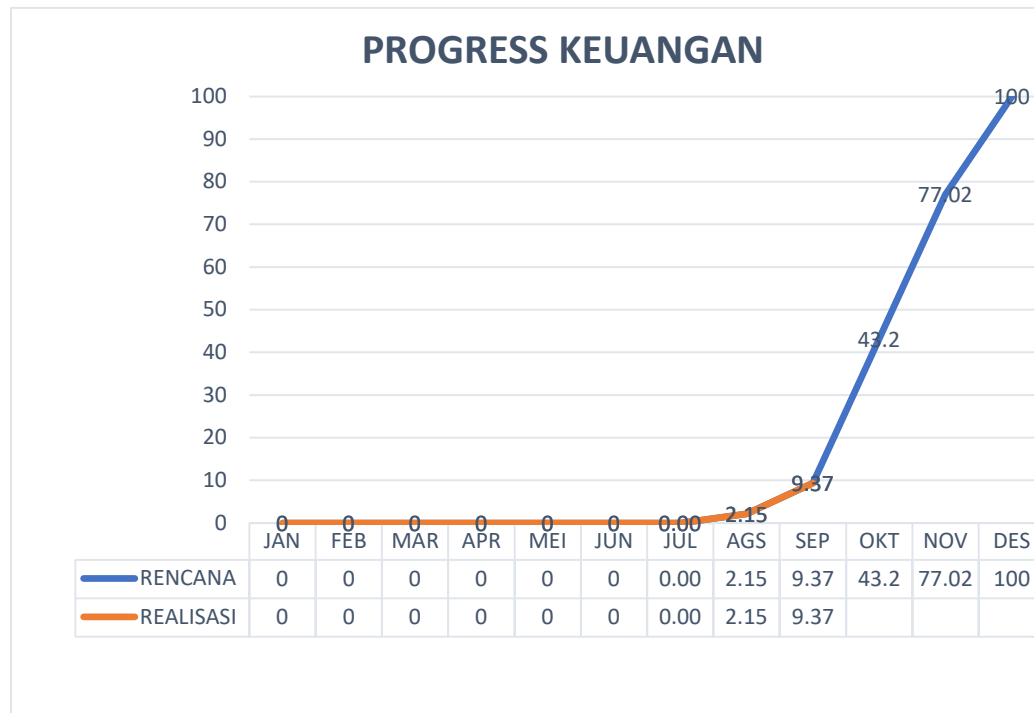
Tabel 2.18 Progres Fisik dan Keuangan Triwulan III BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025

No.	Nama Paket	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Progres Fisik Per Bulan											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Sinkronisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan Pusat dan Daerah	227.394.000	31.904.820	0	0	0	0	0	0	0	8,22	19,03			
2	Pemantauan dan Evaluasi BSPS	113.074.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Total		340.468.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,49	12,71			

Berdasarkan Tabel 2.18 diatas Realisasi penyerapan anggaran pada kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan Pusat dan Daerah hingga Triwulan III baru mencapai Rp31.904.820 atau masih relatif rendah dibandingkan pagu yang tersedia. Kondisi tersebut disebabkan sebagian besar rangkaian kegiatan, seperti pelaksanaan rapat koordinasi, sinkronisasi dengan pemerintah daerah, serta perjalanan dinas dan kegiatan lapangan, masih dijadwalkan pada semester II sehingga anggaran belum dapat direalisasikan secara optimal. Sementara itu, kegiatan Pemantauan dan Evaluasi BSPS belum menunjukkan realisasi anggaran karena pelaksanaan pemantauan dan evaluasi menyesuaikan progres pelaksanaan Program BPS di daerah serta jadwal monitoring yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, progres fisik telah mulai meningkat pada bulan Agustus dan September, yang menunjukkan bahwa tahapan persiapan, koordinasi, serta penyusunan rencana pelaksanaan telah berjalan sesuai jadwal. Dengan mulai terlaksananya kegiatan utama pada Triwulan III, diharapkan realisasi keuangan akan meningkat secara bertahap seiring pelaksanaan kegiatan lapangan, sehingga target fisik dan penyerapan anggaran hingga akhir tahun dapat tercapai sesuai rencana.



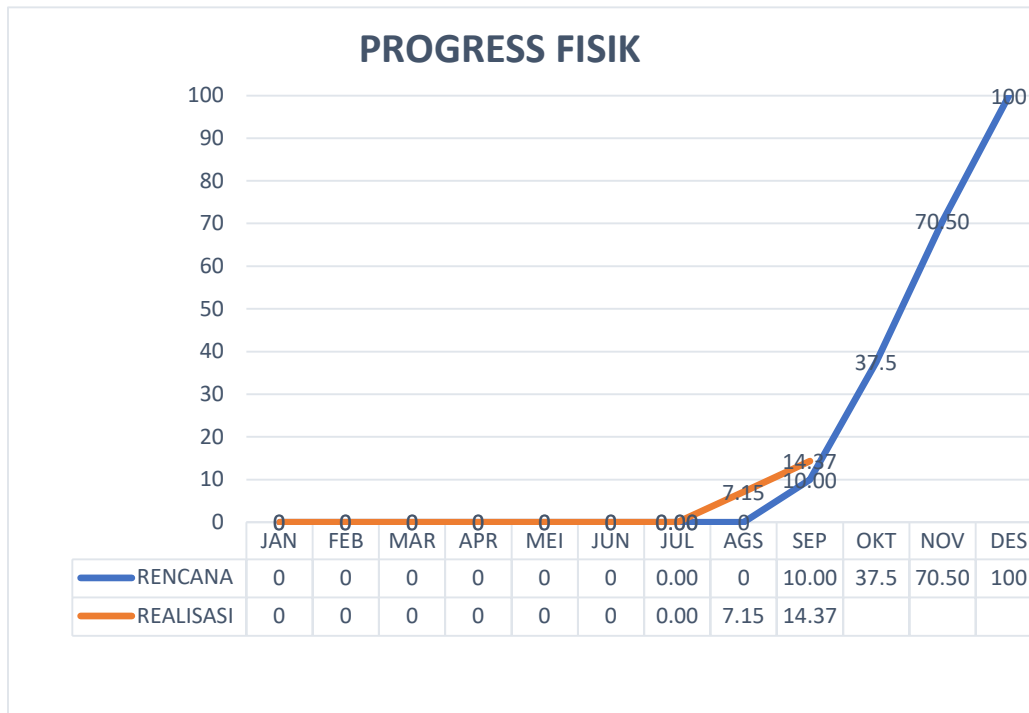
Gambar 2.7 Grafik Realisasi Keuangan BP3KP Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan



Berdasarkan Gambar 2.7 grafik Progress Keuangan, realisasi keuangan hingga Triwulan III telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Tidak terdapat penyerapan anggaran pada periode Januari–Juli karena kegiatan masih berada pada tahap persiapan administrasi, penyusunan jadwal, dan koordinasi pelaksanaan. Penyerapan anggaran mulai terealisasi pada bulan Agustus sebesar 2,15% dan meningkat menjadi 9,37% pada bulan September seiring dimulainya pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, realisasi keuangan diproyeksikan meningkat secara signifikan pada bulan Oktober (43,20%), November (77,02%), hingga mencapai 100% pada bulan Desember, sejalan dengan penyelesaian seluruh tahapan kegiatan dan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Pola penyerapan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah mengikuti jadwal yang direncanakan dan diharapkan target penyerapan anggaran pada akhir tahun dapat tercapai secara optimal.



Gambar 2.8 Grafik Realisasi Fisik BP3KP Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan



Berdasarkan Gambar 2.8 grafik Progress Fisik, pelaksanaan kegiatan mulai menunjukkan perkembangan pada Triwulan III. Hingga bulan Juli belum terdapat progres fisik karena kegiatan masih berada pada tahap persiapan administrasi, koordinasi, dan penjadwalan pelaksanaan. Pada bulan Agustus, realisasi fisik mencapai 7,15%, kemudian meningkat menjadi 14,37% pada bulan September, melampaui target rencana sebesar 10,00%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan lebih cepat dari jadwal yang direncanakan, didukung oleh terlaksananya kegiatan koordinasi awal, persiapan teknis, serta dimulainya kegiatan lapangan. Selanjutnya, progres fisik diproyeksikan terus meningkat hingga mencapai 37,50% pada Oktober, 70,50% pada November, dan 100% pada Desember, seiring dengan penyelesaian seluruh tahapan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan.

Tabel 2.19 Target Kinerja Triwulan DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	TARGET PK AWAL	SATUAN	CAPAIAN TARGET TRIWULAN III		KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel					
Jumlah Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas	1	Rekomendasi/ Laporan	25,05	21,84	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman					
Jumlah Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1	Rekomendasi/ Laporan	25,05	5,30	- Belanja Bahan - Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Berdasarkan Tabel 2.19 diatas capaian kinerja Triwulan III, pelaksanaan sasaran kegiatan pada aspek tata kelola menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun belum seluruh indikator mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator Jumlah Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas telah mencapai realisasi 21,84% dari target triwulan sebesar 25,05%, yang didukung oleh pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan perjalanan dinas dalam rangka penguatan implementasi keterbukaan informasi publik. Sementara itu, indikator Jumlah Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi baru mencapai realisasi 5,30% dari target 25,05%, yang didukung oleh realisasi belanja bahan dan belanja perjalanan dinas, namun pelaksanaan beberapa agenda utama seperti penyusunan rekomendasi, pendampingan penerapan manajemen risiko, dan penguatan pencegahan korupsi masih berlangsung secara bertahap. Kondisi tersebut menyebabkan

penyerapan anggaran belum optimal karena sebagian kegiatan masih berada pada tahap persiapan, koordinasi, penyusunan dokumen, serta menunggu penyelesaian administrasi dan jadwal pelaksanaan sebelum dapat dilakukan pembayaran. Meskipun demikian, capaian yang telah terealisasi menunjukkan bahwa proses implementasi program tetap berjalan sesuai tahapan yang direncanakan, didukung oleh koordinasi yang baik antarunit kerja, komitmen dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta pengendalian pelaksanaan secara berkala sehingga target fisik maupun penyerapan anggaran diharapkan dapat tercapai secara optimal hingga akhir tahun anggaran.

Tabel 2.20 Progres Fisik dan Keuangan Triwulan IV BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025

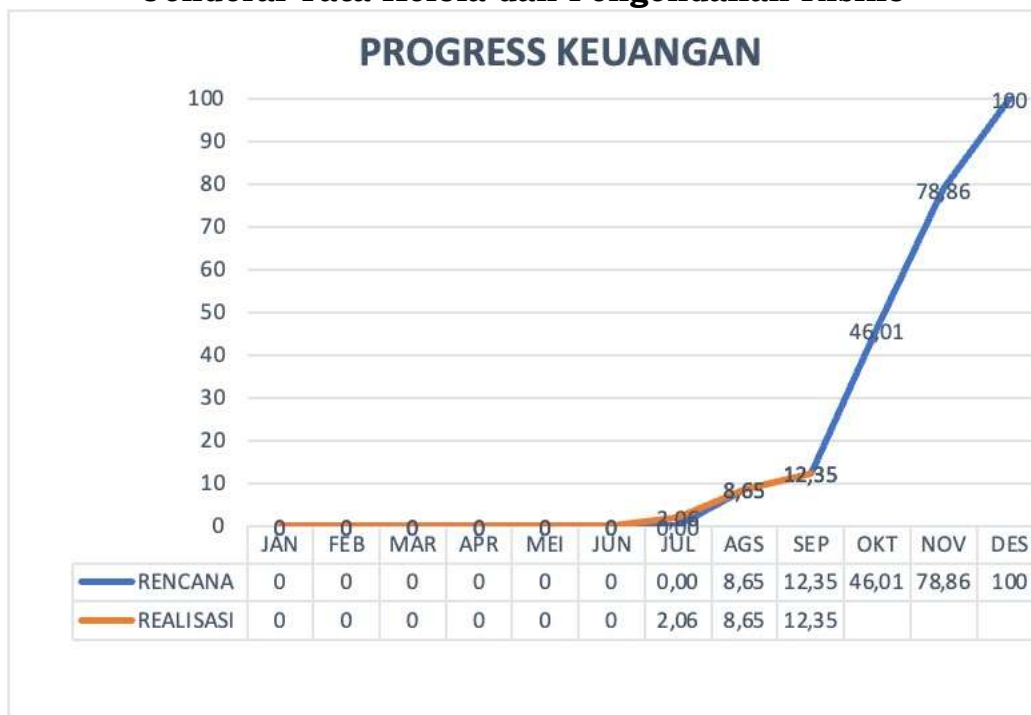
No.	Nama Paket	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Progres Fisik Per Bulan											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Penerapan Manajemen Risiko	129.223.000	28.228.196	0	0	0	0	0	0	9,84	25,31	26,84			
2	Pembangunan Zona Integritas Balai P3KP Sulawesi III	174.233.000	9.239.980	0	0	0	0	0	0	0	0	10.30			
Total		303.466.000	37.468.176	0	0	0	0	0	0	5.65	14.53	19.80			

Berdasarkan tabel 2.20 diatas realisasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan III, total progres fisik telah mencapai 19,80% dengan realisasi keuangan sebesar Rp37.468.176 dari total pagu anggaran Rp303.466.000. Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan Penerapan Manajemen Risiko yang

telah mencapai progres fisik 26,84% melalui kegiatan identifikasi dan pemetaan risiko, koordinasi, pendampingan, serta monitoring implementasi manajemen risiko. Sementara itu, kegiatan Pembangunan Zona Integritas Balai P3KP Sulawesi III telah mulai terealisasi dengan progres fisik 10,30%, yang meliputi persiapan pembangunan Zona Integritas, pengumpulan data dukung, koordinasi, dan penyusunan dokumen pemenuhan area perubahan. Namun demikian, penyerapan anggaran masih belum optimal karena sebagian besar tahapan kegiatan masih dalam proses pelaksanaan, pendampingan, dan penyelesaian administrasi, sehingga pembayaran baru dapat dilakukan setelah keluaran kegiatan dan dokumen pertanggungjawaban dinyatakan lengkap. Selain itu, beberapa agenda utama pembangunan Zona Integritas dijadwalkan terlaksana pada triwulan berikutnya sesuai rencana kerja. Meskipun demikian, peningkatan progres fisik dari bulan Juli hingga September menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan, didukung oleh komitmen organisasi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, penerapan manajemen risiko, serta pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), sehingga target fisik dan penyerapan anggaran diharapkan dapat tercapai secara optimal pada akhir tahun anggaran.



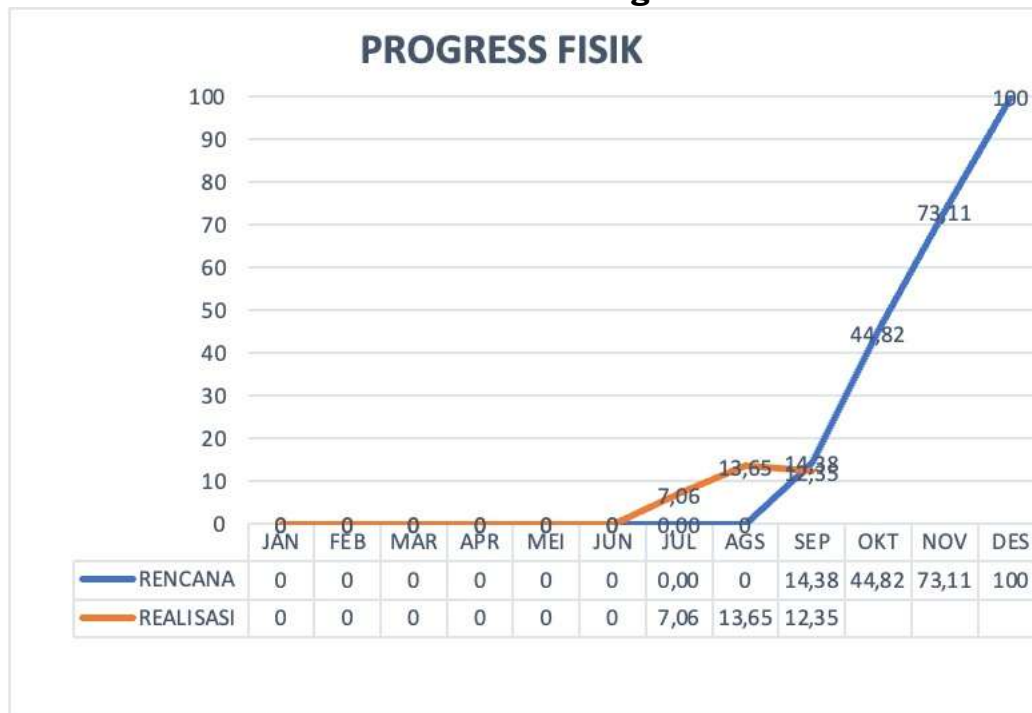
Gambar 2.9 Grafik Realisasi Keuangan BP3KP Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko



Berdasarkan Gambar 2.9 Berdasarkan grafik Progres Keuangan, hingga Triwulan III (September) realisasi keuangan telah mencapai 12,35%, sesuai dengan target rencana sebesar 12,35%, sehingga menunjukkan bahwa penyerapan anggaran berjalan sesuai dengan rencana penarikan dana yang telah ditetapkan. Capaian tersebut didukung oleh realisasi kegiatan Penerapan Manajemen Risiko dan Pembangunan Zona Integritas Balai P3KP Sulawesi III, khususnya untuk belanja bahan, koordinasi, pendampingan, dan perjalanan dinas yang telah dilaksanakan sesuai tahapan kegiatan. Meskipun demikian, penyerapan anggaran secara keseluruhan masih belum optimal karena sebagian besar kegiatan masih berada pada tahap penyusunan dokumen, pemenuhan eviden, pendampingan implementasi, serta proses verifikasi administrasi yang menjadi persyaratan sebelum pembayaran dapat dilakukan. Selain itu, beberapa agenda utama dalam pembangunan Zona Integritas dan penerapan manajemen risiko dijadwalkan terlaksana pada triwulan berikutnya sehingga realisasi anggarannya belum sepenuhnya tercatat pada periode ini. Keberhasilan capaian keuangan yang telah memenuhi target menunjukkan

bahwa pengelolaan anggaran dilaksanakan secara tertib dan sesuai rencana, didukung oleh koordinasi yang baik, pengendalian pelaksanaan secara berkala, serta komitmen dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, sehingga realisasi fisik dan keuangan diharapkan terus meningkat dan mencapai target pada akhir tahun anggaran.

Gambar 2.10 Grafik Realisasi Fisik BP3KP Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko



Berdasarkan Gambar 2.10 diatas erdasarkan grafik Progres Fisik, hingga Triwulan III (September) realisasi fisik telah mencapai 12,35%, sedikit di bawah target rencana sebesar 14,38%, sehingga terdapat deviasi sebesar 2,03%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan Penerapan Manajemen Risiko dan Pembangunan Zona Integritas Balai P3KP Sulawesi III telah berjalan sesuai tahapan, namun beberapa agenda utama masih berada dalam proses penyelesaian. Penyerapan anggaran belum optimal karena sebagian kegiatan masih difokuskan pada penyusunan dokumen, pemenuhan eviden enam area perubahan Zona Integritas, pelaksanaan pendampingan implementasi manajemen risiko, koordinasi lintas unit, serta proses verifikasi administrasi yang harus diselesaikan sebelum tahapan berikutnya dan



pembayaran dapat dilakukan. Meskipun realisasi fisik masih sedikit di bawah target, perkembangan pelaksanaan kegiatan dari bulan Juli hingga September menunjukkan tren yang positif dan didukung oleh komitmen pimpinan serta seluruh unit kerja dalam memperkuat tata kelola organisasi, penerapan manajemen risiko, dan pembangunan Zona Integritas. Dengan pengendalian pelaksanaan yang dilakukan secara berkala serta percepatan penyelesaian agenda yang masih berjalan, target fisik maupun penyerapan anggaran diyakini dapat tercapai secara optimal pada triwulan berikutnya hingga akhir tahun anggaran.

2.3 Permasalahan/ Faktor Keberhasilan

2.3.1 Permasalahan pelaksanaan kegiatan BP3KP Sulawesi III

Secara umum permasalahan pelaksanaan kegiatan selama Triwulan III yang dihadapi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III adalah sebagai berikut:

1. Timbulnya kendala dalam proses pembangunan rumah susun;
2. ketidaktepatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran;
3. Verifikasi data usulan kegiatan BSPS di delineasi wilayah perkotaan dan perdesaan mengalami hambatan;
4. Komitmen pimpinan dan pegawai dalam pembangunan ZI menurun atau tidak konsisten;
5. ketidaktertiban dalam pencatatan, pelaporan dan mengakibatkan kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan aset negara;
6. kesalahan dalam proses pembayaran, pencairan dana, pertanggungjawaban yang dapat menimbulkan kerugian negara dan temuan audit;
7. Terjadinya keterlambatan dalam proses penghunian dan pemanfaatan;
8. Pemantauan dan pengawasan kegiatan BSPS di delineasi wilayah pesisir yang berjalan kurang optimal;



9. Kegiatan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman di Balai yang belum optimal terlaksana;
10. Pemantauan dan pengawasan kegiatan BSPS di delineasi wilayah pesisir yang berjalan kurang optimal;
11. Pengawasan dan pengendalian kegiatan BSPS di delineasi wilayah perkotaan dan perdesaan berjalan kurang optimal;

2.3.2 Permasalahan pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan

Secara umum permasalahan pelaksanaan kegiatan selama Triwulan III yang dihadapi oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

1. Masih dalam proses pengerjaan struktur bawah karena kedalaman pondasi belum fix , sehingga tidak ada pekerjaan yang termasuk ke dalam progres dan termin tidak bisa dicairkan oleh PJK.
2. Addendum 3 dilaksanakan dan progres pembangunan 32% dan sudah dilakukan pembayaran termin 25% dengan kendala harus menunggu PJK harus mencapai progres sesuai target kurva S.
3. Progres pekerjaan belum mencapai target untuk melakukan pembayaran termin.
4. Belum ada progres fisik yang berjalan baik itu BSPS, Sanitasi, PSU, dan Kumuh.

2.3.3 Permasalahan pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara

Secara umum permasalahan pelaksanaan kegiatan selama Triwulan IV adalah sebagai berikut:

1. Pedoman teknis Peningkatan Kawasan Kumuh dan Peningkatan Sanitasi Rumah terbit di bulan Agustus, setelah proses verifikasi Teknis dan administrasi selesai.



2. Anggaran pekerjaan fisik baru ada setelah revisi DIPA di bulan Agustus.
3. Pelaksanaan kontrak penyedia jasa belum dapat dilakukan di triwulan ini karena proses pemilihan penyedia jasa oleh Pokja
4. Pemilihan masih berlangsung dan akan rampung pada minggu ketiga Oktober.



BAB III

PENUTUP

3.1 Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya adapun upaya-upaya untuk meningkatkan capaian kinerja berdasarkan hasil pemetaan permasalahan yaitu:

3.1.1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III

Adapun upaya-upaya untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode selanjutnya berdasarkan hasil pemetaan permasalahan/potensi capaian yaitu:

1. Melakukan pendampingan intensif dengan melibatkan tenaga ahli atau fasilitator teknis untuk mendampingi pelaksanaan pembangunan di lokasi agar berjalan sesuai jadwal dan rencana
2. Membuat laporan penyerapan perkegiatan
3. Penandatanganan pakta integritas dan setiap bulan dilakukan rapat bersama dengan pokja Zona Integritas
4. Menyelenggarakan bimbingan teknis verifikasi bagi SDM pelaksana verifikasi, dengan fokus pada peningkatan pemahaman terhadap prosedur, penggunaan sistem, dan standar kelayakan usulan
5. Melakukan verifikasi berlapis pada setiap transaksi keuangan
6. Menjadwalkan FGD/Sosialisasi dengan penerima bantuan/user terkait progress penghunian dan pengelolaan Rumah Susun
7. Pendampingan dan sosialisasi RLH oleh TFL kepada Penerima Bantuan didampingi oleh Pemda setempat, menggerakkan KPB dan Tokoh-Tokoh masyarakat aktif secara penuh mendampingi Penerima Bantuan.
8. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi penerapan UU No. 08 Tahun 1999 dan pedoman teknis terkait kepada SDM Program Benar PKP



9. Menjadwalkan FGD/Sosialisasi dengan penerima bantuan/user terkait progress penghunian dan pengelolaan Rumah Susun
10. Melakukan sosialisasi Surat Edaran Nomor 04/SE/Dt/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya
11. Kabalai aktif menyurat kepada Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan dan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan terkait pengajuan permohonan perubahan status CPB di DTSEN dan agar segera dilakukan perubahan data dan segera terbit Surat Instruksi Verifikasi oleh Direktur BSPS.
12. Memberikan layanan konsultasi untuk membantu penerima bantuan dalam menyusun RAB dan memperkirakan keswadayaan melalui kegiatan Klinik PKP

3.1.2 Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, adapun upaya-upaya untuk meningkatkan capaian kinerja pada triwulan selanjutnya berdasarkan hasil pemetaan permasalahan/potensi capaian yaitu:

1. Berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk mengupdate dokumen RC berdasarkan Pedoman teknis yang baru. Status dokumen RC telah selesai diupdate sesuai format dalam pedoman teknis Peningkatan Kawasan Kumuh dan Peningkatan Sanitasi Rumah.
2. Setelah adanya anggaran pekerjaan fisik dalam revisi DIPA di akhir bulan Agustus dan terbitnya SK alokasi Penerima Bantuan BPS, maka dilakukan percepatan pelaksanaan verifikasi teknis dan penyusunan proposal bagi calon penerima bantuan yang lulus verifikasi sambil menunggu terbitnya SK Penetapan Penerima Bantuan.



3. Pada tanggal 25 Agustus telah dilaksanakan kontrak konsultan Perencana untuk Penyusunan DED Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah, dan Review DED Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh. Kemudian pada tanggal 1 september 2025 disampaikan permohonan pemilihan penyedia jasa Kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
4. Pelaksanaan kontrak penyedia jasa akan dilakukan pada triwulan berikutnya segera setelah proses pemilihan penyedia jasa oleh Pokja Pemilihan selesai.

3.1.3 Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, adapun upaya-upaya untuk meningkatkan capaian kinerja berdasarkan hasil pemetaan permasalahan yaitu:

1. Berkoordinasi dengan Pemda Kabupaten Buton untuk mengupdate dokumen RC berdasarkan Pedoman teknis yang baru. Status dokumen RC telah selesai diupdate sesuai format dalam pedoman teknis Peningkatan Kawasan Kumuh dan Peningkatan Sanitasi Rumah.
2. Setelah adanya anggaran pekerjaan fisik dalam revisi DIPA di akhir bulan Agustus dan terbitnya SK alokasi Penerima Bantuan BPS, maka dilakukan percepatan pelaksanaan verifikasi teknis dan penyusunan proposal bagi calon penerima bantuan yang lulus verifikasi sambil menunggu terbitnya SK Penetapan Penerima Bantuan. Pada tanggal 25 Agustus telah dilaksanakan kontrak konsultan Perencana untuk Penyusunan DED Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah, dan Review DED Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh. Kemudian pada tanggal 1 september 2025 disampaikan permohonan pemilihan penyedia jasa Kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa.



3. Pelaksanaan kontrak penyedia jasa akan dilakukan pada triwulan berikutnya segera setelah proses pemilihan penyedia jasa oleh Pokja Pemilihan selesai.

3.2 Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya

Adapun bukti tindak lanjut atas permasalahan yang telah dipetakan pada triwulan sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya

TRIWULAN III			
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut
1.	Timbulnya kendala dalam proses pembangunan rumah susun	Melakukan pendampingan intensif dengan melibatkan tenaga ahli atau fasilitator teknis untuk mendampingi pelaksanaan pembangunan di lokasi agar berjalan sesuai jadwal dan rencana	Laporan hasil pendampingan terkait progres pembangunan rumah susun secara berkala
2.	ketidaktepatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran	Membuat laporan penyerapan perkegiatan	Dokumen prognosis
3.	Verifikasi data usulan kegiatan BSPS di delineasi wilayah perkotaan dan perdesaan mengalami hambatan	Menyelenggarakan bimbingan teknis verifikasi bagi SDM pelaksana verifikasi, dengan fokus pada peningkatan pemahaman terhadap prosedur, penggunaan sistem, dan standar kelayakan usulan	Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Verifikasi BPS
4.	Komitmen pimpinan dan pegawai dalam pembangunan ZI menurun atau tidak konsisten	Penandatanganan pakta integritas dan setiap bulan dilakukan rapat bersama dengan pokja Zona Integritas	Dokumen Bukti dukung Lembar Kerja Evaluasi
5.	ketidaktertiban dalam pencatatan, pelaporan dan mengakibatkan kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan aset negara	Menyusun SOP BMN dan melaksanakan inventarisasi dan rekonsiliasi data BMN	Dokumen SOP BMN dan laporan BMN



LAMPIRAN



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

NOTULEN RAPAT

- Judul Rapat : Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran, Progres BAST Aset BMN, dan Tata Kelola Kepegawaian dan Perkantoran Pegawai Satker PKP Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2025
- Hari/Tanggal : Senin, 07 Juli 2025
- Waktu : 09:00 WITA s/d Selesai
- Lokasi : Ruang Kepala Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara
- Tujuan Rapat : Untuk menyamakan persepsi, menyelaraskan langkah, dan meningkatkan sinergi dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Satket PKP Prov. Sultra
- Peserta : Rapat ini dihadiri oleh:
1. Kepala Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra
 2. PPK Rumah Swadaya, PSU dan Kawasan Permukiman Satker PKP Prov. Sultra
 3. Pejabat Penandatanganan SPM Satker PKP Prov. Sultra
 4. Bendahara Keuangan Satker PKP Prov. Sultra
 5. Kaur Teknik PPK Perencanaan dan Pengendalian
 6. Kaur Administrasi PPK Perencanaan dan Pengendalian
 7. Staff Satker PKP Prov. Sultra
- Agenda Rapat : 1. Pembukaan Rapat dan Arahan Kepala Satker PKP Prov. Sultra
2. Diskusi Penyusunan RPD
3. Penyampaian Progres BAST Aset BMN
4. Kedisiplinan Pegawai.
- Pimpinan Rapat : Muh. Irsan basalamah, S.T.,M.T. selaku Kepala Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara
- Notulis : Laode Sirafin Sarini, S.T.

A. Penyampaian Sambutan dan Arahan Kepala Satuan Kerja

Penyampaian arahan Kepala Satuan Kerjabahwa hari ini kita akan membahas terkait pelaksanaan anggaran, termasuk juga tata kelola diinternal kita yaitu kepegawaian dan perkantoran. Sambil diskusi, masukan dan saran sangat diharapkan untuk kebaikan bersama. Beberapa poin yang akan dibahas:

1. RPD. Surat terkait RPD sudah saya japri ke grup inti

2. Kedepannya kita akan mengadakan rapat-rapat mingguan. Untuk minggu ini tidak dilaksanakan dulu karena saya ada PJJ
3. Aset BMN
4. Mekanisme perjalanan dinas. Misal jika ada undangan dari pusat kegiatan hari Kamis, maka hari Rabu kita sudah harus berangkat, sehingga mereka tidak kesal dengan kita
5. Mengenai penggunaan anggaran insidentil
6. Mekanisme penggunaan anggaran kita, misal BBM mungkin bisa menggunakan voucher
7. Pelaporan perjalanan dinas kita evaluasi
8. Pengelolaan kepegawaian dan dan perkantoran kita. Saya percayakan kepada Ibu Indah (Kaur Administrasi PPK RanDal) terkait Apel Pagi, tapi tetap dalam pengendalian saya

B. Ringkasan Hasil Diskusi

1. Total Anggaran Sebelum masuk fisik Rp. 874.509.000;
2. Materai masuk di belanja keperluan perkantoran. Materi ini untuk keperluan semua PPK;
3. Sekarang sewa kendaraan insidentil dikenakan pajak PPN dan PPh. Biaya dibawah 3 juta hanya kena PPh, sedangkan diatas 3 Juta dikenakan PPN dan PPh;
4. Perjalanan dinas kedepan memakai sewa kendaraan insidentil. Tapi Pertanggungjawabannya dipisah dengan laporan perjalanan dinas;
5. Honor staf pengelola sesuai SBM hanya diterima oleh PNS saja, PPPK tidak termasuk. Sedangkan unit pengolah UAKPA dan UAKPB bisa ASN (PNS dan PPPK) bisa mendapatkan honor;
6. Honor narasumber kegiatan bisa dibayarkan di anggaran dirjen KP;
7. BBM kendaraan jika memungkinkan menggunakan voucher;
8. Sewa kendaraan harus benar-benar menggunakan pihak rental resmi, bukan kendaraan pribadi pegawai yang disewakan;
9. Biaya sewa kendaraan dalam kwitansi sudah termasuk pajak. Pajaknya dipotong langsung;
10. Uraian tujuan penggunaan sewa kendaraan sesuai dengan tujuan perjalanan dinas;
11. Kebutuhan lain yang perlu dimasukkan dalam anggaran : Langganan zoom meeting, MS Teams, dan Google Drive. Keperluan lainnya hardisk, buku note versi satker, dan kalender;
12. Kalau petugas keamanan kita sudah terima SK PPPK, hanya akan tersisa 1 orang, mungkin bisa pengadaan outsourcing Satpam;
13. ATK distok perbulan. Belanja awal dulu, kemudian dilihat skemanya;
14. Baiknya yang memegang lemari persediaan petugas persediaan. Lemari persediaan yang saat ini ada dalam ruangan bendahara dikeluarkan;
15. Berhubung serah terima aset BMN akan berproses 2 kali, butuh dukungan perjalanan dinas ke daerah;

16. Kedepan kelengkapan dokumen serah terima asset dikirim dulu kedaerah agar mereka pelajari lebih dulu, sebelum kita bertemu dengan mereka;
17. Update status pegawai Pak Marhadianto sekarang sudah Kembali di kita;
18. Mulai minggu depan kita apel pagi. Absen pukul 07.30, apel jam 8 pagi. Ibu indah bantu terkait kedisiplinan pegawai. Arief dan Faiz bantu di lantai 3;
19. Petugas Emon Kembali ke Vince.

Notulis



Laode Sirafin sarini, S.T.

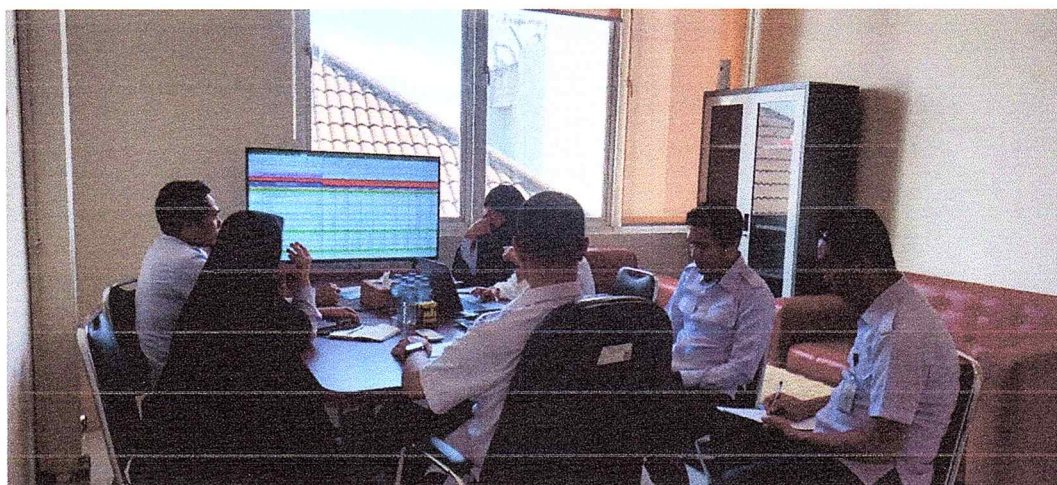


KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

DOKUMENTASI

RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN ANGGARAN, PROGRES BAST ASET BMN, DAN TATA KELOLA KEPEGAWAIAN DAN PERKANTORAN PEGAWAI SATKER PKP PROVINSI SULAWESI TENGGRA TA 2025





**KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN**

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

SURAT TUGAS

Nomor : 116.8/SPT/Rb14.5/2025

Perkotaan

Dalam rangka Serah Terima Aset Rumah Susun Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2018, dengan ini kami menugaskan pejabat/staf sebagaimana tercantum dibawah ini untuk melaksanakan tugas/perjalanan dinas dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

No	Pelaksana SPD	Unit Kerja	Periode Perjalanan Dinas	Tujuan	Transportasi	Pembebanan Anggaran
1	<u>MUH. IRSAN BASALAMAH, S.T.,M.T.</u> NIP. 19870612 201001 1 013 Penata Tingkat I, Gol. III/d Kepala Satuan Kerja	Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra	09 Juli 2025	Kab. Bombana	Transportasi Darat	DIPA Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra
2	<u>MARDIANA MUCHTAR, S.T.</u> NIP. 197512182014082001 Penata, III/c Penata Kelola Perumahan Ahli Muda / PPSPM					
	<u>HAMKA THAHIR, S.Ars.</u> NIP. 198201012014081004 Penata Muda, III/a Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama / Kaur Teknik PPK RanDal					
	<u>LAODE SIRAFIN SARINI, S.T.</u> NIP. 199107252024211003 Gol. IX Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama					

Kepada pegawai tersebut di atas agar melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan rincian Surat Tugas dan menyampaikan laporan pelaksanaan perjalanan dinas kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan perjalanan dinas.

Demikian Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kendari, 08 Juli 2025

Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara


Muh. Irsan Basalamah, S.T.,M.T.
NIP. 19870612 201001 1 013

Tembusan :

1. Kepada yang bersangkutan;
2. Arsip.



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Pelaksana Perjalanan Dinas : - Muh. Irsan Basalamah, S.T.
- Mardiana Muchtasr, S.T.
- Hamka Thahir, S.T.
- Laode Sirafin Sarini, S.T.

Tanggal Perjalanan Dinas : 09 Juli 2025

Tujuan Perjalanan Dinas : Kabupaten Bombana

Keperluan Perjalanan Dinas : Serah Terima Aset Pemkab Bombana TA 2018 di Kabupaten Bombana

I. Pendahuluan

Menindaklanjuti Surat Tugas Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 08 Juli 2024 dalam rangka Serah Terima Aset Rumah Susun Pemkab Bombana TA 2018, maka dilaksanakan perjalanan dinas ke Kabupaten Bombana selama satu hari.

II. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan koordinasi dalam rangka Serah Terima Aset Rumah Susun Pemkab Bombana TA 2018 dilaksanakan oleh Tim Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 09 Juli 2025 bertempat di Kabupaten Bombana.

III. Jadwal Kegiatan

Hari / tanggal	Waktu	Keterangan
Rabu, 09 Juli 2025	Pukul 07:00	Perjalanan dari Kota Kendari ke Kabupaten Bombana.
	Pukul 11:00	Koordinasi di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bombana terkait persiapan Serah Terima Aset Rumah Susun bersama Bapak Bupati Kab. Bombana.
	Pukul 13:00	Koordinasi dan penandatanganan BAST dan Naskah Hibah Rumah Susun Pemkab Bombana bersama Bupati Kab. Bombana.
	Pukul 15:00	Perjalanan dari Kabupaten Bombana ke Kota Kendari.

IV. Rangkaian Kegiatan

Hasil koordinasi dalam rangka Serah Terima Aset Rumah Susun Pemkab Bombana TA 2018 di Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut:

a. Koordinasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bombana:

1. Penandatanganan BAST dan Naskah Hibah Rusun Pemkab Bombana akan dilaksanakan di hari yang sama 09 Juli 2025 bertempat di Rumah Jabatan Bupati Bombana.
2. Informasi lainnya terkait program 3 Juta Rumah:
 - Pemerintah Kabupaten Bombana telah membuat Peraturan Bupati terkait Pembebasan retribusi dan Percepatan Penerbitan PBG dan BPHTB bagi MBR, serta telah mempublikasikannya melalui media billboard dan banner.
 - Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bombana akan melaksanakan program Peningkatan Kualitas RTLH sebanyak 48 unit dengan anggaran 25Juta/unit, dan Pembangunan baru sebanyak 3 unit dengan anggaran 72Juta perunit
 - Pada tahun 2025 ini juga Pemda Kabupaten Bombana mendapat alokasi bantuan pembangunan rumah dari Pemprov Sulawesi Tenggara sebanyak 14 unit.
 - Salah satu potensi CSR yang ada di Kabupaten Bombana adalah PT. Jonlin Batu Mandiri yang merupakan perusahaan yang bergerak di Bidang Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula.

b. Koordinasi dengan Bupati Bombana:

1. Serah Terima Aset Rumah Susun Pemkab Bombana TA 2018 dilaksanakan secara seremonial oleh Kepala Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai perwakilan pemerintah pusat kepada Bupati Bombana.

V. Permasalahan

Tidak ditemukan permasalahan. Aset Rumah Susun Pemkab Bombana telah dilakukan penandatanganan Naskah Hibah dan BAST oleh Bupati Bombana.

VI. Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut akan dilakukan koordinasi ke Pusat terkait dokumen Berita Acara Serah Terima dan Naskah Hibah yang telah ditandatangani oleh Bupati.

VII. Penutup

Demikian laporan kegiatan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PELKSANA PERJALANAN DINAS

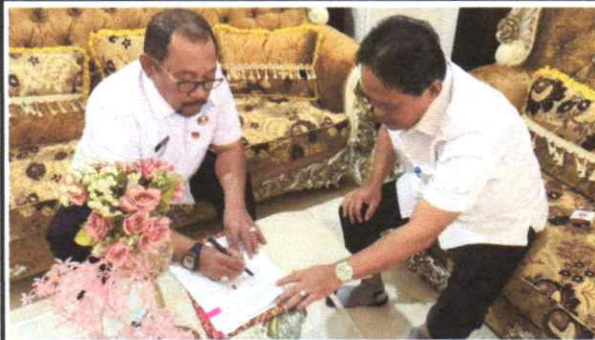
No.	Nama/NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	<u>Muh. Irsan Basalamah, S.T., M.T.</u> NIP. 19870612 2010011013	Kepala Satuan Kerja	
2.	<u>Mardiana Muchtar, S.T</u> NIP. 19751218 201408 2 001	PP-SPM/ Penata Kelola Perumahan Ahli Muda	
3.	<u>Hamka Thahir, S.T.</u> NIP. 198201012014081004	Kaur Teknik PPK RanDal / Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	
4.	<u>Laode Sirafin Sarini, S.T.</u> NIP. 199107252024211003	Staf/ Penata kelola Perumahan Ahli Pertama	



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

DOKUMENTASI SERAH TERIMA ASET RUMAH SUSUN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2018



Rabu, 09 Juli 2025

Penandatanganan Naskah Hibah dan BA Serah Terima Aset Rusun Pemkab Bombana oleh Bupati Kabupaten Bombana



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

SURAT TUGAS

Nomor : 116.9/SPT/Rb14.5/2025

Padesaan

Dalam rangka Koordinasi Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh ke Balai P3KP Sulawesi III di Makassar, dan menghadiri Undangan Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor UM0102-Sj/779 Tanggal 4 Juli perihal Penelaahan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK RI Semester I Tahun 2025, dengan ini kami menugaskan pejabat sebagaimana tercantum dibawah ini untuk melaksanakan tugas dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

No	Pelaksana SPD	Unit Kerja	Periode Tugas	Tujuan	Transportasi	Pembebanan Anggaran
1.	MUH. IRSAN BASALAMAH, S.T.,M.T. 19870612 201001 1 013 Penata Tingkat I, Gol. III/d Kepala Satuan Kerja	Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra	10 – 12 Juli 2025	Makassar dan Jakarta	Udara dan Darat	DIPA Satker PKP Prov. Sultra

Demikian Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kendari, 08 Juli 2025

Kepala Satuan Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sulawesi Tenggara



Muh. Irsan Basalamah, S.T.,M.T.
NIP. 19870612 201001 1 013

Tembusan :

1. Kepada yang bersangkutan;
2. Arsip.

LAPORAN KEGIATAN/PERJALANAN DINAS

SPPD Nomor : 116.9/SPT/Rb14.15/2025

Tanggal : 08 Juli 2025

Nama : Muh. Irsan Basalamah, S.T., M.T.

Lama Perjalanan : 2 (dua) hari

Tujuan : Makassar dan Jakarta

Dengan selesainya perjalanan dinas yang kami laksanakan, dengan ini kami laporkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Hari & Tanggal		Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan
Kamis, 10 Juli 2025		• Berangkat dari Kota Kendari Menuju Makassar; • Koordinasi ke Kantor Balai P3KP Sulawesi Tenggara terkait penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Sulawesi Tenggara Tahun 2025; • Lanjut perjalanan menuju Jakarta; • Tiba di Jakarta, check in hotel lalu istirahat.
Jumat, 11 Juli 2025		• Mengikuti Desk Penelaahan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK RI Semester I Tahun 2025 di Ruang Serbaguna Lantai 17, Gedung Utama Kementerian PU.
Sabtu, 12 Juli 2025		• Perjalanan pulang ke Kota Kendari
Pengikut :		
No	Nama Lengkap	NIP/NRP (Jika ada)

Kendari, 15 Juli 2025
Yang Melaksanakan Tugas

Muh. Irsan Basalamah, S.T., M.T.
NIP. 19870612 2010011013



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

DOKUMENTASI PENELAAHAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN (TLRHP) BPK RI
SEMESTER I TAHUN 2025



Jumat, 11 Juli 2025

Desk Penelaahan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK RI Semester I Tahun 2025



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SEKRETARIAT JENDERAL

Wisma Mandiri 2, Jl. Kebon Sirih No.83, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta 10340

Nomor : UM0102-Sj/779
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 Lembar
Hal : Undangan Penelaahan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)
BPK RI Semester I Tahun 2025

Jakarta, 4 Juli 2025

Yth. **Daftar Undangan Terlampir**
di Tempat

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Nomor UM 0102-Sj/823 tanggal 3 Juli 2025 hal Undangan Penelaahan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK RI Semester I Tahun 2025 serta dalam rangka rencana pengalihan kewajiban TLRHP Tahun Pemeriksaan 2005 s.d 2025 pada Eks Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR (BA033.07) kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (BA146), Kementerian Pekerjaan Umum akan melaksanakan Penelaahan TLRHP BPK RI Semester I Tahun 2025, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Senin – Jumat, 7 – 11 Juli 2025
Waktu : 09.00 s.d 16.30 WIB
Tempat : Ruang Serbaguna Lantai 17, Gedung Utama Kementerian PU
Agenda : Terlampir

Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon kehadiran Bapak/Ibu pada acara dimaksud atau menugaskan pejabat/pegawai penanggungjawab atas TLRHP BPK RI untuk hadir selama sesi pembahasan dengan Tim BPK RI. Untuk informasi lebih lanjut terkait acara dimaksud dapat menghubungi narahubung Sdri Mala Hayati (081385199278).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal Kementerian
Perumahan dan Kawasan Permukiman



Didyk Choiroel, S.Sos., M.Si
NIP 197104161992011001

Lampiran I
Surat Sekretaris Jenderal
Nomor : UM0102-Sj/779
Tanggal : 4 Juli 2025

Daftar Undangan

1. Eks Kepala Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan;
2. Eks Kepala Satker Direktorat Rumah Susun;
3. Eks Kepala Satker Direktorat Rumah Khusus;
4. Eks Kepala Satker Direktorat Rumah Swadaya;
5. Eks Kepala Satker Direktorat Rumah Umum dan Komersial;
6. Eks Kepala Satker Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan;
7. Eks Kepala Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I;
8. Eks Kepala Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I;
9. Eks Kepala Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II;
10. Eks Kepala Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III;
11. Eks Kepala Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV;
12. Eks Kepala Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II;
13. Eks Kepala Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III;
14. Eks Kepala Satker Penyediaan Perumahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara;
15. Eks Kepala Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Aceh;
16. Eks Kepala Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara;
17. Eks Kepala Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat;
18. Eks Kepala Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Selatan;
19. Eks Kepala Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Riau;
20. Eks Kepala Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau;
21. Eks Kepala Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Bali;
22. Eks Kepala Satker Penyediaan Perumahan Provinsi DKI Jakarta;
23. Eks Kepala Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Barat;
24. Eks Kepala Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah;
25. Eks Kepala Satker Penyediaan Perumahan Provinsi D.I Yogyakarta;
26. Eks Kepala Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur;
27. Eks Kepala Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat;
28. Eks Kepala Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Selatan;
29. Eks Kepala Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Timur;
30. Eks Kepala Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Utara;
31. Eks Kepala Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Selatan;
32. Eks Kepala Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah;
33. Eks Kepala Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Utara;
34. Eks Kepala Satker Penyediaan Perumahan Provinsi NTT;
35. Eks Kepala Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua;
36. Eks Kepala Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat.

Lampiran II
 Surat Sekretaris Jenderal
 Nomor : UM0102-Sj/779
 Tanggal : 4 Juli 2025

JADWAL PELAKSANAAN
PENELAAHAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN (TLRHP)
NEGARA BPK RI SEMESTER I TAHUN 2025
 Senin – Jumat, 7 s.d 11 Juli 2025

NO	HARI/ TANGGAL	WAKTU	AGENDA	DESK
1	Senin/ 7 Juli 2025	09.00 - 12.00	Pembahasan TLRHP pada Eks Ditjen Perumahan	7 dan 8
		12.00 - 13.30	ISHOMA	
		13.30 - 14.30	Pembukaan 1. Sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum 2. Sambutan Dirjen PKN IV BPK RI 3. Sambutan Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum	
		14.30 - 16.30	Lanjutan Pembahasan TLRHP pada Eks Ditjen Perumahan	7 dan 8
2	Selasa/ 8 Juli 2025	09.00 - 12.00	Lanjutan Pembahasan TLRHP pada Eks Ditjen Perumahan	7 dan 8
		12.00 - 13.30	ISHOMA	
		13.30 - 16.30	Lanjutan Pembahasan TLRHP pada Eks Ditjen Perumahan	7 dan 8
3	Rabu/ 9 Juli 2025	09.00 - 12.00	Lanjutan Pembahasan TLRHP pada Eks Ditjen Perumahan	7 dan 8
		12.00 - 13.30	ISHOMA	
		13.30 - 16.30	Lanjutan Pembahasan TLRHP pada Eks Ditjen Perumahan	7 dan 8
4	Kamis/10 Juli 2025	09.00 - 12.00	Lanjutan Pembahasan TLRHP pada Eks Ditjen Perumahan	7 dan 8
		12.00 - 13.30	ISHOMA	
		13.30 - 16.30	Lanjutan Pembahasan TLRHP pada Eks Ditjen Perumahan	7 dan 8
5	Jumat/ 11 Juli 2025	09.00 - 11.30	Lanjutan Pembahasan TLRHP pada Eks Ditjen Perumahan	7 dan 8
		11.30 - 13.30	ISHOMA	
		13.30 - 16.00	Evaluasi dan Penutupan	



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

Kendari, 14 Juli 2025

Nomor : 003 /PPBJ/SATKER-PPK-SULTRA/VII/2025
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Undangan Presentasi Proposal Calon Bank/Pos
Penyalur Dana BSPS Tahun 2025

Kepada
Yth. **Pimpinan Bank Sultra Area Kendari**
di-
Tempat

Menindaklanjuti surat kami Nomor 004/UM-Rb14.5.2/2025 tanggal 8 Juli 2025 perihal Undangan Pemilihan Bank/Pos Penyalur Dana BPS Tahun 2025, dan proposal yang telah disampaikan kepada kami, bersama ini kami mengundang Saudara untuk hadir mempresentasikan proposal yang Saudara ajukan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa/ 15 Juli 2025
Pukul : 10.00 WITA
Tempat : Kantor Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

MUHTAR MUSTAFA, S.T., M.T.
NIP. 19750719 201408 1 002

Tembusan :

1. Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. PPK Rumah Swadaya, PSU, dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Arsip.



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

DAFTAR HADIR

Agenda : Presentasi Proposal Calon Bank/Pos Penyalur Dana BSPS Tahun
2025 oleh Bank Sultra

Hari, Tanggal : Selasa, 15 Juli 2025

Tempat : Kantor Satker PKP Prov. Sulawesi Tenggara

No.	Nama	Instansi/ Badan Usaha	Jabatan	Tanda Tangan
1	M.RSAN B .	PKP SULTRA	KASATKER	
2	Lili Damayanto	PKP SULTRA	ppk	
3	Irwan Oktivi	Bank Sultra	Kepala Bagian Pemasaran Dana	
4	Kristianto Sihombing	Bank Sultra	Pelaksana Pemasaran Dana	
5	Meryani Rafika Bui	Bank Sultra	Pelaksana Pemasaran Dana	
6	Ica C. Husein	PKP Sultra	staf	
7	MUHTAR MUSTAFA	KEMEN PKP	STAF	
8	ARDAN PRATISCTA, ST	KEMEN PKP	STAF	
9	Rend Abdul	Kemen PKP	staf	
10	AUDREY DANI	kemen PKP	STAF	
11	ALFERTIS YALIKI	"	"	

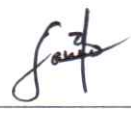
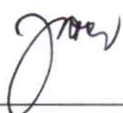
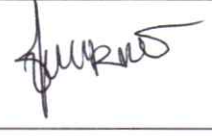


KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

DAFTAR HADIR

Agenda : Presentasi Proposal Calon Bank/Pos Penyalur Dana BSPS Tahun
2025 oleh Bank Sultra
Hari, Tanggal : Selasa, 15 Juli 2025
Tempat : Kantor Satker PKP Prov. Sulawesi Tenggara

No.	Nama	Instansi/ Badan Usaha	Jabatan	Tanda Tangan
12	Ardi	PKP	Staf	
14	Yenni S. Bahri	PKP Sultra	Staf	
15	Inah MH	"	Staf	
16	Ovi Susi Lefry. M	PKP Sultra	Staf	
17	Yuni Kasari A.R	-/-	Staf	
18	Levi Patung		Staf	
19	Abd. Rahim. Narir	-/-	Staf	
20	Marbijanah	staf -	Staf	
21				



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

NOTULENSI

RAPAT PEMILIHAN CALON BANK/POS PENYALUR
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) TAHUN ANGGARAN 2025
PT. BPD SULAWESI TENGGARA

Sehubungan dengan diselenggarakannya Pemilihan Calon Bank/Pos penyalur dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2025 hormat kami sampaikan hal-hal, sebagai berikut :

A. UMUM

Hari/Tanggal : Selasa, 15 Juli 2025
Waktu : 10.00 s.d. 12.30 WITA
Tempat : Ruang Rapat Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Rapat pemilihan calon Bank/Pos penyalur dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini diselenggarakan dalam rangka memilih Bank/Pos untuk menyalurkan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2025 di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara.

C. PEMBAHASAN

Rapat pembahasan ini dipimpin oleh PPK Rumah Swadaya, PSU dan Kawasan Permukiman Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara dan dihadiri oleh ketua dan anggota Tim Seleksi Calon Bank/Pos penyalur dan Calon Bank/Penyalur yaitu PT. BPD SULAWESI TENGGARA (Daftar Hadir Terlampir).

D. PENJELASAN/PEMAPARAN OLEH PT. BPD SULAWESI TENGGARA

Penjelasan/pemaparan yang dilakukan dalam oleh calon Bank/Pos penyalur yaitu PT. BPD SULAWESI TENGGARA meliputi :

1. Visi dan misi dalam penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
2. Jaringan kantor yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 1 Kantor cabang utama, 15 Kantor Cabang, 8 Kantor Cabang Pembantu, 58 Kantor Fungsional dan 999 karyawan/ti yang siap membantu dalam penyaluran dana BSPS;
3. Strategi pelaksanaan penyaluran dana BSPS yang menerapkan transaksi non tunai dan online untuk menjamin penyaluran dana BSPS tepat sasaran dan tepat waktu;
4. Tepat sasaran dilakukan dengan memastikan pembukaan rekening penerima dan penyaluran dana BSPS 2025 dilakukan hanya untuk penerima bantuan yang telah ditetapkan sesuai SK penetapan dan didukung dengan kelengkapan data penerima;
5. Tepat waktu dilakukan dengan mematuhi ketentuan lama waktu kewajiban untuk menyalurkan dana BSPS ke rekening masing-masing penerima bantuan;
6. Memastikan dalam pembukaan rekening penampungan dana BSPS bebas biaya pembukaan rekening, tanpa setoran awal, bebas biaya administrasi dan pengelolaan rekening TNP;
7. Pembukaan rekening penerima BSPS dilakukan setelah menerima daftar dan data penerima bantuan dari KPA/PPK tanpa setoran awal, bebas biaya administrasi bulanan dan bebas biaya penutupan rekening;
8. Transaksi pencairan/penyaluran dana dari rekening penerima BSPS akan tercatat dan dilaporkan kepada KPA/PPK;
9. Pemindahan bukaan/transfer dana BSPS 2025 untuk upah kerja dari rekening penerima BSPS dapat dilakukan dengan 2 opsi yaitu dilakukan dengan pemindah bukaan/transfer antar rekening, dari rekening penerima BSPS ke rekening kelompok penerima bantuan / rekening kelompok tukang (penerima upah kerja) atau penarikan tunai oleh satker dari rekening penampungan upah kerja atas kuasa dari penerima BSPS 2025 yang selanjutnya didistribusikan kepada kelompok tukang;
10. Sistem pelaporan penyaluran dana BSPS dapat menyesuaikan dengan format dan sistem pelaporan yang dapat diakses oleh KPA/PPK berupa aplikasi ReKor Online maupun Satker On Line.

E. TANGGAPAN OLEH PPK DAN TIM SELEKSI BANK/POS PENYALUR

PPK dan TIM Seleksi Bank/Pos penyalur memberikan tanggapan terhadap penjelasan oleh PT. BPD SULAWESI TENGGARA meliputi :

1. Melakukan pembukaan rekening secara massal (banyak) yang telah terverifikasi oleh PPK/KPA melalui surat resmi yang terdiri data nama penerima dan nomor induk kependudukan.
2. Dapat melakukan pelayanan dan penyaluran dana bantuan di seluruh kantor cabang Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Dapat memberikan solusi pelayanan apabila saat melakukan pembukaan rekening dan penyaluran bantuan mengalami masalah sehingga dapat diselesaikan secara tepat waktu.
4. Melakukan sistem pelaporan yang tepat waktu dan transparan terkait laporan penyaluran dana bantuan kepada penerima bantuan.
5. Melakukan inovasi dalam hal penyaluran bantuan mengingat waktu yang diberikan sangat sedikit dan jumlah penerima bantuan yang cukup banyak.

Demikian notulensi ini dibuat dan akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Pemilihan Bank/Pos penyalur :

1. Muhtar Mustafa, S.T.,M.T.

Ketua



2. Nur Ali, ST

Sekretaris

(Hadir Via Zoom)

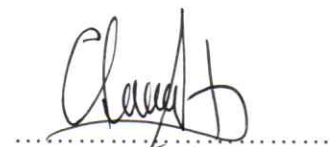
3. A. Dwi Ayu Permatasari
Taufan, ST.,MM

Anggota

(Hadir Via Zoom)

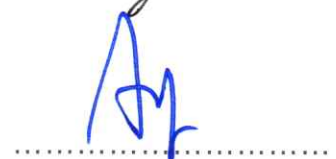
4. Ica Capriyati Husen, ST

Anggota



5. Fuad Ashad Langguta, ST

Anggota



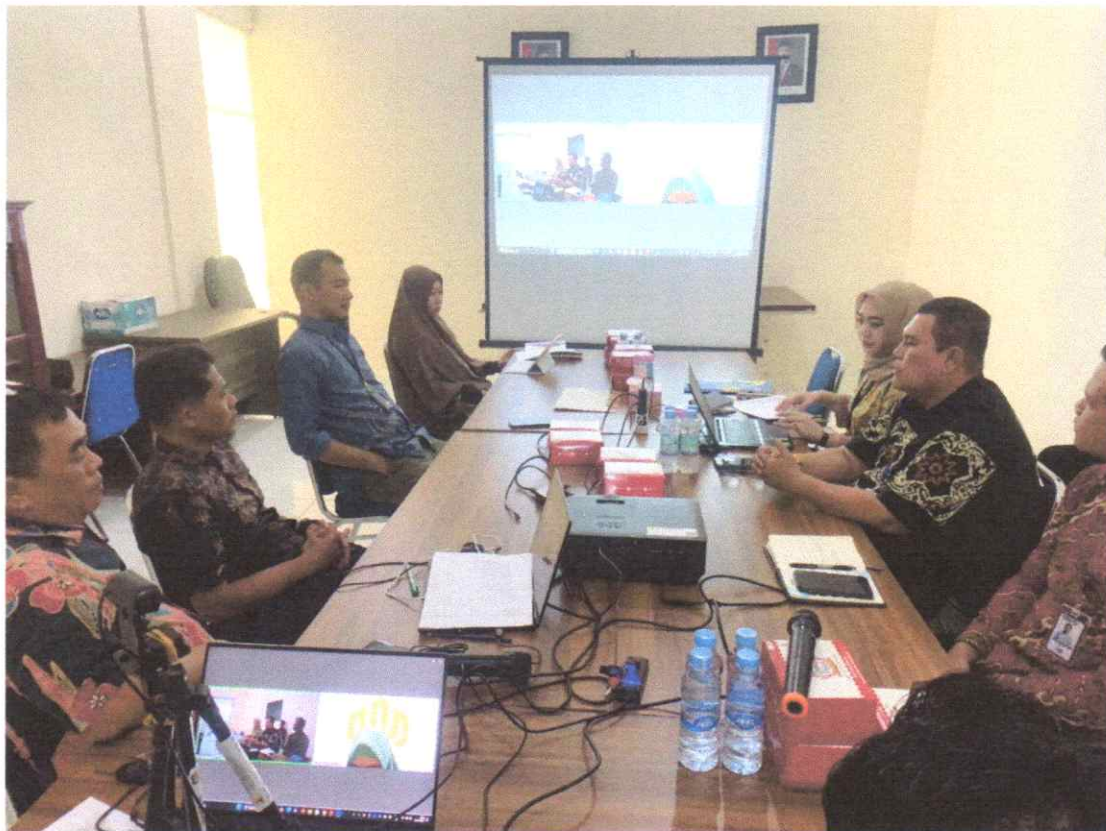
DOKUMENTASI



DOKUMENTASI



DOKUMENTASI



DOKUMENTASI



DOKUMENTASI



DOKUMENTASI



RAPAT PEMBAHASAN KELENGKAPAN RC USULAN PENANGANAN KUMUH KAB. MUNA BARAT TAHUN 2025

Waktu : 17 Juli 2025

The image shows a Zoom meeting interface. The main window displays a video feed of a man with a mustache, wearing a patterned shirt, speaking. The background of the video feed is a presentation slide from the Indonesian Ministry of Housing and Urban Development (KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA). The slide title is 'Rapat Arahan dan... pada Balai dan Sa...'. The slide content includes the text 'Rapat Arahan dan... pada Balai dan Sa...'. The Zoom interface shows 17 participants in the top bar. The bottom bar shows the Zoom controls (Audio, Video, Participants, Chat, React, Share, AI Companion, More, Leave). The right sidebar shows the 'Participants (17)' list, including Sirafin_Satker PKP Sultra (Me), Dit. Bangkim (Host), Ridwan Sudartha, Asizah Nur Kusumaningtyas_DJKP, Balai P3KP Sulawesi III, BP3KP Sul. III-lili damayanto, Dit Bangkim - Rusdi Aufar, Dit. Bangkim, Dit. Bangkim - Sherly, Dit. Bangkim_Hani, Dit. Bangkim_Saffana, Fuad PKP Sultra, and Ica CH - PKP Sultra. The bottom of the image shows a Google Drive window displaying a document titled 'SURAT PERNYATAAN KESIAPAN LAHAN CLEAN AND CLEAR'. The document is dated 7 Juli 2025 and is signed by LA ODE DARWIN, Bupati Muna Barat. The document content includes a declaration of readiness for the 'Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Desa Bangko Kecamatan Maginti dan lokasi lain yang terdapat dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 95/a tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Muna Barat, dengan ini menyatakan bahwa:'. The document lists four points: 1. Lahan dimaksud tidak dalam sengketa. 2. Lahan dimaksud benar-benar clean and clear dalam segala bentuk tuntutan dan gugatan. 3. Pemerintah Daerah bertanggung jawab penuh terhadap Lokasi dan Lahan Pelaksanaan Pelanggaran. 4. Lokasi tersebut telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Muna Barat. The document concludes with 'Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.' and is signed by LA ODE DARWIN, Bupati Muna Barat, on 7 Juli 2025.

zoom Workplace

Participants (17)

Find a participant

Sirafin_Satker PKP Sultra (Me)

Dit. Bangkim (Host)

Ridwan Sudartha

Asizah Nur Kusumaningtyas_DJKP

Balai P3KP Sulawesi III

BP3KP Sul. III-lili damayanto

Dit Bangkim - Rusdi Aufar

Dit. Bangkim

Dit. Bangkim - Sherly

Dit. Bangkim_Hani

Dit. Bangkim_Saffana

Fuad PKP Sultra

Ica CH - PKP Sultra

Invite

Unmute me

30°C

Search

14:24 17/07/2025

30°C Sebagian cerah

Search

14:34 17/07/2025

BUPATI MUNA BARAT

SURAT PERNYATAAN KESIAPAN LAHAN CLEAN AND CLEAR

Pada hari ini, Senin Tanggal Tujuh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LA ODE DARWIN

Jabatan : Bupati Muna Barat

Alamat : Laworo Kabupaten Muna Barat

Pemerintah Kabupaten Muna Barat telah menyediakan lahan untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Desa Bangko Kecamatan Maginti dan lokasi lain yang terdapat dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 95/a tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Muna Barat, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Lahan dimaksud tidak dalam sengketa.
2. Lahan dimaksud benar-benar clean and clear dalam segala bentuk tuntutan dan gugatan.
3. Pemerintah Daerah bertanggung jawab penuh terhadap Lokasi dan Lahan Pelaksanaan Pelanggaran.
4. Lokasi tersebut telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Muna Barat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

I

Laworo, 7 Juli 2025

BUPATI MUNA BARAT,

LA ODE DARWIN



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No 1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

Kendari, 18 September 2025

Nomor : 167/UM/Rb H.5/2025
Lampiran : -
Perihal : Undangan Ekspos Laporan Akhir Hasil Review
DED Peningkatan Kualitas Permukiman
Kumuh Dawanowajo III Kabupaten Buton

Kepada Yth.

1. **Konsultan Perencana, CV. Alhazen Utama Consultant**
2. **Staf Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sulawesi Tenggara**

di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanowajo III Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam rangka perencanaan kegiatan diperlukan pembahasan terkait laporan akhir hasil review DED yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 19 September 2025

Pukul : 09.00 WITA s.d. selesai

Tempat : Ruang Rapat Kantor Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Satuan Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sulawesi Tenggara

MUH. IRSAN BASALAMAH, S.T., M.T.
NIP. 198706122010011013

Tembusan:

1. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III;
2. Arsip.



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

DAFTAR HADIR

Agenda : Ekspos Laporan Akhir Hasil Review DED Peningkatan Kualitas
Permukiman Kumuh Dawanowajo III, Kabupaten Buton

Hari, Tanggal : Jumat, 19 September 2025

Tempat : Kantor Satker PKP Prov. Sulawesi Tenggara

No.	Nama	Instansi/ Badan Usaha	Jabatan	Tanda Tangan
1.	MUH. IRSAN B.	PKP SULTRA	Kasatker.	
2.	Lili Damayanti	pkp		
3.	MARDIANA MUCHTAR	PPSPM		
4.	Fitriani	Band Satker.	Band	
5.	LAODE SIRAPIN	SATKER	STAF	
6.	Puand Ashad	Satker sultra	staf	
7.	Mub. Fauzi	fasbutan	leader	
8.	Mursyid Hidayat	satker sultra	CPNS	
9.	Nurul Bidayni S.	satker sultra	CPNS	
10.		KONSULTAN		
11.	Wahyudin	konsultanan		



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

DAFTAR HADIR

Agenda : Ekspos Laporan Akhir Hasil Review DED Peningkatan Kualitas
Permukiman Kumuh Dawanowajo III, Kabupaten Buton

Hari, Tanggal : Jumat, 19 September 2025

Tempat : Kantor Satker PKP Prov. Sulawesi Tenggara

No.	Nama	Instansi/ Badan Usaha	Jabatan	Tanda Tangan
12.	Muh. Fakhriansa Putra	Sutner Sutra	CPN	
13.	Anni Yanto	Staf		
14.	Wd. Vince Annika	Satker Sutra Staf	staf	
15.	Muh. Han	STAF		
16.	Ld. Ichsan C			
17.	Muhamad Mukhr			
18.	Moh. Rifai Agustina			
19.	DANI SUSILAKTY	STAF		
20.	Yenni Bahri	Satker Sutra	staf	
21.	Lewi	Staf	staf	
22.	Ica C. Husen	Satker PKP Sutra	staf	



NOTULENSI

RAPAT EKSPOS LAPORAN AKHIR HASIL REVIEW DED PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH DAWANOWAJO III KAB. BUTON

Sehubungan dengan diselenggarakannya Rapat Ekspos Laporan Akhir Hasil Review Drd Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanowajo III Kab. Buton hormat kami sampaikan hal-hal, sebagai berikut :

A. UMUM

Hari/Tanggal : Jumat, 19 September 2025
Waktu : 09.00 WITA s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Rapat ini diselenggarakan dalam rangka ekspos laporan akhir hasil review DED peningkatan kualitas permukiman kumuh Dawanowajo III Kab. Buton di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara.

C. PEMBAHASAN

Rapat pembahasan ini dipimpin oleh PPK Rumah Swadaya, PSU dan Kawasan Permukiman Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara dan dihadiri oleh Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sulawesi Tenggara, Konsultan Perencana yaitu CV. Alhazen Utama Consultant, dan Staff Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sulawesi Tenggara.

D. PENJELASAN OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Pejabat pembuat komitmen pembukaan rapat serta penjelasan singkat terkait DED kepada seluruh peserta rapat.

E. PAPARAN REVIEW DED PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH DAWANOWAJO III KAB. BUTON OLEH KONSULTAN PERENCANA

Konsultan Perencana menjelaskan paparan mengenai DED peningkatan kualitas permukiman kumuh meliputi:

- a. Penjelasan mengenai RC/dokumen
- b. Target pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman kumuh yaitu dari **Kumuh Sedang** menjadi **Tidak Kumuh**
- c. Sumber HPS

F. DISKUSI LAPORAN AKHIR

Peserta rapat melaksanakan diskusi mengenai laporan akhir hasil review DED yang dibuat oleh Konsultan Perencana meliputi:

- a. Pembahasan dasar penentuan harga satuan berdasarkan SSH dan hasil survei harga yang telah dilakukan konsultan perencana
- b. Pembahasan mengenai legalisasi dokumen penentuan harga satuan berdasarkan hasil survei
- c. Pembahasan mengenai dokumentasi pelaksanaan CBR
- d. Pembahasan mengenai ruang lingkup kegiatan
- e. Pembahasan mengenai masa waktu perbaikan laporan akhir

Demikian notulensi ini dibuat dan akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notulis :

1. Muh. Fakhriansa Putra, S.T.

2. Mursyid Hidayat, S.Ars



DOKUMENTASI





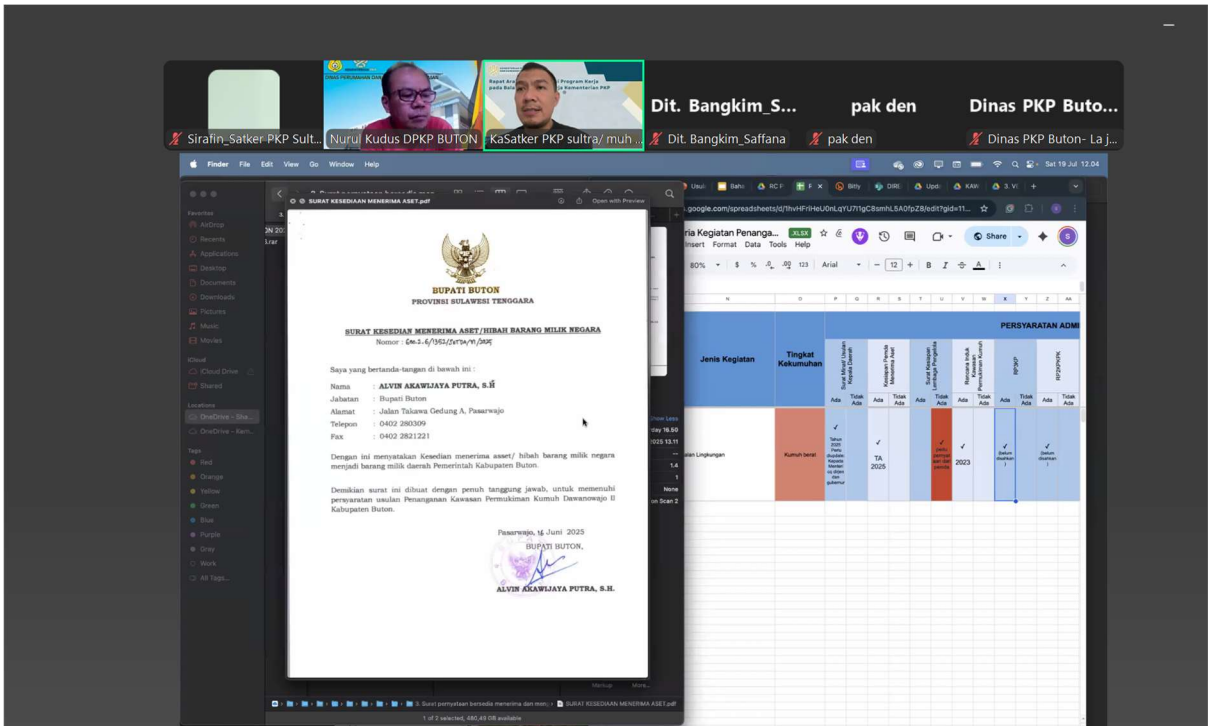
NOTULA RAPAT

Hari, tanggal : Sabtu, 19 Juli 2025

Agenda : Rakor Persiapan Penanganan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton

- Lingkup kegiatan yang akan ditangani jalan lingkungan
- Data baseline kumuh perlu disahkan
- Surat kesesuaian RTRW akan diupload hari senin, 21 Juli 2025
- Gambar DED, Matriks Kolaborasi, dan RAB belum ditanda tangani
- Kesiadaan pengelolaan aset ditandatangani oleh pemerintah desa
- Rincian Anggaran untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Wasdal
- Dokumen yang harus ada: Legalitas Unit Hunian dan Jalan bukti kepemilikan lahan, dan status jalan.
- Surat minat ditujukan ke Menteri PKP, tembusan ke Dirjen Kawasan Permukiman dan gubernur, akan ditindaklanjuti hari ini
- Kesiapan Lembaga pengelola ditandatangani oleh bupati
- Untuk RP3KP dan RP2KPKPK dibutkan Surat pengantar penyampaian dokumen, dicantumkan proses legalisasinya berapa lama, ditandatangani oleh kepala dinas
- Jalan menggunakan aspal buton
- Matriks kolaborasi dimatangkan lagi

DOKUMENTASI

[illegible]

The screenshot displays a Zoom meeting window. At the top, the Zoom toolbar shows several participants: Sirafin_Satker PKP Sult..., KaSatker PKP sultra/ muh..., EDWARD ABDURRAH..., Dit. Bangkim_Saffana, Ridwan Sudartha, and pak den. The main window shows a Microsoft Excel spreadsheet titled 'Matriks Kolaborasi' (Collaboration Matrix). The spreadsheet is a complex table with multiple columns and rows, likely representing a project management or resource allocation tool. The interface includes a Zoom toolbar at the top with participants' names and avatars, and a Windows taskbar at the bottom showing the time as 12:11 on 19/07/2023.

zoom Workplace

Recording... View

Sirafin_Satker PKP Sult... EDWARD ABDURRAHMAN KaSatker PKP sultra/ muh ... Dit. Bangkim

KEMENTERIAN PKP DINAS PERUMAHAN DAN KIMAN

Nurul Kudus DPKP BUTON

Participants (20)

Find a participant

- Sirafin_Satker PKP Sul... (Host, me)
- EDWARD ABDURRAHMAN
- KaSatker PKP sultra/ muh irsan basal...
- Nurul Kudus DPKP BUTON
- BP3KP Sulawesi III
- Dinas PKP Buton- La joni
- Dit Bangkim_Yohanes Bosko Luke L
- Dit. Bangkim
- Dit. Bangkim Andi Nur Isra
- Dit. Bangkim_Hani
- Dit. Bangkim_Saffana
- Djuwitaaaaaa_BP3KP Sulawesi III
- khadija sultan

Audio Video Participants Chat React Share Host tools More End

31° Search

12:42 19/07/2025

zoom Workplace

Recording... View

Sirafin_Satker PKP Sult... EDWARD ABDURRAHMAN KaSatker PKP sultra/ muh ... Dit. Bangkim

KEMENTERIAN PKP DINAS PERUMAHAN DAN KIMAN

Nurul Kudus DPKP BUTON

Participants (20)

Find a participant

- Dit. Bangkim Andi Nur Isra
- Dit. Bangkim_Hani
- Dit. Bangkim_Saffana
- Djuwitaaaaaa_BP3KP Sulawesi III
- KaSatker PKP sultra/ muh irsan basal...
- khadija sultan
- Muhammad Hidayat
- Muhammad Ramli
- Natasya
- NurulAuliaRidwan_Staf_BP3KPSul3
- pak den
- Ridwan Sudartha
- Sie 1_BP3KP SUL III

Audio Video Participants Chat React Share Host tools More End

31° Search

12:42 19/07/2025

Zoom Meeting Interface (Top):

- Participants: Sirafin_Satker PKP Sult..., Nurul Kudus DPKP BUTON, KaSatker PKP sultra/ m..., Dit. Bangkim, pak den, Dit. Bangkim_Saffana.
- Background: A large image of a mosque with a golden dome and minarets, with birds flying in the sky.
- Bottom Bar: Windows taskbar showing the date 19/07/2025 and time 12:43.

Zoom Meeting Interface (Bottom):

- Participants: Sirafin_Satker PKP Sult..., EDWARD ABDURRAH..., Nurul Kudus DPKP BUTON, KaSatker PKP sultra/ muh..., Ridwan-Sudartha, Dinas PKP Buto... (Dinas PKP Buton- La joni).
- Shared Screen: A Google Sheet titled "Readiness Criteria Kegiatan Penanganan Kumuh".

Google Sheet Data:

Kawasan	Provinsi	Total luas penanganan	Total Luas SK Kumuh	URAIAN KEGIATAN PENANGANAN		Jenis Kegiatan	Tingkat Keseriusan	PERSYARATAN ADMINISTRASI											
				Jumlah	Anggaran sesuai luas penanganan			Aspek	Aspek	Aspek	Aspek	Aspek	Aspek	Aspek	Aspek	Aspek	Aspek	Aspek	
Perumahan Cawasrenjeng R. Kabupaten Buton	Sulawesi Tenggara	212 Ha	4919.204.000.000	4919.204.000.000	Jalan Lingkungan	Kumuh berat	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3	Aspek 4	Aspek 5	Aspek 6	Aspek 7	Aspek 8	Aspek 9	Aspek 10	Aspek 11	Aspek 12	

[illegible]

RAPAT PEMBAHASAN USULAN BANTUAN PERMUKIMAN KUMUH DAN SANITASI RUMAH TAHUN ANGGATAN 2025

Waktu : 19 Juli 2025

The screenshot displays a Zoom meeting interface. The main window shows a PowerPoint presentation titled "Paket kegiatan kumuh 2025, bahan RDP - PowerPoint". The presentation content includes a table with activities and their durations, categorized into four main sections: A. Perencanaan, B. Pelaksanaan, C. Penyelesaian, and D. Penyerahan. The table lists various tasks such as "Penyusunan Program Penyelenggaraan", "Revisi Dokumen Tender", "Survei Lapangan", and "Pembuatan Fask Komitabilitas", along with their respective durations in hours.

NO	KEGIATAN	Jumlah Hari Kalender	2025												2026											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Septem	Oktober	Novem	Desem	Januar	Februari	Maret									
PERENCANAAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH																										
A. Perencanaan																										
1	Penyusunan Program Penyelenggaraan	30 HK																								
2	Penyusunan Perencanaan Kualitas Permukiman Kumuh	30 HK																								
3	Verifikasi Proposal dan Teknik Usulan Bantuan	30 HK																								
4	Penyusunan RKA-KL	30 HK																								
5	Penyusunan Lokasi Bantuan	30 HK																								
B. Pelaksanaan																										
1	Revisi Desain	14 HK																								
2	Penyusunan Dokumen Tender (MDP, DED, RAB/NPS, RKS, dll)	21 HK																								
3	Revisi Dokumen Tender (MDP, DED, RAB/NPS, RKS, dll)	14 HK																								
4	Surat Perintah Pelaksanaan (SPP)	3 HK																								
5	Surat Perintah Tender (SPT)	1 HK																								
6	Pengadaan Lapangan Konsultasi Supervisi	30 HK																								
7	Tender Fask Penyelenggara Jasa Konstruksi	45 HK																								
C. Penyelesaian																										
1	Kontrol Konsultasi Supervisi	90 HK																								
2	Revisi Laporan Hasil Penelitian Persepsi	1 HK																								
3	Penetapan Surat Perijinan Penyelenggara Barang/Jasa (SPPB/J)	1 HK																								
4	Rapat Penetapan Penandatanganan Kontrak	1 HK																								
5	Penyusunan Penandatanganan Kontrak	1 HK																								
6	Penyerahan Lokasi dan Personel, Data Lokasi dan Tiba Referensi	1 HK																								
7	Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)	1 HK																								
8	Rapat Penetapan Pelaksanaan Kontrak (PCM)	1 HK																								
9	Pembayaran Fask Konstruksi	75 HK																								
10	Surat Terima Pertama (PHO)	7 HK																								
11	Masa Pemeliharaan	90 HK																								
12	Surat Terima Akhir (PHO)	7 HK																								
D. Penyerahan																										
1	Surat Terima Pengalihan	7 HK																								
2	Surat Terima BHN	7 HK																								
Penyerahan dan Penandatanganan																										

The participant list on the right shows 70 participants, including Sirafin_Satker PKP Sultra (Me), Ari Nugroho_Dit Bangkim (Host), Deny_PKP, Welly W, and others. The bottom of the screen shows the Windows taskbar with the date 19/07/2025 and time 21:30.

zoom Workplace Meeting Deny_PKP's screen

Sirafin_Sakker PKP Sult... Deny_PKP Welly W sitibrilianiputri

PowerPoint: Paket kegiatan kumuh 2025_bahan RDP

NO	KEGIATAN	Jumlah Hari Kalender	2025												2026			
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Oktober	Nov	Des	Jan	Febru	Mart	
PEMUNGKATAN KUALITAS PERUMUKAN KUMUH																		
A. Penyusunan																		
1	Penyusunan Program Penyelenggaraan	30 HK																
2	Pengisian Pengisian Kualitas Perumahan Kumuh	52 HK																
3	Penyusunan Program dan Teknis Uraian Barisan	30 HK																
4	Penyusunan RKA KLS	30 HK																
5	Penetapan Lokasi Barisan	30 HK																
B. Pelaksanaan																		
1	Revisi Desain	14 HK																
2	Penyusunan Dokumen Tender (NDP, DED, RAB/NP, RKS, dll)	21 HK																
3	Revisi Dokumen Tender (NDP, DED, RAB/NP, RKS, dll)	14 HK																
4	Surat Perintah Pelaksanaan (SPP)	3 HK																
5	Surat Perintah Tender (SPT)	1 HK																
6	Pengisian Lembar Kerja Konstruksi	30 HK																
7	Tender Fisik Penyedia Jasa Konstruksi	45 HK																
C. Penutupan																		
1	Kontrol Kualitas Superint	90 HK																
2	Revisi Laporan Hasil Pemeliharaan Penyedia	1 HK																
3	Penetapan Surat Penutupan Penyedia Barang/Jasa (SPPB)	1 HK																
4	Raport Penutupan Penyelenggaraan Konstruksi	1 HK																
5	Penutupan Penyelenggaraan Konstruksi	1 HK																
6	Perubahan Lokasi dan Personil, Data Lokasi dan TSK Referensi	1 HK																
7	Surat Perintah Mula Kerja (SPMK)	1 HK																
8	Raport Penutupan Pelaksanaan Konstruksi (PCM)	1 HK																
9	Pelaksanaan Fisik Konstruksi	75 HK																
10	Surat Terima Pemeliharaan (PHG)	7 HK																
11	Masa Pemeliharaan	90 HK																
12	Surat Terima Akhir (HIC)	7 HK																
D. Penutupan																		
1	Surat Terima Penutupan	7 HK																
2	Surat Terima BAK	7 HK																

Participants (70)

Find a participant

- Aldy Putra Ismayogi
- ALIASMI ZESRA
- Anadya Putri Maslia
- AndiAyu_BP3KP SUL III
- Annisa Fathiya Rizky_Direktorat Jend...
- Arifay_BP3KP Kalimantan I
- Arry_BP3KP Jawa II
- Balai P3KP Sulawesi III
- BP3KP Jawa II_Nadya
- BP3KP Kalimantan I
- BP3KP Maluku
- BP3KP Maluku_Leo batlolona
- BP3KP SUL III
- BP3KP SUL III

24°C Berawan 21:30 19/07/2025

zoom Workplace Meeting Deny_PKP's screen

Sirafin_Sakker PKP Sult... Deny_PKP Welly W sitibrilianiputri

PowerPoint: Paket kegiatan kumuh 2025_bahan RDP

NO	KEGIATAN	Jumlah Hari Kalender	2025												2026			
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Oktober	Nov	Des	Jan	Febru	Mart	
PEMUNGKATAN KUALITAS PERUMUKAN KUMUH																		
A. Penyusunan																		
1	Penyusunan Program Penyelenggaraan	30 HK																
2	Pengisian Pengisian Kualitas Perumahan Kumuh	52 HK																
3	Penyusunan Program dan Teknis Uraian Barisan	30 HK																
4	Penyusunan RKA KLS	30 HK																
5	Penetapan Lokasi Barisan	30 HK																
B. Pelaksanaan																		
1	Revisi Desain	14 HK																
2	Penyusunan Dokumen Tender (NDP, DED, RAB/NP, RKS, dll)	21 HK																
3	Revisi Dokumen Tender (NDP, DED, RAB/NP, RKS, dll)	14 HK																
4	Surat Perintah Pelaksanaan (SPP)	3 HK																
5	Surat Perintah Tender (SPT)	1 HK																
6	Pengisian Lembar Kerja Konstruksi	30 HK																
7	Tender Fisik Penyedia Jasa Konstruksi	45 HK																
C. Penutupan																		
1	Kontrol Kualitas Superint	90 HK																
2	Revisi Laporan Hasil Pemeliharaan Penyedia	1 HK																
3	Penetapan Surat Penutupan Penyedia Barang/Jasa (SPPB)	1 HK																
4	Raport Penutupan Penyelenggaraan Konstruksi	1 HK																
5	Penutupan Penyelenggaraan Konstruksi	1 HK																
6	Perubahan Lokasi dan Personil, Data Lokasi dan TSK Referensi	1 HK																
7	Surat Perintah Mula Kerja (SPMK)	1 HK																
8	Raport Penutupan Pelaksanaan Konstruksi (PCM)	1 HK																
9	Pelaksanaan Fisik Konstruksi	75 HK																
10	Surat Terima Pemeliharaan (PHG)	7 HK																
11	Masa Pemeliharaan	90 HK																
12	Surat Terima Akhir (HIC)	7 HK																
D. Penutupan																		
1	Surat Terima Penutupan	7 HK																
2	Surat Terima BAK	7 HK																

Participants (71)

Find a participant

- Juan Nugraha_BP3KP Kal I
- Judith Avicena
- Kurnia illahi Fajri
- Kurniawan
- Lifi BP3KP Sul. 1
- made ariyati_NTB
- Marthin_KemenPKP_Dit Bangkim
- Michael Robert
- Muh irsan basalamah. ST. MT/ PKP s...
- Muh. Abdullah_Maluku
- mulya permana
- Nada Alifia
- Nazal | Jabar

24°C Berawan 21:31 19/07/2025

Paket kegiatan kumuh 2025_bahan RDP - PowerPoint

ppk satter druk

File Home Insert Draw Design Transitions Animations Slide Show Record Review View Help Tell me what you want to do

Share

Clipboard Paste New Slide Section Slides Font Paragraph Drawing Arrange Quick Styles Shape Fill Shape Outline Shape Effects Find Replace Select Add-ins

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ADMINISTRASI

CHECK LIST DATA	KETERANGAN
Surat usulan Kepala Daerah	a. Surat usulan Bupati/Wali Kota ke Gubernur b. Surat usulan Gubernur ke Menteri PKP
Surat pernyataan lahan <i>clean</i>	Dibuktikan dengan sertifikat/bukti penguasaan lahan/bukti lainnya untuk area yang akan diberikan bantuan
Surat pernyataan bersedia menerima dan mengelola hibah	Surat pernyataan Pemda bersedia menerima dan mengelola hibah
Masterplan/Rencana Induk	Mencakup matriks kolaborasi dan baseline numerik penilaian kumuh
RP3KP dan/atau RP2KPKPK	-
DED, RAB, dan RKS	-
SK Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	-
AMDAL/UKL-UPL	AMDAL/UKL-UPL atau dokumen lainnya (opsional selama masa transisi)
Andalalin/Safeguard/Perda RP2KPKPK	Opsional selama masa transisi

LOKASI

KRITERIA
1. Lokasi sesuai peruntukkan dalam RTRW
2. Status lahan yang akan ditangani legal
3. Penanganan dilakukan dalam deliniasi permukiman kumuh
4. Penanganan pada permukiman kumuh seluas > 15 Ha ATAU tingkat kekumuhan sedang atau kumuh berat

METODE PENGADAAN BARANG/JASA KONTRAKTUAL

Melibatkan pihak ketiga (penyedia barang/jasa) yang bekerja berdasarkan kontrak

Paket kegiatan kumuh 2025_bahan RDP - PowerPoint

ppk satter druk

File Home Insert Draw Design Transitions Animations Slide Show Record Review View Help Tell me what you want to do

Share

Clipboard Paste New Slide Section Slides Font Paragraph Drawing Arrange Quick Styles Shape Fill Shape Outline Shape Effects Find Replace Select Add-ins

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ADMINISTRASI

CHECK LIST DATA	KETERANGAN
1. Surat usulan Kepala Daerah	a. Surat usulan Bupati/Wali Kota ke Gubernur b. Surat usulan Gubernur ke Menteri PKP
2. Surat pernyataan lahan <i>clean and clear</i>	Dibuktikan dengan sertifikat/bukti penguasaan lahan/bukti lainnya untuk area yang akan diberikan bantuan
3. Surat pernyataan bersedia menerima dan mengelola hibah	Surat pernyataan Pemda bersedia menerima dan mengelola hibah
4. Masterplan/Rencana Induk	Mencakup matriks kolaborasi dan baseline numerik penilaian kumuh
5. RP3KP dan/atau RP2KPKPK	-
6. DED, RAB, dan RKS	-
7. SK Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	-
8. AMDAL/UKL-UPL	AMDAL/UKL-UPL atau dokumen lainnya (opsional selama masa transisi)
9. Andalin/Safeguard/Perda RP2KPKPK	Opsional selama masa transisi

LOKASI

KRITERIA
1. Lokasi sesuai peruntukkan dalam RTRW
2. Status lahan yang akan ditangani legal
3. Penanganan dilakukan dalam deliniasi permukiman kumuh
4. Penanganan pada permukiman kumuh seluas > 15 Ha ATAU tingkat kekumuhan sedang atau kumuh berat

METODE PENGADAAN BARANG/JASA KONTRAKTUAL

Melibatkan pihak ketiga (penyedia barang/jasa) bekerja berdasarkan kontrak

Zoom meeting interface showing a PowerPoint presentation titled "USULAN LOKASI PENINGKATAN KAWASAN KUMUH". The presentation content includes:

- KAB. MUNA BARAT**
 - Provinsi : Sulawesi Tenggara
 - Lokasi : Kawasan Permukiman Perisai
 - Luas (Ha) : 10,67 ha (di bawah 15 ha)
 - Pagu (Rp) : 7.012.954.000
 - Kriteria : Kumuh Berat
- TIDAK DIREKOMENDASIKAN**
- DOKUMEN KELengkapan KAW. MUNA BARAT:**
 - https://drive.google.com/drive/folders/1S_ykSdQFayCaGPh1WheQdVfSk_81EW7vjspsrhing
- USULAN LOKASI PENINGKATAN KAWASAN KUMUH**
 - PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
 - TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
- Table 1: Kelengkapan Dokumen**

No	Dokumen	Kelengkapan				Keterangan
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai	
PERNYATAAN ADMINISTRASI						
1.	Surat Usulan Kepala Daerah	✓		✓		
2.	Surat Pernyataan Pemda menerima hibah serta mengesahkan	✓		✓		
3.	Surat pernyataan lahan clean and clear	✓		✓		
4.	Masterplan/ Rencana induk kawasan & matriks kolaborasi dan baseline numerik pendataan kumuh	✓		✓		
5. Masterplan						
a. Matriks kolaborasi						
b. Baseline						
c. Baseline						
5.	Dokumen perencanaan (RKS, RAB dan RKS) dari Pemda	✓		✓		
a. RKS						
b. RAB						
c. RKS						
6.	BP3KP	✓		✓	RKS belum ditandatangani oleh pemda dan konsultan perencanaan	
7.	BP3KP	✓		✓	BP3KP belum ditandatangani oleh pemda dan konsultan perencanaan	
8.	SK Bupati/ Walikota penempatan lokasi permukiman kumuh	✓		✓	BP3KP belum ditandatangani oleh pemda dan konsultan perencanaan	
9.	AMBAU/ UPL/ UPL atau dokumen lainnya	✓		✓	Kepulauan Bupati Muna Nomor 95a Tahun 2022	
PERNYATAAN LOKASI						
1.	Lokasi sesuai penunjukan dalam rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTW)	✓		✓	Tidak divergikan	
2.	Status lahan yang akan ditangani legal	✓		✓	Belum terdapat sertifikat atau bukti kepemilikan lahan yang ditunjukkan bukti	
3.	Musik dalam desain permukiman kumuh	✓		✓		
4.	Kumuh seluruh lebih dari 15 ha	✓		✓	Total SK Kumuh Kib. Jember 977,7 ha. Lusa yang akan ditangani 10,67 ha	

Zoom meeting interface showing a PowerPoint presentation titled "PERAN PENDAMPINGAN KEGIATAN". The presentation content includes:

- KOTA AMBON**
- PERAN PENDAMPINGAN KEGIATAN**
 - OLEH TIJEN TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
- POTENSI PENYIMPANGAN**
 - 1. Dokumen perencanaan (ketidaksesuaian gambar dan RAB)
 - 2. Proses pengadaan barang dan jasa
 - 3. Mutu atau kualitas pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan
- EFISIENSI**
 - 1. Ketidaksesuaian kebutuhan yang diajukan dengan readiness criteria yang ditetapkan
 - 2. Metode pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan standar
 - 3. Waktu, biaya dan mutu pelaksanaan dan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan
- TRANSPARANSI**
 - Proses pengadaan barang dan jasa mengacu pada Perpres No 16 tahun 2018 tentang pengadaan

Zoom Meeting with participants: Sirafin_Satker_PKP_Sult..., Yenni Sofyan Mora_BP..., Deny_PKP, PKP_Fitrah, BP3KP_Sumatera III_Ri..., mulya permana

PowerPoint Presentation: 26 / 27, 75%

File: C:/Users/ppk_s/Downloads/Usulan%20lokasi%20kumuh%20(1).pdf

IDENTIFIKASI RISIKO, MITIGASI RISIKO DAN REKOMENDASI KABUPATEN MUNA BARAT

ANALISIS PRPK DAN KPTA

PERSYARATAN LOKASI

NO	Aspek Manajemen Risiko			Aspek KPTA	Rekomendasi
	Pernyataan Risiko	Tingkat Risiko	Dampak		
1	Luas wilayah kumuh yang diusulkan kurang dari 15 Ha	Risiko Tinggi	Menyebabkan lokasi usulan tidak dapat direkomendasikan, hal ini sesuai dengan pembagian urusan Kawasan penanganan permukiman kumuh pada UU 23 Tahun 2014	Tidak memenuhi unsur akuntabilitas karena luasan wilayah pengusul tidak sesuai dengan luasan penanganan yang diatur sesuai UU 23 Tahun 2014	Mitigasi Risiko: Mengarahkan pengusul untuk ditangani oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai luas wilayah yang diusulkan yaitu 11,17 Ha

Zoom Meeting with participants: Sirafin_Satker_PKP_Sult..., Yenni Sofyan Mora_BP..., Deny_PKP, PKP_Fitrah, BP3KP_Sumatera III_Ri..., mulya permana

PowerPoint Presentation: 24 / 27, 75%

File: C:/Users/ppk_s/Downloads/Usulan%20lokasi%20kumuh%20(1).pdf

IDENTIFIKASI RISIKO, MITIGASI RISIKO DAN REKOMENDASI KABUPATEN JEMBER

ANALISIS PRPK DAN KPTA

PERSYARATAN LOKASI

NO	Aspek Manajemen Risiko			Aspek KPTA	Rekomendasi
	Pernyataan Risiko	Tingkat Risiko	Dampak		
1	Luas wilayah kumuh yang diusulkan kurang dari 15 Ha	Risiko Tinggi	Menyebabkan lokasi usulan tidak dapat direkomendasikan, hal ini sesuai dengan pembagian urusan Kawasan penanganan permukiman kumuh	Tidak memenuhi unsur akuntabilitas karena luasan wilayah pengusul tidak sesuai dengan luasan penanganan yang diatur sesuai UU 23 Tahun 2014	Mitigasi Risiko: Mengarahkan pengusul untuk ditangani oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai luas wilayah yang diusulkan yaitu 11,17 Ha
2	Belum ada Dokumen Perencanaan (RKS) dari Instansi pengusul	Risiko Tinggi	tidak adanya legalitas pertanggungjawaban dari pengusul	Belum terpenuhinya aspek akuntabilitas, dokumen yang belum disahkan makar: 1. Tidak ada pihak yang diminta pertanggung jawaban; 2. Dokumen yang belum disahkan, maka penggunaan dana atas dasar dokumen tersebut dapat dianggap menyalahi prosedur, dan berpotensi sebagai pelanggaran administratif atau bahkan pidana. 3. Tidak memiliki kekuatan hukum yang sah.	Mitigasi Risiko: Meminta Pemda menyerahkan dokumen yang telah disahkan
3	Belum disahkannya dokumen RP3KP dan RP2KPKP	Risiko Tinggi	legalitas keabsahan dokumen	1. Belum terpenuhinya aspek akuntabilitas, tanpa tandatangan, tidak ada pihak yang diminta pertanggung jawaban jika terdapat kekeliruan. 2. Dokumen yang belum disahkan, maka penggunaan dana atas dasar dokumen tersebut dapat dianggap menyalahi prosedur, dan berpotensi sebagai pelanggaran administratif atau	Mitigasi Risiko: 1. Minimal menyertakan Surat Pernyataan dari Pemda terkait kesiapan untuk melanjutkan proses keabsahan dokumen. 2. Perlu ada transparansi dalam penggunaan dokumen RP3KP



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

SURAT TUGAS

Nomor : 125/SPT/Rb14.5/2025

Kp

Dalam rangka Tinjauan Lokasi Usulan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Kab. Buton TA 2025, dengan ini kami menugaskan pejabat/staf sebagaimana tercantum dibawah ini untuk melaksanakan tugas/perjalanan dinas dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

No	Pelaksana SPD	Unit Kerja	Periode Perjalanan Dinas	Tujuan	Transportasi	Pembebanan Anggaran
1	<u>MUH. IRSAN BASALAMAH, S.T.,M.T.</u> NIP. 19870612 201001 1 013 Penata Tingkat I, Gol. III/d Kepala Satuan Kerja	Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra	21-23 Juli 2025	Kota Bau-bau- Kab. Buton	Transportasi Laut dan Darat	DIPA Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra
2	<u>LAODE SIRAFIN SARINI, S.T.</u> NIP. 199107252024211003 Gol. IX Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama					

Kepada pegawai tersebut di atas agar melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan rincian Surat Tugas dan menyampaikan laporan pelaksanaan perjalanan dinas kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan perjalanan dinas.

Demikian Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kendari, 21 Juli 2025

Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara



Muh. Irsan Basalamah, S.T.,M.T.
NIP. 19870612 201001 1 013

Tembusan :

1. Kepada yang bersangkutan;
2. Arsip.



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Pelaksana Perjalanan Dinas : - Muh. Irsan Basalamah, S.T.
- Laode Sirafin Sarini, S.T.

Tanggal Perjalanan Dinas : 21 - 23 Juli 2025

Tujuan Perjalanan Dinas : Kota Bau-Bau dan Kab. Buton

Keperluan Perjalanan Dinas : Tinjauan Lokasi Usulan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Buton TA 2025

I. Pendahuluan

Menindaklanjuti Surat Tugas Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 125/SPT/Rb14.5/2025 tanggal 21 Juli 2025 dalam rangka tinjauan lokasi usulan Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Buton TA 2025, berdasarkan surat usulan Bupati Buton Nomor 600.2.7.6/1351/SETDA/VI/2025, maka dilaksanakan perjalanan dinas ke Kabupaten Bombana selama satu hari.

II. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan tinjauan lokasi usulan Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Buton TA 2025 dilaksanakan oleh Tim Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III, dan Dit. Bangkim Dirjen Kawasan Permukiman pada tanggal 21 sampai 23 Juli 2025 bertempat di Kabupaten Buton.

III. Jadwal Kegiatan

Hari / tanggal	Waktu	Keterangan
Senin, 21 Juli 2025	Pukul 13:30	Perjalanan dari Kota Kendari ke Kota Bau-Bau
	Pukul 19:00	Tiba di Kota Bau-Bau, makan malam, istirahat
Selasa, 22 Juli 2025	Pukul 07:00	Perjalanan dari Kota Bau-Bau ke Pasarwajo Kabupaten Buton
	Pukul 08:30	Tinjauan Lokasi usulan Penanganan Kumuh dan Audiensi bersama Bupati Buton
	Pukul 12:00	Istirahat
	Pukul 14:00	Rapat hasil tinjauan lapangan bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton dan Dinas PU Kabupaten Buton

	Pukul 15:30	Audiensi bersama Sekda Buton
	Pukul 16:00	Perjalanan kembali ke Kota Bau-Bau
	Pukul 19.30	Makan malam bersama
	Pukul 21.00	Diskusi kelengkapan RC usulan penangan Kumun Kabupaten Buton
Rabu, 23 Juli 2025	Pukul 08:00	Rapat Koordinasi bersama Dit Bangkim via zoom meeting, pararel survey lokasi lanjutan Kabupaten Buton
	Pukul 11.45	Istirahat
	Pukul 13.00	Perjalanan dari Kota Bau-Bau ke Kota Kendari.

IV. Laporan Hasil Kegiatan

1. Hasil Tinjauan Lokasi Tanggal 22 Juli 2025:

- a. Usulan penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Buton berada di Kawasan Dawanowajo 2 yang terdiri atas Desa Laburunci dan Desa Banabungi Dusun Honex dengan Luas 21,2 Ha;
- b. Dusun Honex memiliki Tipology Tepi Air. Adapun rencana penanganan berupa jalan lingkungan, Sanitasi, dan penanganan ketidakteraturan bangunan
- c. Desa Laburunci memiliki tipology dataran rendah. Adapun rencana penanganan berupa jalan lingkungan, drainase, persampahan, sanitasi, dan sambungan rumah (SR) air bersih.
- d. Tinjauan lapangan dihadiri langsung oleh Bupati Buton. Bupati buton memberikan arahan kepa Kepala desa dan tokoh Masyarakat agar turut mendukung kegiatan penanganan Kawasan kumuh tersebut
- e. Koordinasi bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Buton dan Dinas PU Kabupaten Buton diperoleh informasi berikut:
 - Penanganan Jalan lingkungan dengan aspal dapat menggunakan Aspa CPHMA dengan ketebalan 4 – 6 cm dengan ketebalan Base A minimal 15 cm dan Base B 20 cm
 - Penanganan Jalan lingkungan dengan Paving Blok masih memungkinkan, karena di kabupaten Buton terdapat 3 lokasi pembuatan paving blok dengan mutu bisa mencapai K300
 - Untuk penanganan Jalan lingkungan dengan Beton juga tersedia truk mixer dari kota Bau-Bau
 - Informasi tersebut juga akan diperkuat dengan surat rekomendasi dari Dinas PU Kabupaten Buton

2. Hasil Diskusi Bersama Pemda Kabupaten Buton, Dit Bangkim, dan Balai Sulawesi III tanggal 22 malam hari dan tanggal 23 pagi:

- a. Setelah verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan ditemukan kekeliruan administrasi pada usulan penanganan Kawasan Kumuh Kabupten Buton, yaitu:
- Desa Banabungi Dusun Honex tidak terdapat dalam SK Kawasan Kumuh dan dokumen RP2KPKPK Kabupaten Buton sehingga belum dapat dilakukan penanganan untuk TA 2025, sedangkan Desa Laburunci tidak berada dalam Kawasan Dawanowajo 2 melainkan berada dalam Kawasan Dawanowajo 3;
 - Berdasarkan hal tersebut maka administrasi usulan penanganan Kawasan kumuh Kabupaten Buton ditata ulang dengan memfokuskan usulan pada Kawasan Dawanowajo 3, yang terdiri atas Desa Takimpo, Desa Kombeli, Desa Anawainulu, dan Desa Laburunci dengan luas Kawasan kumuh total 20,89 Ha.
 - Adapun rencana penanganan Kawasan kumuh berupa jalan lingkungan, drainase, persampahan, sanitasi, dan sambungan rumah (SR) air bersih.

V. Permasalahan

Permasalahan yang ditemukan setelah verifikasi administrasi dan verifikasi teknis di lapangan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu ditemukan kekeliruan administrasi pada usulan penanganan Kawasan Kumuh Kabupten Buton bahwa Desa Banabungi Dusun Honex tidak terdapat dalam SK Kawasan Kumuh dan dokumen RP2KPKPK Kabupaten Buton sehingga belum dapat dilakukan penanganan untuk TA 2025, sedangkan Desa Laburunci tidak berada dalam Kawasan Dawanowajo 2 melainkan berada dalam Kawasan Dawanowajo 3. Berdasarkan hal tersebut maka administrasi usulan penanganan Kawasan kumuh Kabupaten Buton ditata ulang dengan memfokuskan usulan pada Kawasan Dawanowajo 3, yang terdiri atas Desa Takimpo, Desa Kombeli, Desa Anawainulu, dan Desa Laburunci dengan luas Kawasan kumuh total 20,89 Ha.

VI. Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut atas permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka telah dilakukan tinjauan lokasi lanjutan di seluruh desa yang berada dalam kawasan Dawanowajo 3 pada tanggal 23 Juli 2025. Saat ini administrasi usulan penanganan kawasan kumuh Kabupaten Buton sedang ditata kembali dan dilengkapi secara bertahap oleh Pemda Kabupaten Buton. Pemenuhan kelengkapan RC akan terus dikoordinasikan kepada Pemda Kabupaten Buton.

VII. Penutup

Demikian laporan kegiatan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PELKSANA PERJALANAN DINAS

Kendari, 24 Juli 2025

No.	Nama/NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	<u>Muh. Irsan Basalamah, S.T., M.T.</u> NIP. 19870612 2010011013	Kepala Satuan Kerja	
2.	<u>Laode Sirafin Sarini, S.T.</u> NIP. 199107252024211003	Staf/ Penata kelola Perumahan Ahli Pertama	



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

TINJAUAN LOKASI USULAN PENANGAN KAWASAN KUMUH KABUPATEN BUTON TA 2025



Selasa, 22 Juli 2025

Tinjauan Lokasi Kawasan Kumuh dan Audiensi bersama Bupati Buton



Selasa, 22 Juli 2025

Koordinasi bersama Dinas PKP dan Dinas PU Kab. Buton, Serta Audiensi bersama Sekda Buton



Selasa, 22 Juli 2025

Diskusi Hasil Verifikasi Teknis dan Verifikasi Administrasi



Rabu, 23 Juli 2025

Lanjutan Tinjauan Lapangan Kawasan Kumuh Dawanowajo 3



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

NOTULEN RAPAT

- Judul Rapat : Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Tinjauan Lokasi Usulan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kab. Buton TA 2025
- Hari/Tanggal : Kamis, 24 Juli 2025
- Waktu : 11:00 WITA s/d Selesai
- Lokasi : HYBRID Via Zoom Meeting & Ruang Kepala Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara
- Tujuan Rapat : Membahas Tindak Lanjut Atas Hasil Tinjauan Lokasi Usulan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kab. Buton TA 2025 pada Tanggal 21 – 23 Juli 2025
- Peserta : Rapat ini dihadiri oleh:
- a. Hadir di Kantor Satker PKP Prov. Sultra**
 - 1. Kepala Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra
 - 2. Kepala Seksi Wilayah I Balai P3KP Sulawesi III
 - 3. PPK Rumah Swadaya, PSU dan Kawasan Permukiman Satker PKP Prov. Sultra
 - 4. Staff Satker PKP Prov. Sultra
 - 5. Kaur Teknik PPK Rumah Swadaya, PSU dan Kawasan Permukiman
 - 6. Kaur Administrasi PPK Rumah Swadaya, PSU dan Kawasan
 - b. Hadir Via Zoom Meeting**
 - 1. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Dirjen Kawasan Permukiman
 - 2. Staf Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Dirjen Kawasan Permukiman
 - 3. Sekretaris Dinas PKP Kabupaten Buton
 - 4. Staf Dinas PKP Kabupaten Buton
 - 5. Permukiman
- Pimpinan Rapat : Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Dirjen Kawasan Permukiman
- Notulis : Laode Sirafin Sarini, S.T.

A. Pembukaan dan Arahan Kepala Satuan Kerja

Penyampaian Pembukaan dan arahan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman tentang agenda rapat yaitu membahas tindak lanjut atas hasil tinjauan lokasi usulan

Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kab. Buton TA 2025 pada Tanggal 21 – 23 Juli 2025.

B. Ringkasan Hasil Diskusi

Setelah pembukaan dan arahan rapat berkembang dalam diskusi bersama. Adapun beberapa poin hasil diskusi Adalah sebagai berikut:

1. Jumlah bangunan tidak memiliki keteraturan sebanyak 296 unit
2. Jumlah bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis sebanyak 311 unit. Disarankan untuk Intervensi Beautifikasi melalui CSR
3. Terdapat perbedaan Panjang Jalan yang disampaikan oleh Pemda Kabupaten Buton dengan data Panjang jalan hasil tinjauan lapangan. Pemda Buton akan melakukan update pada data Baseline.
4. Jumlah KK tidak terakses air minum aman sebanyak 392 KK, rencana akan dibuat IPA skala Kawasan
5. Jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimal sebanyak 205 KK, rencana akan dibuatkan sambungan rumah (SR)
6. Saluran drainase tidak tersedia atau tidak terhubung dengan sepanjang 7.594 meter, dan Kualitas drainase buruk sepanjang 2020 meter. Namun panjang drainase yang rencana akan ditangani akan disesuaikan dengan anggaran
7. Berdasarkan data Baseline tahun 2022 Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis sebanyak 41 KK, dan Jumlah KK dengan sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 22 KK.
8. Aspek Kondisi Pengelolaan Persampahan, rencana akan disediakan 764 tempat sampah bin individu, serta dibutuhkan peran Pemda untuk pengadaan motor sampah roda 3
9. Berdasarkan data Baseline tahun 2022 Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran sebanyak 539 unit dan Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran sebanyak 580 unit. Data ini perlu diupdate Kembali oleh Pemda.

Notulis


Laode Sirafin sarini, S.T.

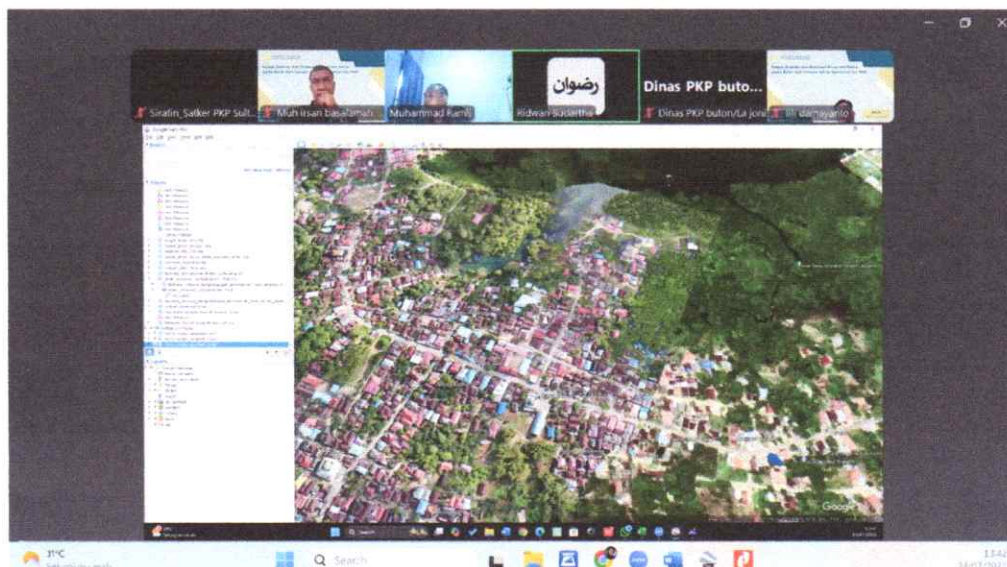


KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

DOKUMENTASI

RAPAT KOORDINASI TINDAK LANJUT HASIL TINJAUAN LOKASI USULAN PENINGKATAN KUALITAS SANITASI RUMAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN BUTON TA 2025



Muh Irsan basal...

Sirafin, Sukter PKP Sult... Muh Irsan basalamah... Diti Bangkum Muhammad Ramli Ridwan Sudartha

21/07/2023

File Home Insert Draw Design Layout References Mailings Review View Help

DATA RUMERIK PARAMETER KEKONVULSIAN

DATA RUMERIK PARAMETER KEKONVULSIAN		DATA EKISTING		RENCANA PERANGKARAN MENJADI		KWT	
Val	Unit	Power (W)	Watt	Val	Unit	Power (W)	Watt
1. ASPEK KONDISI BANGUNAN RUMAH							
a. Kondisi bangunan	Chasidat	Integrasi	200	Unit	51.02%	2	200
b. Kondisi bangunan	Chasidat	Integrasi	200	Unit	51.02%	2	200
c. Kondisi bangunan	Chasidat	Integrasi	200	Unit	51.02%	2	200
2. ASPEK KONDISI JALAN LINGKUNGAN							
a. Kondisi jalan	Chasidat	Integrasi	200	Unit	51.02%	2	200
b. Kondisi jalan	Chasidat	Integrasi	200	Unit	51.02%	2	200
c. Kondisi jalan	Chasidat	Integrasi	200	Unit	51.02%	2	200
3. ASPEK KONDISI PENYUSUNAN AIR NERUM							
a. Kondisi penyusunan	Chasidat	Integrasi	200	Unit	51.02%	2	200
b. Kondisi penyusunan	Chasidat	Integrasi	200	Unit	51.02%	2	200
c. Kondisi penyusunan	Chasidat	Integrasi	200	Unit	51.02%	2	200
4. ASPEK KONDISI PENYUSUNAN AIR NERUM							
a. Kondisi penyusunan	Chasidat	Integrasi	200	Unit	51.02%	2	200
b. Kondisi penyusunan	Chasidat	Integrasi	200	Unit	51.02%	2	200
c. Kondisi penyusunan	Chasidat	Integrasi	200	Unit	51.02%	2	200

30°C Cereh

zoom Workplace

Sirafin, Sukter PKP Sult... Muh Irsan basalamah... Diti Bangkum Ica husen

Participants (9)

- Sirafin, Sukter PKP Sult... (Me)
- Diti Bangkum
- Dinas PKP buton/La joni
- Diti Bangkum - Handy
- Ica husen
- Diti Bangkum
- Muh Irsan basalamah S1-MU/Kasabir
- Muhammad Ramli
- Sirafin, Sukter PKP Sult...

30°C Cereh

zoom Workplace

Sirafin, Sukter PKP Sult... Muh Irsan basalamah... Ridwan Sudartha Dinas PKP buto...

Participants (13)

- Sirafin, Sukter PKP Sult... (Me)
- Diti Bangkum - Handy
- Ridwan Sudartha
- Dinas PKP buton/La joni
- Diti Bangkum
- Diti Bangkum_Hani
- Diti Bangkum Saffana
- Fuad Ashad
- Ica husen
- Ica husen
- Diti Bangkum
- Diti Bangkum
- Diti Bangkum

30°C Cereh

Zoom Workplace Meeting Dtt.Bangkum - Hanidy's screen View

Participants (13)

Dinas PKP buton/La joni
Ridwan Sudartha
Dtt. Bangkum
Dtt. Bangkum, Hanie
Dtt. Bangkum, Saffana
Fuad Aulhad
ica husen
irda
Widamayanto
Muh insan basalamah ST MT/ Kasatk
Muhammad Ramli

File Home Insert Draw Design Layout References Mailings Review View Help Tables PDF Print Annotations Table Design Table Layout 17 Comments Editing

DATA WISATA PERAWAT KECAMATAN				DATA KAWIN				RENCANA PENGALIHAN NERAKAS				KEY	
	Put	Bat	Persentase	Put	Bat	Persentase	Put	Bat	Persentase	Put	Bat	Persentase	
1. ASPEK KORTER BANGUNAN RUMAH													
a. Jumlah bangunan rumah	200	100	51.02%	200	100	51.02%							
b. Jumlah bangunan rumah	0	100	0.00%	0	100	0.00%							
c. Jumlah bangunan rumah	112	500	51.82%	211	100	51.64%							
2. ASPEK KORTER JALAN LINGKUNGAN													
a. Jumlah jalan lingkungan	1.200	100	96.17%										
b. Jumlah jalan lingkungan	2.200	100	96.17%										
c. Jumlah jalan lingkungan	2.200	100	96.17%										
3. ASPEK KORTER PENTYERAN AIR MINUM													
a. Jumlah pentyeraan air minum	100	100	100.00%										

Cuaca panas
Sekarang

22:10
24/07/2023

[illegible]

zoom
Workplace

Meeting

GP Gita Prandita's screen

Recording View

PKPPerundes, Dir Hari

Muh. Irsan Basalamah

biro sdmo - sari...

BP3KP Sumatera V_Er

BP3KP-NT.II Hamdan

BP3KPJ4 Alfanita

Gotong Royong
Membangun
Untuk Rakyat

Rumahan

**PENCAPAIAN PROGRESIF PEMBANGUNAN DAN RENOVASI SUMBER
PEMBIAAYAAN CSR/GOTONG ROYONG LEMBAGA NON PEMERINTAH**

No	Mitra Kerja Sama	Jenis Kerja Sama	Uraian Kerja Sama	Masa Berlaku Kerja Sama	Lokasi Kerja Sama	Target Output	Capaian Output
1	PT Astra Internasional Tbk	Corporate Social Responsibility (CSR)	Pembangunan Rumah Baru	Bertaku 5 tahun (status: sedang direview legal Astra)	Kab. Banyumas dan Kab. Garut	1.000 unit	0
2	PT. Djarum	Corporate Social Responsibility (CSR)	Renovasi/Peningkatan Kualitas Rumah	...	Kab. Kudus	200 unit	61
				...	Kab. Temanggung	15 unit	15
3	Yayasan Buddha Tzu Chi	Corporate Social Responsibility (CSR)	Renovasi/ Peningkatan Kualitas Rumah	Tidak ada MoU/PKS dengan Kementerian PKP	Kab. Banyumas	500 unit	25
4	BAZNAS	Dana ZIS	Peningkatan Kualitas	Target 16 Juli 2025	Kab. Kudus		12
			Peningkatan Kualitas		Kab. Kendal		1
			Peningkatan Kualitas		Kab. Pekalongan		2
			Peningkatan Kualitas		Kab. Nganjuk		3
			Peningkatan Kualitas		Kab. Sanggau		1
			Pembangunan Rumah Baru		Kab. Sindenreng Rappang		24
			Peningkatan Kualitas		Kab. Enrekang		30
			Peningkatan Kualitas		Kab. Wonosobo		5
			Peningkatan Kualitas		Kab. Lumajang		24
			Peningkatan Kualitas		Kab. Pasuruan		8
			Peningkatan Kualitas		Kab. Lamongan		10
			Pembangunan Baru		Kab. Lima Puluh Kota		13
			Peningkatan Kualitas		Kab. Lima Puluh Kota		1
			Peningkatan Kualitas		Kab. Merangin		11
			Peningkatan Kualitas		Kab. Sorolangun		3
			Peningkatan Kualitas		Kab. Muara Jambi		2

Audio

Video

Participants 272

Chat 3

React

Share

AI Companion

Apps

Record

Show captions

More

Monday, 28 July 2025
Mon 12:16 (Local time)

Sangat lembap
Sekarang

Search

ENG

12:16
28/07/2025



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

SURAT TUGAS

Nomor : 130/SPT/Rb14.5/2025

ke

Dalam rangka Penanda Tanganan Naskah Hibah dan Berita Acara Serahterima Barang Milik Negara (BMN) terhadap Aset PSU TA. 2023 Kab. Konawe Selatan, dengan ini kami menugaskan pejabat/staf sebagaimana tercantum dibawah ini untuk melaksanakan tugas/perjalanan dinas dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

No	Pelaksana SPD	Unit Kerja	Periode Perjalanan Dinas	Tujuan	Transportasi	Pembebanan Anggaran
1.	<u>Muh. Irsan Basalamah, ST, MT</u> NIP. 19870612 201001 1 013	Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra	29 Juli 2025	Kab. Konawe Selatan	Transportasi Darat	DIPA Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra TA. 2025
2.	<u>Hamka Thahir, S.Ars</u> NIP. 19820101 201408 1 004					
3.	<u>Arief Dedy Susanto, SE</u> NRP. F13031988092018001					

Kepada pegawai tersebut di atas agar melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan rincian Surat Tugas dan menyampaikan laporan pelaksanaan perjalanan dinas kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tenggara selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan perjalanan dinas.

Demikian Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kendari, 28 Juli 2025

Kepala Satuan Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sulawesi Tenggara,


MUH. IRSAN BASALAMAH, ST, MT
NIP. 19870612 201001 1 013



LAPORAN PERJALANAN DINAS

Pelaksana Perjalanan Dinas : 1. Muh. Irsan Basalamah,ST.,MT.
2. Hamka Thahir, S.Ars.
3. Arief Dedy Susanto, SE

Tanggal Perjalanan Dinas : 29 Juli 2025

Tujuan Perjalanan Dinas : Kabupaten Konawe Selatan

Keperluan Perjalanan Dinas : Penandatanganan Naskah Hibah dan Berita Acara
Serahterima Barang Milik Negara (BMN) terhadap Aset
PSU TA. 2023 Kab. Konawe Selatan.

I. Pendahuluan

Dalam rangka Serah Terima Aset PSU Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan TA 2023, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan ketentuan yang tertuang dalam surat perjanjian/kontrak nomor : 140.2/SP/RUK-SULTRA/2023, tanggal 28 Juli 2023, di Perumahan Neisya Konda Kabupaten Konawe Selatan, maka perlu dilakukan koordinasi bersama pihak terkait.

II. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Penandatanganan Naskah Hibah dan Berita Acara Serahterima Barang Milik Negara (BMN) terhadap Aset PSU TA. 2023 Kab. Konawe Selatan dilakukan oleh Bupati Konawe Selatan dan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Tim Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara sejumlah 3 orang pada tanggal 29 Juli 2025 bertempat di Kabupaten Konawe Selatan.

Jadwal Kegiatan

Hari / tanggal	Uraian Kegiatan	Keterangan
Rabu, 29 Juli 2025	- Berangkat dari Kendari Menuju Konawe Selatan; - Melaksanakan Penandatanganan Naskah Hibah dan Berita Acara Serahterima Barang Milik Negara	

	(BMN) terhadap Aset PSU TA. 2023 Kab. Konawe Selatan; - Kembali menuju ke Kendari.	
--	--	--

III. Rangkaian Kegiatan

Kegiatan Penandatanganan Naskah Hibah dan Berita Acara Serahterima Barang Milik Negara (BMN) terhadap Aset PSU TA. 2023 Kab. Konawe Selatan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kunjungan ke Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Konawe Selatan untuk dalam rangka koordinasi;
2. Melakukan kunjungan ke tempat kegiatan Penandatanganan Naskah Hibah dan Berita Acara Serahterima Barang Milik Negara (BMN) terhadap Aset PSU TA. 2023 bersama Bupati Konawe Selatan Bapak Irham Kalenggo, S.Sos., M.Si beserta jajarannya;

IV. Permasalahan

Dalam kegiatan Penandatanganan Naskah Hibah dan Berita Acara Serahterima Barang Milik Negara (BMN) terhadap Aset PSU TA. 2023 Kab. Konawe Selatan berjalan sebagaimana mestinya, selanjutnya dokumen akan disampaikan ke Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman untuk Proses persiapan penandatanganan dokumen oleh Sekjen Pekerjaan Umum.

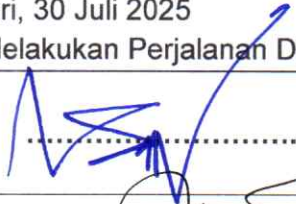
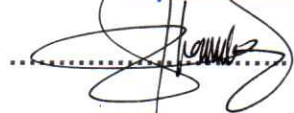
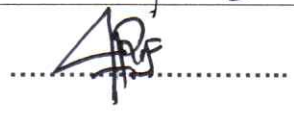
V. Tindak Lanjut

Tindak lanjut Serahterima Barang Milik Negara (BMN) terhadap Aset PSU TA. 2023 Kab. Konawe Selatan yaitu melakukan proses penghapusan aset Barang Milik Negara (BMN) di Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara.

VI. Penutup

Demikian laporan kegiatan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendari, 30 Juli 2025
Yang Melakukan Perjalanan Dinas,

1.	<u>Muh. Irsan Basalamah, ST., MT</u> NIP. 19870612 201001 1 013	
2.	<u>Hamka Thahir, S.Ars</u> NIP. 198201012014081004	
3.	<u>Arief Dedy Susanto, SE</u> NRP. F13031988092018001	

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN



Serahterima Aset BMN PSU Kab. Konsel TA. 2023
ke Bupati Konawe Selatan



Serahterima Aset BMN PSU Kab. Konsel TA.
2023 ke Bupati Konawe Selatan



Penandatanganan Dokumen Surat Hibah dan
BAST Aset BMN PSU Kab. Konsel TA. 2023



Penandatanganan Dokumen Surat Hibah dan
BAST Aset BMN PSU Kab. Konsel TA. 2023



Serahterima Aset BMN PSU Kab. Konsel TA. 2023
ke Bupati Konawe Selatan



Serahterima Aset BMN PSU Kab. Konsel TA.
2023 ke Bupati Konawe Selatan



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

NOTULEN RAPAT

- Judul Rapat : Pembahasan Item Pekerjaan Usulan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kab. Buton TA 2025
- Hari/Tanggal : Rabu, 30 Juli 2025
- Waktu : 11:00 WITA s/d Selesai
- Lokasi : Ruang Kepala Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara
- Tujuan Rapat : Membahas Item Pekerjaan yang akan dikerjakan berdasarkan DED Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kab. Buton TA 2025
- Peserta : Rapat ini dihadiri oleh:
1. Kepala Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra
 2. PPK Rumah Swadaya, PSU dan Kawasan Permukiman Satker PKP Prov. Sultra
 3. Pejabat Penandatanganan SPM Satker PKP Prov. Sultra
 4. Bendahara Keuangan Satker PKP Prov. Sultra
 5. Kaur Teknik PPK Rumah Swadaya, PSU dan Kawasan Permukiman
 6. Kaur Administrasi PPK Rumah Swadaya, PSU dan Kawasan Permukiman
 7. Perwakilan Pemda Kab. Buton
 8. Staff Satker PKP Prov. Sultra
- Pimpinan Rapat : Muh. Irsan basalamah, S.T.,M.T. selaku Kepala Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara
- Notulis : Laode Sirafin Sarini, S.T.

A. Pembukaan dan Arahan Kepala Satuan Kerja

Penyampaian Pembukaan dan arahan Kepala Satuan Kerja tentang agenda rapat yaitu Membahas Item Pekerjaan yang akan dikerjakan berdasarkan DED Usulan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kab. Buton TA 2025.

B. Ringkasan Hasil Diskusi

Setelah pembukaan dan arahan rapat berkembang dalam diskusi bersama. Adapun beberapa poin hasil diskusi Adalah sebagai berikut:

1. Rencana Panjang jalan yang memerlukan peningkatan kualitas sepanjang 2.376 meter yang terdiri atas 2 jenis penanganan yaitu:

- Rencana Jalan Aspal 1.461 meter
 - Rencana jalan jalan Paving Blok 915 meter
2. Rencana Panjang drainase yang akan ditangani 150 meter
 3. Rencana plat duiker 2 buah
 4. Jumlah Rumah yang memerlukan Sambungan Rumah (SR) Air bersih sebanyak 38 unit.
Jumlah ini berkurang dari yang semula 63 unit (data BNBA 2022). Pengurangan ini berdasarkan hasil verifikasi ulang di lapangan pada bulan Juli 2025.
 5. Drainase yang melewati lahan warga dimintakan surat pernyataan hibah pemilik lahan
 6. Spesifikasi jalan aspal mengikuti Spesifikasi Bina Marga
 7. Pekerjaan jalan ditepi air laut memperhatikan data muka air pasang tertinggi
 8. Perlu dipersiapkan dokumen sosial bagi rumah – rumah warga yang akan terdampak pekerjaan peninggian jalan.
 9. Untuk penanganan sanitasi akan menggunakan toilet leher angsa dan septic tank biofil.
 10. Jenis aspal yang rencana akan digunakan Adalah AC-WC dengan tebal Pondasi Base A dan Base B 20cm
 11. Item pekerjaan Persampahan, Sanitasi dan Sambungan Rumah Air Bersih dibutuhkan peta detail dan titik koordinat lokasi.

Notulis



Laode Sirafin sarini, S.T.



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : RABU, 30 JULI 2025

Tempat : KANTOR SATKER PKP PROV. SULTRA

Acara : PEMBAHASAN ITEM PERJAJAN USULAN PK SANITASI RUMAH
DAN PK PERMUKIMAN KUMUH KAB. BUTON TA 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
	M. Wsan babalmsah	Kelabkar	
	Lili Damayanto	PKK	
	Muh. Ramli	Konultan buton	
	LAODE SIRAFIA	STAF	
	Fihiani		
	APRAL	Konultan buton	
	fuad	staf	
	Ica Capriyati Husen	Kaur	
	Wd vince Annila	staf	
	ARIEF DEDY	STAF	
	Fauz Dwi R.	Staf	



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

DOKUMENTASI

**PEMBAHASAN ITEM PEKERJAAN USULAN PENINGKATAN KUALITAS SANITASI RUMAH
DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH KAB. BUTON TA 2025**





KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
Jalan Penjernihan Raya No. 22, Kompleks PDAM Panakang, Makassar 90231

Nomor : UM 0102 - Rb14/256
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : **Sinkronisasi Penyelenggaraan Program Perumahan Tahun 2025**

Makassar, 31 Juli 2025

Yth.
(Daftar UndanganTerlampir)
di –

Tempat

Dalam rangka mewujudkan Program Pembangunan dan Renovasi 3 (tiga) Juta Rumah sesuai Misi Asta Cita Bidang Perumahan dan Visi Misi Presiden Republik Indonesia yang tertuang pada RPJMN Tahun 2025-2030, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perumahan di Wilayah Perkotaan, Pedesaan serta Kawasan Pesisir dan terus berperan aktif membangun koordinasi antar lintas sektor sehingga gotong royong membangun rumah untuk rakyat dapat diwujudkan. Oleh karenanya diperlukan kolaborasi, gotong royong dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di seluruh delineasi Kawasan Pesisir Wilayah Sulawesi Tenggara untuk memastikan keselarasan data perumahan dan percepatan pendataan sehingga dapat melaksanakan program yang dimaksud. Sehubungan hal tersebut, bersama ini dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu dalam kegiatan Sinkronisasi Penyelenggaraan Program Perumahan Wilayah Sulawesi Tenggara Tahun 2025 yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	: Senin - Selasa, 04 - 05 Agustus 2025
Waktu	: 13.00 WITA – selesai (jadwal terlampir)
Agenda	: Sinkronisasi Penyelenggaraan Program Perumahan Wilayah Sulawesi Tenggara Tahun 2025
Tempat	: Ruang Rapat Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Tenggara

Untuk mendukung tertibnya penyelenggaraan acara, perlu kami informasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar Bapak/Ibu dapat membawa **data informasi pendataan perumahan** yang salah satunya berisikan rencana kegiatan Pembangunan/rehabilitasi rumah Masyarakat di daerah masing-masing pada Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, BUMN/BUMD, Swasta/CSR dan lainnya;

- Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Kepai Balai

[Signature]

Bakhtiar

197110092001121003

NIP. 19711009-2001121003

1. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman;

Lampiran I
Surat Kepala BP3KP Sulawesi III
Nomor : UM 0102-Rb14/256
Tanggal : 31 Juli 2025

DAFTAR UNDANGAN

A. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Permukiman;
2. Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Tenggara.

B. Pemerintah Provinsi

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

C. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Kabupaten Buton;
2. Kabupaten Buton Utara;
3. Kabupaten Buton Tengah;
4. Kabupaten Buton Selatan;
5. Kabupaten Muna;
6. Kabupaten Muna Barat;
7. Kabupaten Wakatobi;
8. Kabupaten Kolaka;
9. Kabupaten Kolaka Utara;
10. Kabupaten Konawe Utara;
11. Kabupaten Konawe Selatan;
12. Kabupaten Konawe Kepulauan;
13. Kabupaten Bombana.

Lampiran II
 Surat Kepala BP3KP Sulawesi III
 Nomor : UM 0102-Rb14/256
 Tanggal : 31 Juli 2025

Jadwal Acara
Sinkronisasi Penyelenggaraan Program Perumahan Tahun 2025
Provinsi Sulawesi Tenggara

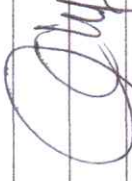
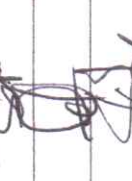
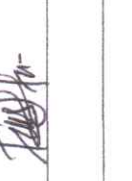
Waktu (WITA)	Kegiatan	Narasumber/Penanggungjawab
Hari Pertama, Senin 04 Agustus 2025		
12.30 – 13.00	Registrasi Peserta	Tim Satker PKP Sultra
13.00 – 13.30	Pembukaan	Tim Satker PKP Sultra
	Laporan Panitia	Kepala Seksi Wilayah I
	Sambutan Kepala Satker PKP Sulawesi Tenggara	
	Arahan Kepala BP3KP Sulawesi III, sekaligus membuka acara	
13.30 – 14.00	Strategi Pencapaian Pendataan Perumahan dalam mendukung Program Nasional Tiga Juta Rumah	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Permukiman
14.00 – 14.30	Dukungan Pemerintah Daerah Kegiatan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman TA.2025 dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara	Badan Perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
14.30 – 15.00	Dukungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara TA.2025 dalam Gotong Royong Mewujudkan Program 3 Juta Rumah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara
15.00 – 15.45	Sesi Tanya Jawab	Moderator
15.45 – 16.00	Penjelasan Mekanisme Desk	Kepala Seksi Wilayah I
Hari Kedua, Selasa 05 Agustus 2025		
08.00 – 09.00	Registrasi Peserta	
Pelaksanaan DESK		
09.00 – 12.00	1. Penyeragaman Data Pembangunan dan Renovasi Perumahan pada Instansi Daerah 2. Pengumpulan Data dalam mendukung Program 3 Juta Rumah Perumahan Kawasan Pesisir 3. Input Data melalui Form Pendataan Perumahan 4. Input Data melalui Dashboard my.pkp 5. Kesepakatan Tindak Lanjut dan Monitoring Data Capaian	Tim Seksi Wilayah I , Tim Satker PKP Sulawesi Tenggara dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

12.00 – 13.00	ISHOMA	
13.00 – 16.00	1. Penyeragaman Data Pembangunan dan Renovasi Perumahan pada Instansi Daerah 2. Pengumpulan Data dalam mendukung Program 3 Juta Rumah Perumahan Kawasan Pesisir 3. Input Data melalui Form Pendataan Perumahan 4. Input Data melalui Dashboard my.pkp 5. Kesepakatan Tindak Lanjut dan Monitoring Data Capaian	Tim Seksi Wilayah I , Tim Satker PKP Sulawesi Tenggara dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
15.30 – 15.45	Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Sinkronisasi Penyelenggaraan Program Perumahan Tahun 2025 Provinsi Sulawesi Tenggara	Tim Seksi Wilayah I , Tim Satker PKP Sulawesi Tenggara dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
15.45 – 16.00	Kesimpulan dan Penutup	Kepala Seksi Wilayah I

DAFTAR HADIR PESERTA

SINKRONISASI PENYELENGGARAAN PROGRAM PERUMAHAN TAHUN 2025 PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI TENGGARA

Hari/Tanggal : Selasa, 5 Agustus 2025
Waktu : 09.00 - Selesai

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	INSTANSI	NO. TELEPON/WA	TANDA TANGAN
01	Ary / 19700621025041001	pancha Roang	DPKPP KONSREL	081313064649	
02.	Muh / chsan koral ST / 085133047463 19870809 2024211016	Staf DPPP Kutor	DPKP KOTOR	085133047662	
03	LO ABOMANAN 190710502 2006041010	KORID. Perumahan	DPKP WAKATUBI	081342503901	
04.	EKA RUDIN SYAH 197605262009031002	KARID PERUMAHAN	DPKP KONUT	086232430053	
05.	LAODE ALI KASIM 19801210 2011011011	KARIDAG PERENCANA	DPKPP MUNABARAT	085256221403	
06	RENDA. / 197707182006041016	Kasi DATA	DPKP. KONSREL.	085256288668	
07	ILWUN / 19780520201011019	STAF	DPKP Perumahan	085256318053	
08	SUPRIATY / 19800228 20080912003	KARID PERUMAHAN	DPKP KONTOP	081356763000	
09	MUKUS / 19921016 2020121013	STAF	DPKP KONTOP	085594123334	
10	SATIANI / 19741010201107001	KARID KAWASAN	DPKP KONUT	081341930200	
11	ANDY YURIZAL / 197807052005021003	KARID KAWASANT	DUPERKUM KOLAKA	085241814783	
12	Roslan Rendi / 199012072002021061	afaris panca karsan	---	085291674141	
13	Shafira T. / 199709282022032011	Analisis Penataan Kawasan	DPKP BUTENE	08111012809	
14	Fatimah / 199709202022032017	Penyusun Program Angg & Pelaporan	DPKPP Buteng	082377662858	

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	INSTANSI	NO. TELEPON/WA	TANDA TANGAN
15	Zaghiaty 19700402001000000000	STT	PKP KOLUT	08124173741	
16	Baktar Dzafar 197705062005020004 KAGID		PKP KALU	082259082788	
17	Andi Baso Mandala	STAF	"	08231717859	
18	M. Rukhman B / 19810522000910010	Udud Pualua	PKP Bual	081252008127	
19	Moh. Khusni S1 Angst	Kasi Uda. Puncung	PKP Bual	08124400447	
20	Dipura Isfahar	Dabang. Puncung	PKP Bual	082259117975	
21	Celvi Pabung	staf kemel	PKP PROV. SULTRA		
22	Yusuf IKA STAF ARIK	STAF	PKP PROV. SULTRA		
23	AKIEF DEOY	Kaur	PKP PROV. SULTRA		
24	Hamka Thahir	STAF	PKP PROV. SULTRA		
25	LO. SIRATIN . S	STAF	PKP PROV. SULTRA		
26	Marbifunnah	STAF	PKP PROV. SULTRA		
27	Alfrans	STAF	PKP PROV. SULTRA		
28	Wd. Vince	STAF	PKP PROV. SULTRA		
29	Fuad	Kaur	PKP PROV. SULTRA		
30	Ica Capriyah Auyen	Bend	PKP PROV. SULTRA		
31	Fitriani	STAF	PKP PROV. SULTRA		
	Indah MH				

DAFTAR HADIR PESERTA

SINKRONISASI PENYELENGGARAAN PROGRAM PERUMAHAN TAHUN 2025 PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI TENGGARA

Hari/Tanggal : Senin, 4 Agustus 2025
Waktu : 13.00 - Selesai

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	INSTANSI	NO. TELEPON/WA	TANDA TANGAN
01.	TENUNJI/197707182006041016	Kasi Perumahan	Plup. Konsd.	085256288660	
02.	THAQIA R/1986031206041004	Kabang. Perencanaan	DPKP BARRANO	082259117575	
03.	Shafira T./199709282022032011	Analisis Penataan Kawasan	DPKP Buteng	08111012809	
04.	Fatinmah/199709202022032017	penyusunan Program anggaran & Pel.	DPKP Buteng	08237662858	
05.	Ays Tagore/199006212020041001	Pemnta Rancang Aki. Portana	DPKP KONSIL	081313064049	
06.	LOARDO NAGAW/1981				
	198105022006041018	Kabid. Perencanaan	DPKP wakatobi	081342503401	
07.	Muh. Ulfan Khamil, ST/				
08.	19870809200421016	STAF	DPKP BUTUR	085133047662	
	0877212 M. Auren	KADIS	DPKP MERRAN	08124742444	
	198703281985031011				
09.	Adofitach Edyonggih/198207222000121003	Kabid. Infrastruktur	Bappeda Prov. Sultre	081344527117	
10.	M. Ibrahim/198405132014081004	Analisis perencanaan	Bappeda - PW. Sultre	0815266260660	
11.	Haryati/19921262025042003	STAF	Bappeda Prov. Sultre	085395806317	
12.	MUHL. DZAH ARHAM N/200103112015041007	STAF	Bappeda Prov. Sultre	081329318163	
13.	MUSUMIN WIS/1974311302005021004	KABID KP	PRUPP SULTRE	081245407447	
14.	ASTRIANI/19791010201612001	KABID KONSUT	DPKP KONSUT	0813419702081	
15.	SUPRIATY/1980022820080720031003	KABID KONSUT	DPKP KONSUT	08135909082	
16.	MUBUS/199510162020121013	STAF PCP	DPKP KONSUT	08539123331	

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	INSTANSI	NO. TELEPON/WA	TANDA TANGAN
17.	ZASMIATY LATUK/199003202040207	Penata belia Perumahan	KOLUT	08124173741	
18	Baskara Dagar, SE	Kabid perumahan	DPKPP Kolut	0822 5908 2788	
19	EKARDIAN SYAH, S.HUT	KABID PERUMAHAN	KOLUT	085232430053	
20.	MUH. JASRIN SARIF	STAF DISPERKIM PI	PROV. SULTRA	0822 9692 6859	
21.	Muh. Ramli	Konsultan.	CV. Althera Utama	0811459002	
22	Andi Xurid	KABID KAWASAN	DISPERKIM KOLUKA	085241814983	
	197807052005021003				
23	Paslan Ridzi: 199012072022031003	Opd.5 Perata kawasan	---	08524167914	
24	Mhd. Alimulji ELA : 197808222028010006	Kasb. Pub. perumahan	PERKIM BOSEL	08124400447	
25.	Lau. Rahiwin. P/198105052006060006	LSB penuh	Publ. Bsl	08229200814	
26	LD. SIRENTIN S		PKP REUU. SULTRA		
27.	Fitrioni		PKP PROV. SULTRA		
28	Krelah MH	staf	---		
29.	Oni Susilakty. NI.	STAF	PKP. PROV SULTRA		
30.	Cwi Detung	STAF	PKP PROV SULTRA		
31	Yuni Kasari ARIF	STAF	PKP PROV. SULTRA		
32	Ica Capriyati Husen	Kaur	PKP. PROV SULTRA		
33	Hanka Thahir	kaur			
34.	Ind. Vince Annika. H	Staf	Plup prov sultra		
	fuad				
	ARIEF DEBY				
	Marbijnand	staf	PKP PROV SULTRA		
	AL-fans	staf	PKP PROV SULTRA		



NOTULENSI RAPAT

Nama Kegiatan : Sosialisasi Penyelenggaraan Program Perumahan Tahun 2025
Tempat Kegiatan : Rg. Rapat Kantor Satuan Kerja Penyediaan Perumahan
Provinsi Sulawesi Tenggara
Hari, Tanggal Kegiatan : Senin-Selasa, 04-05 Agustus 2025
Waktu Kegiatan : 08.00-16.00 WITA
No. Undangan Kegiatan : UM 0102-Rb14/256

Hari ke-1 (Senin, 04 Agustus 2025)

Peserta:

1. Kepala BP3KP Sulawesi III Bpk. Bakhtiar, S.ST., M.S.P.
2. Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 1 BP3KP Sulawesi III Ibu Andi Dwi Ayu Permatasari Taufan, S.T., M.M.
3. Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 2 BP2KP Sulawesi III Bpk. Nur Ali, S.T.
4. Kepala Satker PKP Provinsi Sulawesi Tenggara Bpk. Muh. Irsan Basalamah, S.T, M.T.
5. Perwakilan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Bidang Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak Muslimin Makkaraeng Sikki, S.T., MPW., IAI.
6. Para Kepala Dinas yang Membidangi Perumahan di 17 Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Tenggara
7. Para Pejabat Fungsional dan Staf Seksi Wilayah 1 BP3KP Sulawesi 3
8. Para Staf Satker PKP Provinsi Sulawesi Tenggara

Summary

Pemerintah provinsi berupaya menjalankan program perumahan, termasuk rehabilitasi rumah korban bencana, renovasi, dan pembangunan rumah khusus, meskipun menghadapi keterbatasan anggaran. Pemerintah akan memfasilitasi regulasi, mengidentifikasi lokasi, dan mensosialisasikan program. Bantuan rehabilitasi rumah korban bencana telah dilaksanakan pada tahun 2025.

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berjalan selama tiga tahun dinilai signifikan dan menarik perhatian. Pemerintah juga berencana mengintervensi kawasan umum di beberapa daerah setelah master plan selesai, meliputi penanganan di atas dan di belakang rumah.

Diskusi dilakukan untuk menyelaraskan program perumahan dengan program cipta karya, khususnya terkait kawasan strategis dan sinkronisasi program di tingkat daerah. Peserta menekankan pentingnya memaksimalkan dokumen, sinergi antar stakeholder, dan sinkronisasi program. Forum komunikasi internal di Pemprov dianggap krusial untuk mencapai tujuan bersama. Pemanfaatan data perumahan, peran serta kabupaten, serta penelitian terkait konsultasi program 3 juta rumah juga dibahas. Sinkronisasi data melalui dashboard PKP menjadi perhatian.

Acara dilanjutkan dengan pembagian desk untuk membahas data yang dibutuhkan, termasuk perumahan, kerjasama dengan asosiasi pengusaha, data rumah swadaya, potensi CSR, status lahan, data RTLH, pendataan perumahan, validasi data desa terkait rumah tidak layak huni, dan akses data sektoral. Pertemuan ditutup dengan undangan untuk pertemuan lanjutan. Pewawancara mengajukan pertanyaan terakhir, yang diharapkan dapat memberikan wawasan komprehensif tentang kegiatan perumahan, pandangan, informasi tentang kualifikasi penerima bantuan, dan mengakhiri diskusi secara baik.

Key Points

1. Pemerintah provinsi memfasilitasi kebutuhan terkait Peraturan Kepala Daerah tentang pembebasan lahan bagi BDN..
2. Provinsi bertanggung jawab dalam penataan rehabilitasi rumah korban bencana, identifikasi lokasi perumahan, termasuk aset provinsi untuk.
3. Provinsi melaksanakan sosialisasi, persiapan rehabilitasi rumah korban bencana, serta donasi untuk penerima bantuan.
4. Pembangunan rumah korban bencana, serta rumah khusus bagi masyarakat terdampak program provinsi, adalah implementasi program.
5. Karena keterbatasan anggaran daerah, beberapa program pembangunan rumah khusus bergantung pada pendanaan negara..
6. Provinsi telah merehabilitasi 181 unit rumah korban dalam 3-4 bulan terakhir sebagai bagian dari program 100 hari Gubernur.
7. Program PSU (Prasarana, Sarana, Utilitas) Perumahan dilaksanakan di seluruh provinsi dengan prioritas daerah.
8. Program BSPS dengan intervensi 50 juta per unit menarik minat pihak lain karena hasilnya memadai.
9. Kabupaten diharapkan mengusulkan program penanganan kawasan kumuh berdasarkan RP3KP, RP2KPKPK, termasuk lingkungan, sanitasi, dan infrastruktur.

10. Pemerintah pusat sedang menggodok pemilahan kewenangan penanganan kawasan kumuh untuk mempermudah intervensi.
11. Program prioritas nasional harus dikawal dalam penganggaran daerah, dan dokumen perumahan dari pusat perlu diperhatikan.
12. Koordinasi diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih program cipta karya dan perumahan di kawasan yang sama.
13. Data kawasan kumuh perlu divalidasi karena ada perbedaan dengan data kabupaten.
14. Sinkronisasi program provinsi dan kabupaten/kota terkait kawasan strategis akan difasilitasi oleh Balai Cipta Karya dan Balai P3KP.
15. Koordinasi dan sinkronisasi program perumahan perlu ditingkatkan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Hari ke-2 (Selasa, 05 Agustus 2025)

Peserta:

1. Kepala BP3KP Sulawesi III Bpk. Bakhtiar, S.ST., M.S.P.
2. Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 1 BP3KP Sulawesi III Ibu Andi Dwi Ayu Permatasari Taufan, S.T., M.M.
3. Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 2 BP2KP Sulawesi III Bpk. Nur Ali, S.T.
4. Kepala Satker PKP Provinsi Sulawesi Tenggara Bpk. Muh. Irsan Basalamah, S.T, M.T.
5. Perwakilan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Bidang Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak Muslimin Makkaraeng Sikki, S.T., MPW., IAI.
6. Para Kepala Dinas yang Membidangi Perumahan di 17 Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Tenggara
7. Para Pejabat Fungsional dan Staf Seksi Wilayah 1 BP3KP Sulawesi 3
8. Para Staf Satker PKP Provinsi Sulawesi Tenggara

Summary

Desk Pembahasan Dukungan Pencapaian Program 3 Juta Rumah Khususnya 1 Juta Rumah di Wilayah Kawasan Pesisir Provinsi Sulawesi Tenggara dihadiri oleh perwakilan dari:

1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Buton;
2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Buton Utara;
3. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Buton Tengah;
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Buton Selatan;

5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Muna;
6. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Muna Barat;
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Wakatobi;
8. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Kolaka;
9. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara;
10. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Konawe Utara;
11. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan;
12. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Konawe Kepulauan;
13. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bombana;
14. Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tenggara;
15. Kepala Seksi Wilayah I BP3KP Sulawesi III.

Telah disepakati beberapa hal sebagai berikut:

Target Penyediaan Perumahan di Wilayah Kawasan Pesisir Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2025 adalah sebanyak 1.330 unit yang terdiri atas:

1. Pemerintah Daerah/APBD sebanyak 771 unit, dengan rincian :
 - a. Selesai terbangun sebanyak 115 unit;
 - b. Proses pembangunan sebanyak 235 unit; dan
 - c. Rencana pembangunan sebanyak 421 unit.
2. Asosiasi Pengembang Perumahan/Developer 383 unit, dengan rincian :
 - a. Selesai terbangun sebanyak 114 unit;
 - b. Proses pembangunan sebanyak 269 unit; dan
 - c. Rencana pembangunan sebanyak 0 unit.
3. Swadaya sebanyak 171 unit, dengan rincian :
 - a. Selesai terbangun sebanyak 112 unit;
 - b. Proses pembangunan sebanyak 20 unit; dan
 - c. Rencana pembangunan sebanyak 39 unit.
4. CSR (Gotong Royong) sebanyak 5 unit, dengan rincian :
 - a. Selesai terbangun sebanyak 5 unit;
 - b. Proses pembangunan sebanyak 0 unit; dan
 - c. Rencana pembangunan sebanyak 0 unit.



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III

Jalan Penjernihan Raya No. 22, Kompleks PDAM, Panaiang, Makassar 90231

DOKUMENTASI

Nama Kegiatan : Sosialisasi Penyelenggaraan Program Perumahan Tahun 2025
Tempat Kegiatan : Rg. Rapat Kantor Satuan Kerja Penyediaan Perumahan
Provinsi Sulawesi Tenggara
Hari, Tanggal Kegiatan : Senin-Selasa, 04-05 Agustus 2025
Waktu Kegiatan : 08.00-16.00 WITA
No. Undangan Kegiatan : UM 0102-Rb14/256

Hari ke-1 (Senin, 04 Agustus 2025)





Hari ke-2 (Selasa, 05 Agustus 2025)







KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

SURAT TUGAS

Nomor : 132 /SPT/Rb14.5/2025

Parko taan

Dalam rangka Percepatan Serahterima Barang Milik Negara (BMN) terhadap Aset PSU TA. 2024 Kota Kendari akan dilaksanakan kunjungan di 10 (sepuluh) lokasi Perumahan Pembangunan PSU Kota Kendari bersama Tim BMN Pemerintah Daerah Kota Kendari, dengan ini kami menugaskan pejabat/staf sebagaimana tercantum dibawah ini untuk melaksanakan tugas/perjalanan dinas dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

No	Pelaksana SPD	Unit Kerja	Periode Perjalanan Dinas	Tujuan	Transportasi	Pembebanan Anggaran
1.	<u>Muh. Irsan Basalamah,ST.,MT</u> NIP. 19870612 201001 1 013	Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra	31 Juli sampai dengan 1 Agustus 2025	Kota Kendari	Transportasi Darat	DIPA Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra TA. 2025
2.	<u>Hamka Thahir. S.Ars</u> NIP. 19820101 201408 1 004					
3.	<u>Ardan Praticta,ST.,MT</u> NRP. F25011992092018001					
4.	<u>Arief Dedy Susanto. SE</u> NRP. F13031988092018001					

Kepada pegawai tersebut di atas agar melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan rincian Surat Tugas dan menyampaikan laporan pelaksanaan perjalanan dinas kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tenggara selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan perjalanan dinas.

Demikian Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kendari, 30 Juli 2025

Kepala Satuan Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sulawesi Tenggara,

MUH. IRSAN BASALAMAH, ST., MT
NIP. 19870612 201001 1 013





LAPORAN PERJALANAN DINAS

Pelaksana Perjalanan Dinas : 1. Muh. Irsan Basalamah, ST., MT.
2. Hamka Thahir, S. Ars.
3. Ardan Praticta, ST., MT.
4. Arief Dedy Susanto, SE.

Tanggal Perjalanan Dinas : 31 Juli sampai dengan 1 Agustus 2025

Tujuan Perjalanan Dinas : Kota Kendari

Keperluan Perjalanan Dinas : Percepatan Serahterima Barang Milik Negara (BMN) terhadap Aset PSU TA. 2024 Kota Kendari akan dilaksanakan kunjungan di 10 (sepuluh) lokasi Perumahan Pembangunan PSU Kota Kendari bersama Tim BMN Pemerintah Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.

I. Pendahuluan

Dalam rangka Percepatan Serahterima Barang Milik Negara (BMN) terhadap Aset PSU TA. 2024 Kota Kendari akan dilaksanakan kunjungan di 10 (sepuluh) lokasi Perumahan Pembangunan PSU Kota Kendari, sebagai berikut:

No.	Pengembang	Nama Perumahan	Lokasi
1.	PT. Margahayu Mega Utama	Margahayu Regency Kambu	Jl. Perjuangan, Kel. Mokoau, Kec. Kambu, Kota Kendari
2.	PT. Karimun Berkah Mandiri	Bukit Madani Permai	Jl. Pesantren Peskil, Anduonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari
3.	PT. Usfadah Nur Empat	Nur Empat	Jl. Nur Empat, Anduonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari
4.	PT. Sahir Proptindo Niaga	Afika Residence	Jl. Chairil Anwar, Kel. Watulondo, Kec. Puuwatu, Kota Kendari
5.	PT. Sahir Proptindo Niaga	Afika Land	Jl. Chairil Anwar, Kel. Watulondo, Kec. Puuwatu, Kota Kendari
6.	PT. Griya Sultra Konstruksi	GKS Residence	BTN GSK Residence, Kel. Puuwatu, Kec. Puuwatu, Kota Kendari
7.	PT. Swarna Dwipa Property	Grand Mangkubumi Residence	: Jl. Chairil Anwar, Kel. Watulondo, Kec. Puuwatu, Kota Kendari
8.	PT. Shifa Isthin Neisya	Griya IB Hasanah	Jl. Chairil Anwar, Kel. Puuwatu, Kec. Puuwatu, Kota Kendari
9.	PT. Shifa Isthin Neisya	Pesona King Adham Residence	Jl. Chairil Anwar, Kel. Watulondo, Kec. Puuwatu, Kota Kendari
10.	PT. Shifa Isthin Neisya	Bumi Anawai Land	Jl. Anawai, Kel. Anawai, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari

II. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan Percepatan Serahterima Barang Milik Negara (BMN) terhadap Aset PSU TA. 2024 Kota Kendari dilaksanakan oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dengan melaksanakan kunjungan lokasi pembangunan PSU TA. 2024, kegiatan ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara berjumlah 4 (empat) orang pada tanggal 31 Juli sampai dengan 1 Agustus 2025 bertempat di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.

Jadwal Kegiatan

Hari / tanggal	Uraian Kegiatan	Keterangan
Kamis, 31 Juli 2025	- Berangkat dari Kantor Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara menuju Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara; - Melaksanakan Koordinasi pelaksanaan percepatan Serahterima Aset Barang Milik Negara (BMN) terhadap Aset PSU TA. 2024 Kota Kendari; - Melaksanakan kunjungan lapangan Pembangunan PSU Kota Kendari bersama Tim Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara; - Kembali ke Kantor Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara.	

Jumat, 1 Agustus 2025	- Berangkat dari Kendari Menuju Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara; - Melaksanakan kunjungan lapangan Pembangunan PSU Kota Kendari bersama Tim Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara; - Kembali ke Kantor Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara.	
-----------------------	--	--

III. Rangkaian Kegiatan

Kegiatan kunjungan lapangan lokasi pembangunan PSU sebagai salah satu rangkaian kegiatan Percepatan Serahterima Barang Milik Negara (BMN) terhadap Aset PSU TA. 2024 Kota Kendari yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan percepatan Serahterima Aset Barang Milik Negara (BMN) terhadap Aset PSU TA. 2024 Kota Kendari;
2. Melakukan kunjungan lapangan pembangunan PSU TA. 2024 Kota Kendari bersama Tim Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara di 10 (sepuluh) lokasi perumahan.

IV. Permasalahan

Kegiatan kunjungan lapangan pembangunan PSU TA. 2024 Kota Kendari bersama Tim Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi

Tenggara adalah tahap pemeriksaan di lapangan dari percepatan serahterima Barang Milik Negara (BMN) terhadap Aset PSU TA. 2024 Kota Kendari sebagai kegiatan verifikasi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara sebelum di tandatanganinya Surat Kesediaan Menerima Hibah oleh Ibu Walikota Kendari.

V. Tindak Lanjut

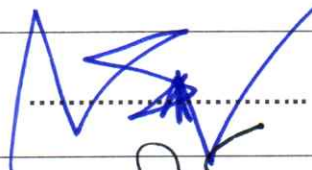
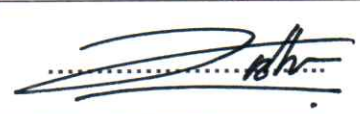
Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah penandatanganan dokumen Surat Kesediaan Menerima Hibah oleh Ibu Walikota Kendari.

VI. Penutup

Demikian laporan kegiatan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendari, 4 Agustus 2025

Yang Melakukan Perjalanan Dinas,

1.	<u>Muh. Irsan Basalamah,ST.,MT.</u> NIP. 19870612 201001 1 013	
2.	<u>Hamka Thahir, S.Ars.</u> NIP. 198201012014081004	
3.	<u>Ardan Praticta,ST.,MT.</u> NRP. F25011992092018001	
4.	<u>Arief Dedy Susanto, SE.</u> NRP. F13031988092018001	

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN



Koordinasi Percepatan Serahterima Aset BMN PSU
Kab. Konsel TA. 2024 Kota Kendari



Koordinasi Percepatan Serahterima Aset BMN
PSU Kab. Konsel TA. 2024 Kota Kendari



Lokasi No. 1, PSU Perumahan Margahayu
Regency Kambu



Lokasi No. 2, PSU Perumahan Bukit Madani
Permai



Lokasi No. 3, PSU Perumahan Nur Empat



Lokasi No. 4, PSU Perumahan Afika Residen

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN



Lokasi No. 5, PSU Perumahan Afika Land



Lokasi No. 6, PSU Perumahan GKS Residen



Lokasi No. 7, PSU Perumahan Grand Mangkubumi Residen



Lokasi No. 8, PSU Perumahan Griya IB Hasanah



Lokasi No. 9, PSU Perumahan Pesona King Adham Residen



Lokasi No. 10, PSU Perumahan Bumi Anawai Land

RAPAT PEMBAHASAN DED ITEM KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH DAWANOWAJO III KABUPATEN BUTON

Hari/tanggal : 08 Agustus 2025

The screenshot shows a Zoom meeting in progress. The main video feed displays a woman wearing a white hijab, glasses, and a headset, identified as 'Dit. Bangkim_Hani'. Above her, a banner lists participants: Sirafin_Satker PKP Sult..., Nurul Kudus DPKP Buton, Sie-1 BP3KP Sulawesi III, Dit. Bangkim, and Muh irsan. To the right, a 'Participants (12)' sidebar lists the following individuals with their status (mute/unmute icons):

- Sirafin_Satker PKP Sultra (Me)
- Dit. Bangkim (Host)
- Dit. Bangkim_Hani
- Nurul Kudus DPKP Buton
- Apsal Tim DED
- Atika Mitzalina
- Dit. Bangkim
- Irda Naila
- Lili-BP3KP Sul 3
- Muh irsan basalamah. ST. MT/ Kasatker PK...

At the bottom of the screen, the Windows taskbar is visible, showing the date and time as 15:17 on 08/08/2025, and the weather in Berawan as 31°C.

zoom Workplace

Muh Irsan basal...

Sirafin_Satker PKP Sult... Nurul Kudus DPKP Buton Sie 1_BP3KP Sulawesi III Muh Irsan basalamah... DIT. BANGKIM

Dit. Bangkim_Hani

Participants (13)

Find a participant

- NK Nurul Kudus DPKP Buton
- AT Apsal Tim DED
- Atika Mitzalina
- R Dit. Bangkim - Rusdi Aufar
- Dit. Bangkim
- Irda Naila
- LS Lili-BP3KP Sul 3
- MI Muh Irsan basalamah. ST. MT/ Kasatker PK...
- M Muhammad Ramli
- S1 Sie 1_BP3KP Sulawesi III

Invite Unmute me Merge to meeting window

Audio Video Participants Chat React Share AI Companion Apps Record Show captions More Leave

31°C Berawan

Search

15:18 08/08/2025

Sirafin_Satker PKP Sult... Nurul Kudus DPKP Buton Sie 1_BP3KP Sulawesi III Dit. Bangkim_Hani Muhammad Ramli Lili-BP3KP Sul 3

WPS AI

File Home Edit Comment Convert Page Fill & Sign Protect Tools Batch Draw WPS AI

Curve Line Line Color Width 2pt Line Color Opacity 70% Eraser Exit

Y = 9389329.7366 3.00 Mtr

-3.00 % Rencana -3.00 %

Laston Lapis Aus Asbuton Butir (AC-BC Asb Butir), t_{bi} = 5 cm
Lapis Pondasi Agregat Kelas A, t_{bi} = 20 cm
Lapis Pondasi Agregat Kelas B, t_{bi} = 20 cm

**TYPICAL RENCANA JALAN ASPAL
SEGMENT 10**
Skala 1 : 35

Navigation [19] Review DED Desa Laburunci-Seg. 10 (19/33) Back to Page 19

1 cm hujan Sabtu

Search

15:34 08/08/2025



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

SURAT TUGAS

Nomor : 1371/SPT/Rb14.5/2025

FAE *Perkotaan*

Dalam rangka menghadiri Undangan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Risiko dan Zona Integritas di Lingkungan BP3KP Sulawesi III, berdasarkan Surat Kepala BP3KP Sulawesi III Nomor UM0102-Rb14/250 tanggal 31 Juli 2025, serta Koordinasi Tindak Lanjut Transisi Satker di Balai P3KP Kalimantan I Pontianak, dengan ini kami menugaskan pejabat/staf sebagaimana tercantum dibawah ini untuk melaksanakan tugas/perjalanan dinas dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

No	Pelaksana SPD	Unit Kerja	Periode Perjalanan Dinas	Tujuan	Transportasi	Pembebanan Anggaran
1	MUH. IRSAN BASALAMAH, S.T.,M.T. NIP. 19870612 201001 1 013 Penata Tingkat I, Gol. III/d Kepala Satuan Kerja	Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra	07 - 11 Agustus 2025	Makassar dan Pontianak	Pesawat Terbang	DIPA Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra

Kepada pegawai tersebut di atas agar melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan rincian Surat Tugas dan menyampaikan laporan pelaksanaan perjalanan dinas kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan perjalanan dinas.

Demikian Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kendari, 06 Agustus 2025

Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara


Muh. Irsan Basalamah, S.T.,M.T.
NIP. 19870612 201001 1 013

Tembusan :

1. Kepala Balai P3KP Sulawesi III;
2. Arsip.



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Pelaksana Perjalanan Dinas : Muh. Irsan Basalamah, S.T.
Tanggal Perjalanan Dinas : 07 - 14 Agustus 2025
Tujuan Perjalanan Dinas : Makassar dan Pontianak
Keperluan Perjalanan Dinas : - Menghadiri Undangan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Risiko dan Zona Integritas di Lingkungan BP3KP Sulawesi III, dan Koordinasi Tindak Lanjut Transisi Satker di Balai P3KP Kalimantan I Pontianak;
- Menghadiri Undangan Rapat Pelaksanaan Kegiatan BSPS, Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah, dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Wilayah III TA 2025.

I. Pendahuluan

Menindaklanjuti Surat Kepala Balai P3KP Sulawesi III Nomor UM0102-Rb14/250 tanggal 31 Juli 2025 Perihal Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Risiko dan Zona Integritas di Lingkungan BP3KP Sulawesi III, Surat Tugas Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 137.1/SPT/Rb14.5/2025 tanggal 06 Agustus 2025 dalam rangka menghadiri Undangan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Risiko dan Zona Integritas di Lingkungan BP3KP Sulawesi III, serta Koordinasi Tindak Lanjut Transisi Satker di Balai P3KP Kalimantan I Pontianak, Surat Plt. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Nomor UM0102 – Pw/99 tanggal 8 Agustus 2025 Perihal Rapat Pelaksanaan Kegiatan BSPS, Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah, dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Wilayah III TA 2025, dan Surat Tugas Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 139.2/SPT/Rb14.5/2025 tanggal 08 Agustus 2025 dalam rangka menghadiri Undangan Rapat Pelaksanaan Kegiatan BSPS, Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah, dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Wilayah III TA 2025, maka dilaksanakan perjalanan dinas ke Makassar dan Pontianak.

II. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Risiko dan Zona Integritas di Lingkungan BP3KP Sulawesi III dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : 07 Agustus 2025:

Tempat : Ruang Rapat Balai P3KP Sulawesi III Makassar

Waktu : 10.00 WITA – Selesai

Koordinasi Tindak Lanjut Transisi Satker di Balai P3KP Kalimantan I dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : 11 Agustus 2025:

Tempat : Balai P3KP Kalimantan I Pontianak

Waktu : 08.00 WIB – Selesai

Rapat Pelaksanaan Kegiatan BSPS, Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah, dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Wilayah III TA 2025 dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Selasa – Kamis, 12 - 14 Agustus 2025:

Tempat : Kantor Balai P3KP Sulawesi III Makassar

III. Kegiatan

Hari / tanggal	Waktu	Keterangan
Kamis, 07 Agustus 2025	Pukul 07:00	Perjalanan dari Kota Kendari ke Kota Makassar
	Pukul 08:00	Tiba di Kota Makassar
	Pukul 10:00	Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Risiko dan Zona Integritas di Lingkungan BP3KP Sulawesi III
Jumat, 08 Agustus 2025	Pukul 11:30	Perjalanan dari Makassar ke Pontianak, Transit di Surabaya
	Pukul 19:30	Tiba di Pontianak
Senin, 11 Agustus 2025	Pukul 08:00	Koordinasi Tindak Lanjut Transisi Satker di Balai P3KP Kalimantan I
	Pukul 13.00	Perjalanan dari Pontianak ke Makassar
	Pukul 19.30	Tiba di Makassar
Selasa, 12 Agustus 2025	Pukul 08.00	Koordinasi ke Balai P3KP Sulawesi III
	Pukul 12.30	Mengikuti Rapat Pelaksanaan Kegiatan BSPS, Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah, dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Wilayah III TA 2025
Rabu, 13 Agustus 2025	Pukul 08.30	Lanjut mengikuti Rapat Pelaksanaan Kegiatan BSPS, Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah, dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Wilayah III TA 2025
Kamis, 14 Agustus 2025	Pukul 08.30	Perjalanan Pulang Menuju Kota Kendari



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Risiko dan Zona Integritas di Lingkungan BP3KP Sulawesi III, dan Koordinasi Tindak Lanjut Transisi Satker di Balai P3KP Kalimantan I Pontianak



Kamis, 07 Agustus 2025

Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Risiko dan Zona Integritas di Lingkungan BP3KP Sulawesi III



Senin, 11 Agustus 2025

Koordinasi Tindak Lanjut Transisi Satker di Balai P3KP Kalimantan I



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

Rapat Pelaksanaan Kegiatan BSPPS, Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah, dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Wilayah III TA 2025



Selasa, 12 Agustus 2025



Rabu, 13 Agustus 2025



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
Jalan Penjernihan Raya No. 22, Kompleks PDAM, Panaikang, Makassar 90231

Nomor : UM0102-Rb14/250
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan
Manajemen Risiko dan Zona Integritas di
lingkungan BP3KP Sulawesi III

Makassar, 31 Juli 2025

Yth. **Daftar terlampir**

di –

Tempat

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Nomor: KU0101-Dt/116, tanggal 25 Juli 2025, perihal Panduan Kegiatan Pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2025, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir serta membawa 1 (satu) orang staf pada Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Risiko dan Zona Integritas di lingkungan BP3KP Sulawesi III yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 7 Agustus 2025
Waktu : 10.00 WITA – selesai
Tempat : Ruang Kepala Balai P3KP Sulawesi III
Link Zoom : Menyusul

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai,

Bakhtiar

NIP. 19711009 200212 1 003

IV. Penutup

Demikian laporan kegiatan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendari, 20 Agustus 2025

Pelaksana Perjalanan Dinas

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name Irsan Basalamah.

Muh. Irsan Basalamah, S.T., M.T.

NIP. 19870612 2010011013

Lampiran

Nomor : UM0102-Rb14/250

Tanggal : 31 Juli 2025

DAFTAR UNDANGAN

1. Kepala Subbag Umum dan Tata Usaha BP3KP Sulawesi III;
2. Kepala Seksi Pelaksana Wilayah I BP3KP Sulawesi III;
3. Kepala Seksi Pelaksana Wilayah II BP3KP Sulawesi III;
4. Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. PPK Satuan Kerja BP3KP Sulawesi III;
7. Bendahara Pengeluaran BP3KP Sulawesi III;
8. PPSPM BP3KP Sulawesi III;
9. PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan;
10. PPK Rumah Swadaya, PSU dan Kawasan Permukiman Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan;
11. Bendahara Pengeluaran Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan;
12. PPSPM Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan;
13. PPK Rumah Swadaya, PSU dan Kawasan Permukiman Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara;
14. Bendahara Pengeluaran Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara;
15. PPSPM Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara.



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Raden Patah 1, Nomor 1, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

Nomor : UM0102-Pw/99
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : **Rapat Pelaksanaan Kegiatan BSPS,
Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah dan
Permukiman Kumuh di Wilayah III TA 2025**

Jakarta, 8 Agustus 2025

Yth. (daftar undangan terlampir)

di Tempat

Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Nomor 134 KPTS/Dp/2025 tentang Lokasi Kabupaten/Kota Kegiatan BSPS Delineasi Pesisir TA 2025 dan Surat Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Nomor CK0301-Pw/183 tanggal 5 Agustus 2025 tentang Perintah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh TA 2025, serta dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dimaksud di Wilayah III, bersama ini dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari/Tanggal : Selasa-Kamis, 12-14 Agustus 2025
Agenda : terlampir
Tempat : Kantor Balai P3KP Sulawesi III

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan, perlu kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Balai dan Satker P3KP diharapkan menyiapkan dokumen pendukung yang dapat diunggah melalui tautan <https://linktr.ee/BangkimWilayah3TA2025>;
2. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdra. Handy (0812 2848 4486) atau Sdri. Saffana (0812 2181 2127).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

Plt. Direktur Pengembangan Kawasan
Permukiman

Ir. Edward Abdurrahman, M.Sc.
NIP. 196508221997031002

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal;
2. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
3. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman (sebagai laporan).

Lampiran I

Nomor : UM0102-Pw/99

Tanggal : 8 Agustus 2025

DAFTAR PENERIMA UNDANGAN

1. Inspektur I;
2. Kepala Biro Pelaksana Barang dan Jasa;
3. Direktur Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan;
4. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman;
5. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I;
6. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II;
7. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III;
8. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku;
9. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I;
10. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II;
11. Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Utara;
12. Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo;
13. Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara;
14. Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tengah;
15. Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat;
16. Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan;
17. Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara;
18. Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku;
19. Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua;
20. Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Barat;
21. PPK Rumah Swadaya, PSU, dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Utara;
22. PPK Rumah Swadaya, PSU, dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo;
23. PPK Rumah Swadaya, PSU, dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara;
24. PPK Rumah Swadaya, PSU, dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tengah;
25. PPK Rumah Swadaya, PSU, dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat;
26. PPK Rumah Swadaya, PSU, dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan;
27. PPK Rumah Swadaya, PSU, dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
28. PPK Rumah Swadaya, PSU, dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku;
29. PPK Rumah Swadaya, PSU, dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua;
30. PPK Rumah Swadaya, PSU, dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Barat.

Lampiran II

Nomor : UM0102-Pw/99

Tanggal : 8 Agustus 2025

Susunan Acara**Rapat Pelaksanaan Kegiatan BSPS, Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah dan Permukiman Kumuh di Wilayah III TA 2025**

Waktu (WITA)	Kegiatan		Narasumber	Moderator
Selasa, 12 Agustus 2025				
12.00 – 13.00	Registrasi			
13.00 – 13.10	Arahan dan Pembukaan	Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman		
13.10 – 13.15	Pembacaan Do'a	Panitia		
Sesi Panel dan Diskusi				
13.15 – 18.00	Mekanisme Pengadaan melalui Lelang Umum untuk kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan <i>e-purchasing</i> untuk Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Kementerian PKP	Kasubdit Wilayah III	
	Program dan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah dan Permukiman Kumuh	Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		
	Petunjuk Teknis Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah dan Permukiman Kumuh	Kasubdit Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman		
	Evaluasi Persiapan Dokumen Lelang Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Sanitasi Rumah	Seluruh Kepala BP3KP		
	Diskusi dan Tanya Jawab Penanggap : 1. Inspektorat Jenderal 2. Direktorat Jenderal TKPR			
Rabu, 13 Agustus 2025				
08.30 – 12.00	Arahan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan BSPS, Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah dan Kawasan Permukiman Kumuh TA 2025	Kasubdit Wilayah III	Farras Handy	
	Progres Kegiatan BSPS TA 2025 Wilayah Sulawesi	BP3KP Sulawesi I BP3KP Sulawesi II BP3KP Sulawesi III		
	Progres Kegiatan BSPS TA 2025 Wilayah Maluku	BP3KP Maluku		
	Progres Kegiatan BSPS TA 2025 Wilayah Papua	BP3KP Papua I BP3KP Papua II		

Waktu (WITA)	Kegiatan	Narasumber	Moderator
	Diskusi dan Tanya Jawab Penanggap : 1. Inspektorat Jenderal 2. Direktorat Jenderal TKPR		
12.00 – 13.00	ISHOMA		
13.00 – 21.00	Expose Hasil Penyusunan DED dan HPS Kawasan Kumuh Gorontalo	Kepala BP3KP Sulawesi I, Kepala Satker Gorontalo,	Ibu Hani
	Expose Hasil Penyusunan DED dan HPS Kawasan Kumuh Maluku Tengah	Kepala BP3KP Maluku, Kepala Satker Maluku	
	Expose Hasil Penyusunan DED dan HPS Kawasan Kumuh Wajo	Kepala BP3KP Sulawesi III, Kepala Satker Sulawesi Selatan	
	Expose Hasil Penyusunan DED dan HPS Kawasan Kumuh Buton	Kepala BP3KP Sulawesi III, Kepala Satker Sulawesi Tenggara	
	Diskusi dan Tanya Jawab Penanggap : 1. Inspektorat Jenderal 2. Direktorat Jenderal TKPR		
Kamis, 14 Agustus 2025			
08.00 – 13.00	Kunjungan Lapangan Lokasi Peningkatan Kualitas Kumuh Wajo	Bangkim, Balai, Satker	PJ : Balai, Pemda
13.00 – 14.00	ISHOMA		
14.00 – 19.00	Perjalanan dari Kawasan Wajo ke Makassar	Bangkim, Balai, Satker	



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

SURAT TUGAS

Nomor : 150.1 /SPT/Rb14.5/2025

Dalam rangka menghadiri Undangan *Workshop* Persiapan Pengadaan Proyek Fisik TA 2025 di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor UM 0102-Sj/959 tanggal 22 Agustus 2025, dan menghadiri Rapat Konsinyering Penyiapan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Sanitasi Rumah Tahun 2025 sesuai Surat Plt. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Nomor UM0102-Pw/117 tanggal 25 Agustus 2025, dengan ini kami menugaskan pejabat/staf sebagaimana tercantum dibawah ini untuk melaksanakan tugas/perjalanan dinas dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

No	Pelaksana SPD	Unit Kerja	Periode Perjalanan Dinas	Tujuan	Transportasi	Pembebanan Anggaran
1	MUH. IRSAN BASALAMAH, S.T.,M.T. NIP. 19870612 201001 1 013 Kepala Satuan Kerja	Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra	25 – 28 Agustus 2025	Jakarta	Pesawat Terbang	DIPA Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra
2	LILI DAMAYANTO, S.T. NIP. 198709072010011008 PPK Rumah Swadaya, PSU dan Kawasan Permukiman					
3	MUHTAR MUSTAFA, S.T.,M.T. NIP. 19750719 201408 1 002 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					
4	LAODE SIRAFIN SARINI, S.T. NIP. 199107252024211003 Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama					

Kepada pegawai tersebut di atas agar melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan rincian Surat Tugas dan menyampaikan laporan pelaksanaan perjalanan dinas kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan perjalanan dinas.

Demikian Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kendari, 25 Agustus 2025

Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara



Muh. Irsan Basalamah, S.T.,M.T.
NIP. 19870612 201001 1 013

Tembusan :

1. Kepala Balai P3KP Sulawesi III;
2. Arsip.



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Pelaksana Perjalanan Dinas : Muh. Irsan Basalamah, S.T., M.T.
Tanggal Perjalanan Dinas : 26 – 27 Agustus 2025
Tujuan Perjalanan Dinas : Jakarta
Keperluan Perjalanan Dinas : Menghadiri Undangan Rapat di Jakarta

V. Pendahuluan

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor UM 0102-Sj/959 tanggal 22 Agustus 2025 perihal *Workshop* Persiapan Pengadaan Proyek Fisik TA 2025 di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Surat Plt. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Nomor UM0102-Pw/117 tanggal 25 Agustus 2025 perihal Rapat Konsinyering Penyiapan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Sanitasi Rumah Tahun 2025, maka dilaksanakan perjalanan dinas ke Jakarta selama Empat hari.

VI. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan *Workshop* Persiapan Pengadaan Proyek Fisik TA 2025 di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Senin – Selasa, 25 – 26 Agustus 2025 (tidak sesuai jadwal dalam surat undangan)

Tempat : Gedung Aula Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta

Waktu : 13.00 WIB – Selesai

Rapat Konsinyering Penyiapan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Sanitasi Rumah Tahun 2025 dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Selasa – Rabu, 26 – 27 Agustus 2025

Tempat : Balai P3KP Jawa I, Gedung Wisma Karya, Kota Jakarta Selatan

Waktu : 09.00 WIB – Selesai

VII. Histori Kegiatan

Hari / tanggal	Waktu	Keterangan
Senin, 25 Agustus 2025	Pukul 07:00	Perjalanan dari Kota Kendari ke Kota Jakarta
	Pukul 09:30	Tiba di Jakarta, Lanjut menuju lokasi acara di Gedung Aula Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta

	Pukul 13:00	Mengikuti rangkaian Pembukaan acara <i>Workshop</i> Persiapan Pengadaan Proyek Fisik TA 2025 di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman hari Pertama
	Pukul 14:00 – 17:30	Mengikuti materi hari pertama meliputi: - Pengenalan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Sistem Informasi Pengadaan - Strategi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Perencanaan Pengadaan dan Rencana Umum Pengadaan (RUP) - Titik Kritis Audit pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Pencegahan Korupsi di Bidang PBJ dan Analisis Resiko PBJ - Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
	Pukul 17:35	Penutupan kegiatan hari pertama
	Pukul 19:30	Perjalanan menuju hotel, makan malam, lalu istirahat
Selasa, 26 Agustus 2025	Pukul 08:00	Perjalanan menuju Lokasi Acara Konsinyering Penyiapan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Sanitasi Rumah Tahun 2025 di Balai P3KP Jawa I
	Pukul 08:30 – 17:00	Mengikuti Acara Konsinyering Penyiapan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Sanitasi Rumah Tahun 2025
	Pukul 17:15	Penutupan Acara
	Pukul 17:30	Perjalanan Menuju hotel, Makan malam Lalu Istirahat
Rabu, 27 Agustus 2025	Pukul 05.55	Perjalanan pulang menuju Kendari
	Pukul 10.00	Tiba di Kota Kendari
	Pukul 11:00	Melanjutkan kegiatan di Kota Kendari, mendampingi Ibu Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan melakukan kunjungan di kota Kendari

VIII. Penutup

Demikian laporan kegiatan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendari, 01 September 2025

Pelaksana Perjalanan Dinas

MUH. IRSAN BASALAMAH, S.T.,M.T.
NIP. 19870612 201001 1 013



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

Workshop Persiapan Pengadaan Proyek Fisik TA 2025 di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman



Senin, 25 Agustus 2025



Selasa, 26 Agustus 2025



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Raden Patah 1, Nomor 1, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110

Nomor : UM0102-Pw/117
Sifat : Penting
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Konsinyering Penyiapan Dokumen Pengadaan
Barang/Jasa Kegiatan Peningkatan Kualitas
Permukiman Kumuh dan Sanitasi Rumah
Tahun 2025

Jakarta, 25 Agustus 2025

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)
di Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Sanitasi Rumah Tahun 2025 serta dalam rangka menindaklanjuti arahan Bapak Direktur Jenderal Kawasan Permukiman pada hari Jumat, 22 Agustus 2025 agar Balai P3KP dan Satker terkait segera mempercepat proses pengadaan barang/jasa kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Sanitasi Rumah, bersama ini dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir, pada :

Hari/Tanggal : Selasa s/d Rabu, 26 s/d 27 Agustus 2025
Waktu : (Susunan Acara Terlampir)
Tempat : Kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa I, Gedung Wisma Karya, Jl. Wijaya I No 57-59, RT.9/RW.5, Petogogan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan
Agenda Acara : Konsinyering Penyiapan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Sanitasi Rumah TA 2025
Pimpinan Rapat : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Kami sampaikan bahwa panitia menyediakan tempat acara dan konsumsi selama penyelenggaraan kegiatan, sedangkan biaya perjalanan dinas disediakan oleh masing-masing unit kerja. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Narahubung kami, Sdr. Dimas (089663834095).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman



Ir. Edward Abdurrahman, M.Sc.
NIP 196508221997031002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
4. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman
5. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan
6. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan
7. Sekretaris Direktorat Jenderal

Lampiran I

Nomor : UM0102-Pw/117

Tanggal : 25 Agustus 2025

DAFTAR PEJABAT PENERIMA UNDANGAN

1. Inspektur I, Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Direktur Sistem Efisiensi dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
4. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman;
5. Kasubdit Perencanaan Teknis Pengembangan Kawasan Permukiman;
6. Kasubdit Wilayah I;
7. Kasubdit Wilayah II;
8. Kasubdit Wilayah III;
9. Kepala Balai P3KP Sumatera I;
10. Kepala Balai P3KP Sumatera III;
11. Kepala Balai P3KP Sumatera V;
12. Kepala Balai P3KP Kalimantan I;
13. Kepala Balai P3KP Kalimantan II;
14. Kepala Balai P3KP Jawa I;
15. Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara I;
16. Kepala Balai P3KP Sulawesi I;
17. Kepala Balai P3KP Sulawesi III;
18. Kepala Balai P3KP Maluku;
19. Kepala Balai P3KP Papua I.
20. Kepala Satker P3KP Provinsi Aceh;
21. Kepala Satker P3KP Provinsi Sumatera Barat;
22. Kepala Satker P3KP Provinsi Riau;
23. Kepala Satker P3KP Provinsi Sumatera Selatan;
24. Kepala Satker P3KP Provinsi Kalimantan Barat;
25. Kepala Satker P3KP Provinsi Kalimantan Utara;
26. Kepala Satker P3KP Provinsi DKI Jakarta;
27. Kepala Satker P3KP Provinsi Jawa Barat;
28. Kepala Satker P3KP Provinsi Nusa Tenggara Barat;
29. Kepala Satker P3KP Provinsi Sulawesi Tenggara;
30. Kepala Satker P3KP Provinsi Sulawesi Selatan;
31. Kepala Satker P3KP Provinsi Gorontalo;
32. Kepala Satker P3KP Provinsi Maluku;
33. Kepala Satker P3KP Provinsi Papua;
34. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh;
35. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat;
36. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Riau;
37. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan;
38. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat;
39. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara;
40. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Jakarta;

41. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat;
42. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat;
43. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara;
44. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan;
45. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo;
46. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku;
47. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Papua.

Lampiran II

Nomor : UM0102-Pw/117

Tanggal : 25 Agustus 2025

Susunan Acara**Konsinyering Penyiapan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Sanitasi Rumah Tahun 2025**

Waktu (WIB)	Kegiatan	Narasumber	Moderator
Selasa, 26 Agustus 2025			
08.00-09.00	Registrasi Peserta		
09.00-09.05	Menyanyikan Lagu Kebangsaan	Panitia	
09.05-09.20	Arahan dan Pembukaan	Dirjen Kawasan Permukiman	
09.20-09.30	Pembacaan Doa	Panitia	
Sesi Panel			
09.30-10.00	Pengantar Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kumuh dan Sanitasi Rumah Tahun 2025	Plt. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman	Kasubdit Perencanaan Teknis
10.00-10.30	Diskusi dan Tanya Jawab		
Sesi Desk			
10.30-12.30	Penyiapan Dokumen Pengadaan oleh masing-masing Satker	Desk I Satker dan PPK di Wilayah I	Para Kasubdit Wilayah
		Desk II Satker dan PPK di Wilayah II	
		Desk III Satker dan PPK di Wilayah III	
12.30-13.30	ISOMA	Seluruh Peserta	
13.30-17.00	Penyiapan Dokumen Pengadaan oleh masing-masing Satker (Lanjutan)	Desk I Satker dan PPK di Wilayah I	Para Kasubdit Wilayah
		Desk II Satker dan PPK di Wilayah II	
		Desk III Satker dan PPK di Wilayah III	
Rabu, 27 Agustus			
Sesi Desk			
09.00-12.00	Penyiapan Dokumen Pengadaan oleh masing-masing Satker (Lanjutan)	Desk I Satker dan PPK di Wilayah I	Para Kasubdit Wilayah
		Desk II Satker dan PPK di Wilayah II	
		Desk III Satker dan PPK di Wilayah III	
12.00-selesai	Penutupan	Plt. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman	



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SEKRETARIAT JENDERAL

Wisma Mandiri 2, Jl. Kebon Sirih No.83, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta 10340

Nomor : UM 0102-Sj/959
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Undangan *Workshop* Persiapan Pengadaan
Proyek Fisik TA 2025 di Lingkungan Kementerian
Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jakarta, 22 Agustus 2025

Yth. (daftar terlampir)

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan ini kami akan menyelenggarakan kegiatan *Workshop* Persiapan Pengadaan Proyek Fisik TA 2025 di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin – Rabu, 25 – 27 Agustus 2025

Waktu : 09.00 WIB – selesai

Tempat : **Gedung Aula Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta**

Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.10, RT.3/RW.1,

Senen, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10410

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengundang Inspektur di lingkungan Inspektorat Jenderal, Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktur dari unit organisasi teknis, Kepala BP3KP, Kepala Satker PKP, PPK, satu Personel Pokja yang diusulkan dari BP3KP dan unit organisasi teknis, agar hadir pada kegiatan *Workshop* dimaksud sebagaimana susunan acara terlampir.

Adapun hal yang perlu dipersiapkan dan diperhatikan pada saat pelaksanaan *Workshop* sebagai berikut:

1. PPK menyiapkan dan membawa Dokumen Persiapan Pengadaan (Spesifikasi Teknis/KAK/DED, HPS, dan Rancangan Kontrak) pada Pengadaan Proyek Fisik TA 2025.
2. KPA dan PPK memastikan bahwa masing-masing telah memiliki akun SiRUP dan SPSE yang akan digunakan pada kegiatan *Workshop* dimaksud.
3. Personel Pokja menyiapkan konsep Model Dokumen Pengadaan (MDP).



4. Sebagai pengetahuan awal, diharapkan peserta *Workshop* agar membaca dan memahami panduan dan regulasi dalam Pengadaan Barang/Jasa yang dapat diakses melalui tautan berikut: bit.ly/Panduan-RegulasiPBJ
5. Diharapkan Saudara/i dapat mengkonfirmasi kehadiran dengan mengisi tautan berikut: <https://bit.ly/FormulirKonfirmasiKehadiran-WorkshopPBJ>
6. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdra. Akbar (08156048228) atau Sdri. Isma (085172028094).

Bagi peserta yang berasal dari UPT, transportasi dan akomodasi selama kegiatan *workshop* diatur secara mandiri. Akomodasi yang ditanggung oleh pihak penyelenggara, yaitu penginapan selama 2 (dua) malam (1 kamar untuk 2 orang). Biaya yang dikeluarkan dapat direimburse kepada pihak penyelenggara, sesuai dengan ketentuan dan daftar peserta yang tercantum dalam undangan. Selama kegiatan, penyelenggara menyediakan konsumsi bagi peserta.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Didyk Choiroel, S.Sos., M.Si
NIP 196911101996031001

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal
2. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman
3. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan
4. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan
5. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Lampiran I Surat Undangan *Workshop*
Persiapan Pengadaan Proyek Fisik TA
2025 di Lingkungan Kementerian
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Nomor : UM 0102-Sj/959
Tanggal : 22 Agustus 2025

DAFTAR PENERIMA UNDANGAN

1. Inspektur I, Inspektorat Jenderal;
2. Inspektur II, Inspektorat Jenderal;
3. Inspektur III, Inspektorat Jenderal;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama;
5. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana;
6. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
7. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
8. Kepala Biro Umum;
9. Kepala Biro Hukum;
10. Kepala Biro Komunikasi Publik;
11. Kepala Pusat Data dan Informasi;
12. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia;
13. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman;
14. Direktur Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman;
15. Direktur Pembangunan Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan;
16. Direktur Pembangunan Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan;
17. Direktur Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi, Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko;
18. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II;
19. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III;
20. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V;
21. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I;
22. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II;
23. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I;
24. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II;
25. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I;
26. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara II;
27. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I;
28. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III;
29. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku;
30. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I;
31. Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara;
32. Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat;
33. Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau;
34. Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan;
35. Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat;
36. Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan;
37. Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;
38. Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat;
39. Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat;

40. Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur;
41. Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara;
42. Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan;
43. Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo;
44. Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku;
45. Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua;
46. Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Barat;
47. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara;
48. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat;
49. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau;
50. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan;
51. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat;
52. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan;
53. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;
54. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat;
55. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat;
56. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur;
57. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara;
58. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan;
59. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo;
60. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku;
61. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua;
62. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Barat;
63. PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat;
64. PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat;
65. PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua;
66. Satu Personel Pokja yang Telah Diusulkan oleh Sekretariat Jenderal/Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
67. Satu Personel Pokja yang Telah Diusulkan oleh Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman;
68. Satu Personel Pokja yang Telah Diusulkan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan;
69. Satu Personel Pokja yang Telah Diusulkan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan;
70. Satu Personel Pokja yang Telah Diusulkan oleh Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;

71. Satu Personel Pokja yang Telah Diusulkan oleh BP3KP Sumatera II;
72. Satu Personel Pokja yang Telah Diusulkan oleh BP3KP Sumatera III;
73. Satu Personel Pokja yang Telah Diusulkan oleh BP3KP Sumatera V;
74. Satu Personel Pokja yang Telah Diusulkan oleh BP3KP Kalimantan II;
75. Satu Personel Pokja yang Telah Diusulkan oleh BP3KP Jawa I;
76. Satu Personel Pokja yang Telah Diusulkan oleh BP3KP Jawa II;
77. Satu Personel Pokja yang Telah Diusulkan oleh BP3KP Jawa III;
78. Satu Personel Pokja yang Telah Diusulkan oleh BP3KP Nusa Tenggara I;
79. Satu Personel Pokja yang Telah Diusulkan oleh BP3KP Nusa Tenggara II;
80. Satu Personel Pokja yang Telah Diusulkan oleh BP3KP Sulawesi I;
81. Satu Personel Pokja yang Telah Diusulkan oleh BP3KP Sulawesi III;
82. Satu Personel Pokja yang Telah Diusulkan oleh BP3KP Maluku;
83. Satu Personel Pokja yang Telah Diusulkan oleh BP3KP Papua I.

Lampiran II Surat Undangan *Workshop*
 Persiapan Pengadaan Proyek Fisik TA
 2025 di Lingkungan Kementerian
 Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Nomor : UM 0102-Sj/959
 Tanggal : 22 Agustus 2025

**SUSUNAN ACARA WORKSHOP PERSIAPAN PENGADAAN PROYEK FISIK TA 2025
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Hari ke-1 : Senin, 25 Agustus 2025

No.	Waktu	Durasi (Menit)	Materi	Narasumber	Keterangan
1	12:00 - 13:30	90	Registrasi Peserta disertai Makan Siang	BIRO PBJ	
2	13:30 - 13:35	5	Pembukaan Acara	MC	
3	13:35 - 13:40	5	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Seluruh Peserta	
4	13:40 - 13:45	5	Pembacaan Doa	BIRO PBJ	
5	13:45 - 13:50	5	Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Workshop	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
6	13:50 - 14:05	15	Sambutan Pembukaan Workshop Persiapan Pengadaan Proyek Fisik TA 2025 di Lingkungan Kementerian PKP	Sekretaris Jenderal	
7	14:05 - 15:35	90	Sesi Panel-1 <u>Biro PBJ:</u> "Pengenalan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Sistem Informasi Pengadaan" <u>LKPP:</u> "Strategi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" <u>Kementerian Keuangan:</u> "Perencanaan Pengadaan dan Rencana Umum Pengadaan (RUP)"		
8	15:35 - 16:00	30	Istirahat Sholat		
9	16:00 - 17:30	90	Sesi Panel-2 <u>Inspektorat Jenderal:</u> "Titik Kritis Audit pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" <u>Ditjen TKPR:</u> "Pencegahan Korupsi di Bidang PBJ dan Analisis Resiko PBJ" <u>BPKP:</u> "Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah"		

No.	Waktu	Durasi (Menit)	Materi	Narasumber	Keterangan
10	17:30 - 17:35	5	Penutupan Kegiatan Hari Ke-1 dan Penyampaian Persiapan Kegiatan hari Ke-2		

Hari Ke-2 : Selasa, 26 Agustus 2025

No.	Waktu	Durasi (Menit)	Materi	PIC	Keterangan
1	08:00 - 09:00	60	Registrasi Peserta & Pembukaan Hari ke 2	BIRO PBJ	
2	09:00 - 09:45	45	Sesi Panel-3 Arahan Kepala Biro dan Kepala Pusat di Sekretariat Jenderal Kementerian PKP - Pusat PSDM - Pusat Data dan Informasi - Biro Perencanaan dan Kerja Sama - Biro Umum - Biro Keuangan dan BMN - Biro Hukum - Biro SDMO - Biro Komunikasi Publik		
3	09:45 - 10:30	45	Sesi Panel-4 Arahan Direktorat Teknis - Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan - Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan - Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman		
4	10:30 - 12:00	90	Praktek Pembuatan ID RUP pada SIRUP	BIRO PBJ, Ditjen Teknis	
5	12:00 - 13:30	90	ISHOMA (Istirahat Sholat Makan)		
6	13:30 - 15:00	90	Pendampingan Penyusunan Dokumen Persiapan Pengadaan dan Dokumen Pemilihan Penyedia	BIRO PBJ, Ditjen Teknis	
7	15:00 - 15:30	30	Pendampingan Simulasi Siklus Pengadaan Barang/Jasa	BIRO PBJ	
8	15:30 - 16:00	30	Istirahat Sholat		
9	16:00 - 17:00	60	Pendampingan Simulasi Siklus Pengadaan Barang/Jasa	BIRO PBJ	
10	17:00 - 17:05	5	Penutupan Kegiatan Hari Ke-2 dan Penyampaian Persiapan Kegiatan hari Ke-3	BIRO PBJ	

Hari ke-3 : Rabu, 27 Agustus 2025

No.	Waktu	Durasi (Menit)	Materi	Narasumber	Keterangan
1	08:00 - 09:00	60	Registrasi Peserta & Pembukaan Hari ke 3	BIRO PBJ	
2	09:00 - 10:00	60	Reviu - Praktek Pembuatan ID RUP pada SIRUP - Pendampingan Penyusunan Dokumen Persiapan Pengadaan dan Dokumen Pemilihan Penyedia - Pendampingan Simulasi Siklus Pengadaan Barang/Jasa		

No.	Waktu	Durasi (Menit)	Materi	Narasumber	Keterangan
3	10:00 - 11:00	60	Kesimpulan dan Tindak Lanjut Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
4	11:00 - 12:00	60	Penutupan Kegiatan Workshop Persiapan Pengadaan Proyek Fisik TA 2025 di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

SURAT TUGAS

Nomor : 151.1 /SPT/Rb14.5/2025

FAE *petra*

Dalam rangka menghadiri Undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI, sesuai Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor UM102-Sj/1024 tanggal 06 September 2025, dengan ini kami menugaskan pejabat sebagaimana tercantum dibawah ini untuk melaksanakan tugas dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

No	Pelaksana SPD	Unit Kerja	Periode Tugas	Tujuan	Transportasi	Pembebanan Anggaran
1.	MUH. IRSAN BASALAMAH, S.T.,M.T. 19870612 201001 1 013 Penata Tingkat I, Gol. III/d Kepala Satuan Kerja	Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra	08 – 10 September 2025	Jakarta	Pesawat Terbang	DIPA Satker PKP Prov. Sultra TA 2025

Demikian Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kendari, 08 September 2025

Kepala Satuan Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sulawesi Tenggara



Muh. Irsan Basalamah, S.T.,M.T.
NIP. 19870612 201001 1 013

Tembusan :

1. Kepala Balai P3KP Sulawesi III;
2. Arsip.



LAPORAN PERJALANAN DINAS

Pelaksana Perjalanan Dinas : Muh. Irsan Basalamah, S.T.
Tanggal Perjalanan Dinas : 09 - 10 September 2025
Tujuan Perjalanan Dinas : Jakarta
Keperluan Perjalanan Dinas : Menghadiri Undangan Rapat Dengar Pendapat
Komisi V DPR RI terkait Pendalaman Pembahasan
RKA-K/L dalam RAPBN Tahun 2026

I. Pendahuluan

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor UM102-Sj/1024 tanggal 06 September 2025 Perihal Perubahan Jadwal Undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI, dan Surat Tugas Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 159.1/SPT/Rb14.5/2025 tanggal 08 September 2025 dalam rangka menghadiri Undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI, sesuai Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor UM102-Sj/1024 tanggal 06 September 2025, maka dilaksanakan perjalanan dinas ke Jakarta.

II. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Selasa, 09 September 2025

Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI,
Gedung Nusantara, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta

Waktu : 13.00 WIB – Selesai

III. Histori Kegiatan

Hari / tanggal	Waktu	Keterangan
Selasa, 09 September 2025	Pukul 08:00	Perjalanan dari Kota Kendari ke Jakarta
	Pukul 09:50	Tiba di Jakarta, langsung menuju ke lokasi acara di Gedung DPR RI
	Pukul 13:00	Mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI tentang Pendalaman Pembahasan RKA-K/L dalam RAPBN Tahun 2026

Rabu, 10 September 2025	Pukul 05:00	Perjalanan Pulang Menuju Kota Kendari
	Pukul 10:00	Tiba di Kota Kendari

IV. Penutup

Demikian laporan kegiatan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendari, 11 September 2025

Pelaksana Perjalanan Dinas



Muh. Irsan Basalamah, S.T., M.T.

NIP. 19870612 2010011013



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI



Selasa, 09 September 2025
Suasana Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SEKRETARIAT JENDERAL

Wisma Mandiri 2, Jl. Kebon Sirih No.83, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta 10340

Nomor : UM0102-Sj/1024
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) Berkas
Hal : Perubahan Jadwal Undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI

Jakarta, 06 September 2025

Yth. (terlampir)
di Tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Nomor UM0102-Sj/1007 tanggal 3 September 2025 perihal Undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI, bersama ini kami sampaikan **perubahan jadwal pelaksanaan RDP dengan Unit Organisasi Eselon I Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait Pendalaman Pembahasan RKA-K/L dalam RAPBN Tahun 2026**, dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Selasa, 9 September 2025
Waktu : 13.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI
Gedung Nusantara, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta
Acara : Pendalaman Pembahasan RKA-K/L dalam RAPBN Tahun 2026
Dress Code : Batik Lengan Panjang

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada seluruh undangan sebagaimana terlampir agar dapat hadir tepat waktu.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal Kementerian
Perumahan dan Kawasan Permukiman



Didyk Choiroel, S.Sos., M.Si
NIP. 197104161992011001



Lampiran I Surat Sekretaris Jenderal

Nomor : UM0102-Sj/1024

Tanggal : 06 September 2025

DAFTAR UNDANGAN

1. Para Pejabat Tinggi Madya
2. Para Staf Ahli Menteri
3. Para Staf Khusus Menteri
4. Para Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Lampiran II Surat Sekretaris Jenderal

Nomor : UM0102-Sj/1024

Tanggal : 06 September 2025



**JADWAL ACARA KOMISI V DPR RI MASA SIDANG I
TAHUN SIDANG 2025 - 2026
TANGGAL 8 -15 SEPTEMBER 2025**

NO	HARI/TGL/JAM	JENIS RAPAT/ACARA	KET
1.	Senin, 8 September 2025 Pukul 10.00 - selesai	RAKER DAN RDP DGN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL SERTA KEPALA BNPP/BASARNAS Acara: 1. Pembahasan RKA-K/L 2026 Berdasarkan Nota Keuangan dalam RAPBN 2026 2. Penetapan RKA-K/L Tahun 2026 3. Pendalaman Pembahasan RKA-K/L dalam RAPBN TA 2026 dengan Unit Organisasi Eselon 1 masing-masing K/L	
2.	Selasa, 9 September 2025	RAPAT PARIPURNA	
	Pukul 13.00 - selesai	RDP DGN UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, KEMENTERIAN TRANSMIGRASI, SERTA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA (BMKG) Acara: Pendalaman Pembahasan RKA-K/L dalam RAPBN TA 2026 dengan Unit Organisasi Eselon 1 masing-masing K/L	
3.	Rabu, 10 September 2025 Pukul 10.00 - selesai	RDP DGN UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Acara: Pendalaman Pembahasan RKA-K/L dalam RAPBN TA 2026 dengan Unit Organisasi Eselon 1 Kementerian Perhubungan	
4.	Kamis, 11 September 2025 Pukul 10.00 - selesai	RDP DGN UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Acara: Pendalaman Pembahasan RKA-K/L dalam RAPBN TA 2026 dengan Unit Organisasi Eselon 1 Kementerian Pekerjaan Umum	
5.	Jumat, 12 September 2025		
6.	Sabtu, 13 September 2025		
7.	Minggu, 14 September 2025		
8.	Senin, 15 September 2025 Pukul 13.00	RAKER SELURUH MITRA KERJA KOMISI V ACARA : PENETAPAN HASIL PENYESUAIAN RKA-K/L TAHUN 2026 MITRA KERJA KOMISI V SESUAI HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN	

**RAPAT ARAHAN DAN EVALUASI PROGRAM KERJA PADA BALAI DAN SATUAN KERJA
KEMENTERIAN PKP**

Hari/Tangga : 10 September 2025

Catatan :

1. Untuk pendataan ini ada PICnya dari pusat, akan berkoordinasi dengan Balai dan Satker
2. Pendataan rumah mencakup, FLPP, Rumah tapak, Rusun, Rusus
3. Data dilengkapi dengan BNBA, diinput melalui dashboar my pkp oleh Balai dan PIC pusat
4. Tugas Satker dan balai memfasilitasi pengumpulan data dari pemda dan FLPP dan CSR
5. Progres pendataan akan dievaluasi setiap minggu

hadi djkp Sumatera V Mickhael _B3PK... VIII_42_Anisa Pr...

Leo_Papua I BP3KP Jawa 3_S... DIt. Binus DJKP AndIAyu Shilvia S

SATKER P2KP N... Timothy - PKP Ditjen Perumdes Kurniawan Budi...

h

hadi djkp

Participants (156)

Find a participant

- Muh. Irsan Basalamah_KaSatker PKP ... (Me)
- Muhammad Rafi Novianto_Direktor... (Host)
- affi
- staff- yusuf
- YULITA SURYA BUANA, ST.MM

Invite Unmute me Merge to meeting window

31°C Cerah 11:17 10/09/2025



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

SURAT TUGAS

Nomor : 161.1/SPT/Rb14.5/2025

PAE Kota

Dalam rangka menghadiri Undangan Temu Muka Bersama Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan menghadiri acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPR), dengan ini kami menugaskan pejabat sebagaimana tercantum dibawah ini untuk melaksanakan tugas dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

No	Pelaksana SPD	Unit Kerja	Periode Tugas	Tujuan	Transportasi	Pembebanan Anggaran
1.	<u>MUH. IRSAN BASALAMAH, S.T.,M.T.</u> 19870612 201001 1 013 Penata Tingkat I, Gol. III/d Kepala Satuan Kerja	Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra	11 – 14 September 2025	Makassar	Pesawat Terbang	DIPA Satker PKP Prov. Sultra TA 2025

Demikian Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kendari, 10 September 2025

Kepala Satuan Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sulawesi Tenggara



Muh. Irsan Basalamah, S.T.,M.T.
NIP. 19870612 201001 1 013

Tembusan :

1. Kepala Balai P3KP Sulawesi III;
2. Arsip.



LAPORAN PERJALANAN DINAS

Pelaksana Perjalanan Dinas : Muh. Irsan Basalamah, S.T.
Tanggal Perjalanan Dinas : 11 - 12 September 2025
Tujuan Perjalanan Dinas : Jakarta
Keperluan Perjalanan Dinas : Menghadiri Undangan Temu Muka Bersama Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Acara Sosialisasi Kredit Progam Perumahan (KPR)

I. Pendahuluan

Menindaklanjuti Undangan Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai P3KP Sulawesi III tanggal 11 September perihal Temu Muka Bersama Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Undangan Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan Nomor UM 0102-Kd/82 tanggal 11 September 2025 perihal Sosialisasi Kredit Progam Perumahan (KPR), maka dilaksanakan perjalanan dinas ke makassar.

II. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- a. Temu Muka Bersama Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Kamis, 11 September 2025

Tempat : Kota Makassar,

Waktu : 18.00 WITA – Selesai (Acara dimajukan dari jadwal undangan)

- b. Sosialisasi Kredit Progam Perumahan (KPR) dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Sabtu, 13 September 2025

Tempat : Ballroom Sandeq, Hotel Claro

Jl. A.P. Patterani No. 03, Mannuruki, Kec. Tamalate, Kota Makassar

Waktu : 13.00 WIB – Selesai

III. Histori Kegiatan

Hari / tanggal	Waktu	Keterangan
Kamis, 11 September 2025	Pukul 15:00	Perjalanan dari Kota Kendari ke Makassar
	Pukul 17:00	Tiba di Makassar, langsung menuju ke lokasi acara

	Pukul 18:00 - selesai	Menghadiri acara temu muka bersama Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Warung Makna Coto Lontara Makassar
Jumat, 12 September 2025	Pukul 07:00	Perjalanan menuju Balai P3KP Sulawesi III
	Pukul 07:30	Koordinasi di Balai P3KP Sulawesi III persiapan kunjungan Pak Menteri PKP ke kawasan kumuh Waringtapparean Kabupaten Wajo
Sabtu, 13 September 2025	Pukul 08:00	Mengikuti acara Sosialisasi Kredit Progam Perumahan (KPR)
	Pukul 18:00	Istirahat
Minggu, 14 September 2025	Pukul 06:30	Perjalanan pulang menuju Kota Kendari
	Pukul 08:10	Tiba di Kota Kendari

IV. Penutup

Demikian laporan kegiatan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendari, 15 September 2025

Pelaksana Perjalanan Dinas



Muh. Irsan Basalamah, S.T., M.T.

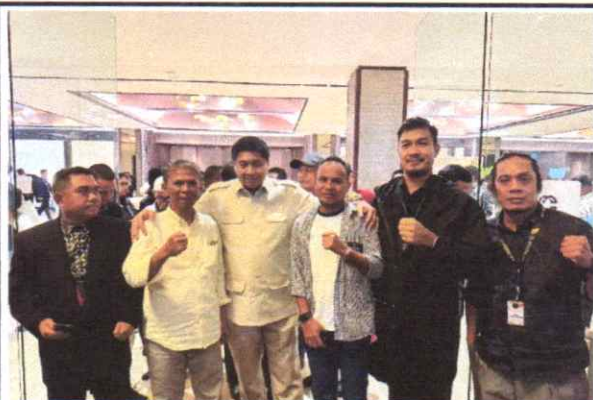
NIP. 19870612 2010011013



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

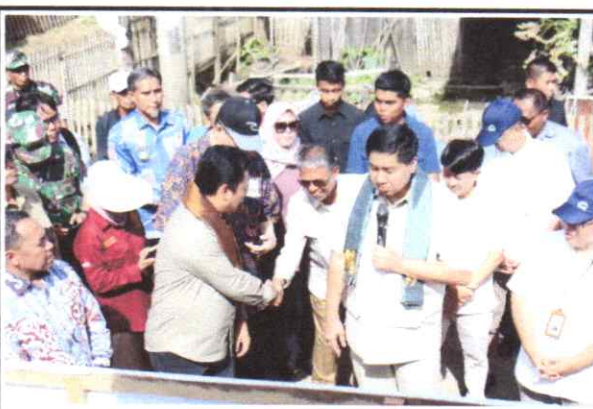
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

TEMU MUKA DENGAN BAPAK MENTERI PKP, & ACARA SOSIALISASI KREDIT PROGRAM PERUMAHAN



Kamis, 11 September 2025

Temu Muka dengan Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman



Jumat, 12 September 2025

Kunjungan ke kawasan kumuh Wiringtapparean Kabupaten Wajo



Sabtu, 13 September 2025

Acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan

UNDANGAN VIA WHATSAPP



BALAI P3KP SULAWESI III

Achmad, ALFRENS, Ardhan, Ardi, Arief, Bu, Bu, Bu, Bu, Bu, Bu, bu, Bu, BU...



BU RATNA KEPALA SEKSI BALAI

Yth,

Seluruh jajaran Balai P3KP Sulawesi III

Dengan hormat,

Mengundang bapak/ibu saudara/i, ad2 sklian utk temu muka dgn bapak Menteri PKP,



Hari : Kamis, 11 September 2025

Pukul : 21.00, (diharapkan bersiap Pukul: 20.00)

Venue : akan disampaikan kemudian

Terima kasih 🙏❤️

10.12

Daftar pegawai yg Menghadiri Temu muka Menteri PKP

1. Kabalai
2. Kasatker Sulsel
3. Kasatker Sultra
4. Ratna Djuwita
5. Andi Ayu
6. Nur Ali
7. Aslam
8. Maksi Paiman
9.
10.
11. Dst

Berkenan dilanjutkan, konfirmasi kami tunggu paling lambat jam 3



Ketik pesan





KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III

Jalan Penjernihan Raya No. 22, Kompleks PDAM, Panaikang, Makassar 90231 Email: bp3kp.sulawesi3@pkp.go.id

LEMBAR DISPOSISI

Unit Pengirim (Internal) :

No Surat :

/Tgl Surat :

Hal :

No Agenda :

/Tgl Penerimaan :

Yth.

- ☒ KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA
☒ KEPALA SATKER PENYEDIAAN PERUMAHAN PROV.
SULAWESI SELATAN
☒ KEPALA SATKER PENYEDIAAN PERUMAHAN PROV.
SULAWESI TENGGARA

- ☒ KEPALA SEKSI PELAKSANAAN WILAYAH I
☒ KEPALA SEKSI PELAKSANAAN WILAYAH II
☒ PPK TATA LAKSANA
☐

SIFAT: ☒ Biasa ☐ Segera ☐ Perlu Perhatian Khusus ☒ Perhatikan Batas Waktu

- ☐ Memberikan dan menyampaikan saran
☐ Diproses sesuai prosedur
☐ Menyiapkan jawaban / bahan
☐ Membicarakan dengan saya
☒ Melaksanakan / menindaklanjuti

- ☒ Mohon Hadir Mewakili saya
☒ Ikut hadir/menugaskan staf
☒ Diketahui / Sebagai Informasi
☐ Menyimpan dalam file

Catatan:

Kepala Balai
Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sulawesi III

BAKHTIAR

NIP 19711009 200212 1 003



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
DIREKTORAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN PERKOTAAN

Learning Center BTN, Jl. Prof. DR. Soepomo No.197, Tebet, Sulawesi Selatan Selatan

Nomor : UM 0102-Kd/82
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP)

Jakarta, 11 September 2025

Yth. **Bapak/Ibu**
(Daftar Terlampir)
di Tempat

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Perumahan dan Peraturan Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Kriteria Penerima Dan Ekosistem Kredit Program Perumahan, serta dalam rangka mewujudkan pembangunan perumahan yang layak dan terjangkau melalui Kredit Program Perumahan (KPP), maka diperlukan **Sosialisasi Kredit Program Perumahan** yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Sabtu – Minggu , 13 – 14 September 2025
Waktu : 08.00 WITA s.d. Selesai
Tempat : Ballroom Sandeq, Hotel Claro,
Jl. A. P. Pettarani No.03, Mannuruki, Kec. Tamalate, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan.

Mengingat pentingnya acara tersebut, diharapkan kehadiran Bapak/Ibu tepat pada waktunya.

Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Direktur
Pembiayaan Perumahan Perkotaan,

Buhari Sirait

NIP 197103101990121001

Tembusan :
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

Lampiran I Surat Undangan

Direktur Pembiayaan Perumahan Perkotaan
Nomor : UM 0102-Kd/82
Hal : Sosialisasi Kredit
Program Perumahan
(KPP)

DAFTAR UNDANGAN

A. Kementerian/Lembaga

1. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III;
3. Pejabat Pembuat Komiten Satuan kerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

B. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Himpunan Bank Milik Negara

1. Direktur Utama PT BNI Tbk;
2. Direktur Utama PT BRI (Persero) Tbk;
3. Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk;
4. Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero).

D. Bank Swasta

1. Bank Nobu;
2. Bank Artha Graha Internasional Tbk;
3. Bank BCA Tbk.

E. Bank Daerah

Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulselbar.

F. Asosiasi

1. Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI);
2. Ketua DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Sulawesi Selatan;
3. Ketua DPP Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (ASPRUMNAS);
4. Ketua DPD Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (ASPRUMNAS) Sulawesi Selatan;
5. Ketua DPP Asosiasi Pengembang Perumahan Sederhana Sehat Nasional (APPERNAS Jaya);
6. Ketua DPD Asosiasi Pengembang Perumahan Sederhana Sehat Nasional (APPERNAS Jaya) Sulawesi Selatan;
7. Ketua DPP Real Estate Indonesia (REI);
8. Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Sulawesi Selatan;
9. Ketua DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA);
10. Ketua DPD Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) Sulawesi Selatan;
11. Ketua DPP Pengembang Indonesia (PI).

G. Pelaku Usaha Kecil, Mikro, Kecil, dan Menengah

1. UMKM Bidang Kuliner (Pedagang Ikan Bakar, Pedagang Coto);
2. UMKM Bidang Fashion (Pedagang Pakaian);
3. UMKM Bidang Jasa Service & Transportasi (Bengkel);
4. UMKM Bidang Pariwisata/ *Homestay*.

H. Pedagang Bahan Bangunan

1. Rekanan Pedagang Bahan Bangunan APERSI;
2. Rekanan Pedagang Bahan Bangunan REI Sulawesi Selatan;
3. Rekanan Pedagang Bahan Bangunan HIMPERRA Sulawesi Selatan;
4. Rekanan Pedagang Bahan Bangunan APPERNAS Jaya Sulawesi Selatan;
5. Rekanan Pedagang Bahan Bangunan ASPRUMNAS Sulawesi Selatan;
6. Rekanan Bahan Bangunan Pengembang Indonesia.

I. Kontraktor

1. Ketua Umum BPD Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Sulawesi Selatan;
2. Rekanan Kontraktor APERSI Sulawesi Selatan;
3. Rekanan Kontraktor REI Sulawesi Selatan;
4. Rekanan Kontraktor HIMPERRA Sulawesi Selatan;
5. Rekanan Kontraktor APERNAS Jaya Sulawesi Selatan;
6. Rekanan Kontraktor ASPRUMNAS Sulawesi Selatan;
7. Rekanan Kontraktor Pengembang Indonesia Sulawesi Selatan.

RAPAT PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN PENYERAPAN ANGGARAN TA 2025

Hari/Tanggal : 22 September 2025

Daftar Hadir Rapat Percepatan Pelaksanaan Program dan Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2025

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II

Senin, 22 September 2025

Pukul 10.00 WIB – selesai

sirafinlaode@gmail.com [Ganti akun](#)

Tidak dibagikan

Draf disimpan

Nama Lengkap

Muh. Irsan Basalamah, S.T., M.T.

NIP

19870612 201001 1 013

INSTANSI / UNIT KERJA / SATUAN KERJA

Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman

JABATAN

Kepala Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO. HANDPHONE

Sirafin_Satker PKP Sult...

BP3KP Jawa II

Anggoro Putro - Kabal...

Satker PKP Pabar, Ferr...

Satker Papua I Leonard...

Satker PKP NTT Dhanl...

Satker Papua I ...

Satker PKP NTT...

Gotong Royong Membangun Untuk Rakyat

REVITALISASI RUSUN TAHUN 2025

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Ditjen Perumahan Perkotaan

(dalam Rp Ribu)

No	Kegiatan	Provinsi	Tower	Unit	Pagu 2025	Progres Anggaran			Ket.
						Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)	
1	Revitalisasi Rumah Susun Wisma Atlet Kemayoran	DKI Jakarta	10	6540	112.107.509	111.738.052	99,67%	369.457	
2	Lanjutan Revitalisasi Rumah Susun Wisma Atlet Kemayoran				93.920.845	-	-	93.920.845	
3	Pengawasan Lanjutan Revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran				100.000	-	-	100.000	
4	Pekerjaan Survey Perawatan dan Pemeliharaan Rumah Susun Wisma Atlet Kemayoran				5.811.296	5.475.172	94,22	336.124	
5	Pembayaran Langganan Listrik Wisma Atlet Kemayoran Desember 2024 - Juni 2025				2.447.606	2.320.628	94,81	126.978	
6	Manajemen Konstruksi Revitalisasi Rumah Susun Wisma Atlet Kemayoran				1.096.306	1.096.306	100	-	
7	Pembayaran Langganan Air Wisma Atlet Kemayoran Januari - Juni 2025				5.000.000	-	-	5.000.000	
8	Pembayaran Langganan Air dan Listrik Wisma Atlet Kemayoran Juli - Desember 2025				1.000.000	654.825	59,65	345.175	
9	Dukungan Pemeliharaan Pada Lanjutan Revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran TA. 2025				221.483.562	121.284.983	54,76%	100.198.579	
TOTAL									

Status tanggal 19 September 2025

17

zoom
Workplace

Meeting

BP3KP Jawa II's screen

Recording

View

Sirafin_Satker PKP Sult...

BP3KP Jawa II

Anggoro Putro - kabal...

BP3KP Jawa 1_Ellas Wijaya

Satker PKP

Gotong Royong
Membangun
Untuk Rakyat

Rumah

REVITALISASI RUSUN TAHUN 2025

Ditjen Perumahan Perkotaan

No	Kegiatan	Provinsi	Tower	Unit	Pagu 2025	Realisasi (Rp)	Pro
1	Revitalisasi Rumah Susun Wisma Atlet Kemayoran	DKI Jakarta	10	6540	112.107.509	111.738.052	
2	Lanjutan Revitalisasi Rumah Susun Wisma Atlet Kemayoran				93.920.845	-	93.920.845
3	Pengawasan Lanjutan Revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran				100.000	-	100.000
4	Pekerjaan Survey Perawatan dan Pemeliharaan Rumah Susun Wisma Atlet Kemayoran				5.811.296	5.475.172	94,22
5	Pembayaran Langganan Listrik Wisma Atlet Kemayoran Desember 2024 - Juni 2025				2.447.606	2.320.628	94,81
6	Manajemen Konstruksi Revitalisasi Rumah Susun Wisma Atlet Kemayoran				1.096.306	1.096.306	100
7	Pembayaran Langganan Air Wisma Atlet Kemayoran Januari - Juni 2025				5.000.000	-	5.000.000
8	Pembayaran Langganan Air dan Listrik Wisma Atlet Kemayoran Juli - Desember 2025				1.000.000	654.825	59,65
9	Dukungan Pemeliharaan Pada Lanjutan Revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran TA. 2025						345.175

Participants (211)

Search

Muh irsan basalamah. ST. MT/ Kasatker PKP ...

Muh. Abdullah_Maluku

Muhammad Dzaky Al Murtadho_Sekretariat...

Biro PKS - Muhammad Sahidu Saifun

0204_Muh Imam Mustawa K_Biro PKS

Invite

Unmute me

Merge to meeting window

Audio

Video

Participants

Chat

React

Share

AI Companion

Apps

Record

Show captions

More

Leave

32°

Search

Windows Taskbar

Browser Tabs

docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSfbcE8hZho2QdQTf-x5Urfc9-BLp953TaF9kFBypPsU-qQ/formResponse

KEMENTERIAN PKP
REPUBLIK INDONESIA

Daftar Hadir Rapat Percepatan
Pelaksanaan Program dan Penyerapan
Anggaran Tahun Anggaran 2025

Jawaban Anda telah direkam.

[Kirim jawaban lain](#)

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google - Hubungi pemilik formulir - Perawatan Layanan - Kebijakan Privasi

Apakah formulir ini tampak mencurigakan? Laporkan

Google Formulir

32°

Search

Windows Taskbar

Browser Tabs

12:05 22/09/2025

